

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**INTEGRASI NEGARA INDONESIA TIMUR
KE NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

Y. Agung Nugroho

NIM : 89214091

NIRM : 890052010604120077

**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1994**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**INTEGRASI NEGARA INDONESIA TIMUR
KE NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**

Oleh :

Y. Agung Nugroho

NIM : 89214091

NIRM : 890052010604120077

**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

1994

LEMBAR PENGESAHAN

**INTEGRASI NEGARA INDONESIA TIMUR
KE NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

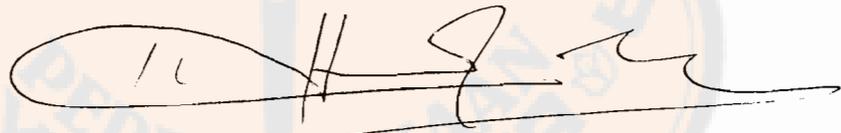
S K R I P S I

Diajukan Oleh :

Y. Agung Nugroho

89214091

Pembimbing I



(DR. P.J. Suwarno, S.H.)

Pembimbing II



(Drs. G. Moedjanto, M.A.)

SKRIPSI

INTEGRASI NEGARA INDONESIA TIMUR
KE NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Y. Agung Nugroho
NIM : 89214091
NIRM : 890052010604120077

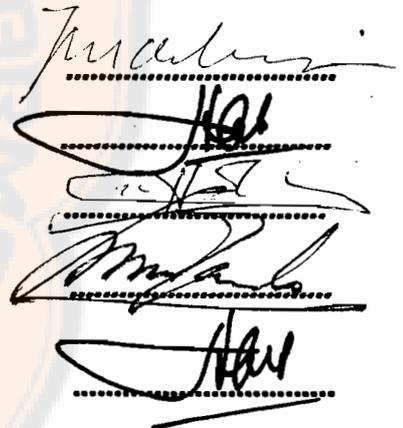
Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada Tanggal : 12 Oktober 1994
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua : Drs. J. Markiswo
Sekretaris : Drs. A. K. Wiharyanto
Anggota : 1. DR. P. J. Suwarno, S. H.
2. Drs. G. Moedjanto, M. A.
3. Drs. A. K. Wiharyanto



Yogyakarta, Oktober 1994
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Sanata Dharma
Dekan



Priyono Marwan
(DR. A. Priyono Marwan, S.J.)



Tentang persembahan :

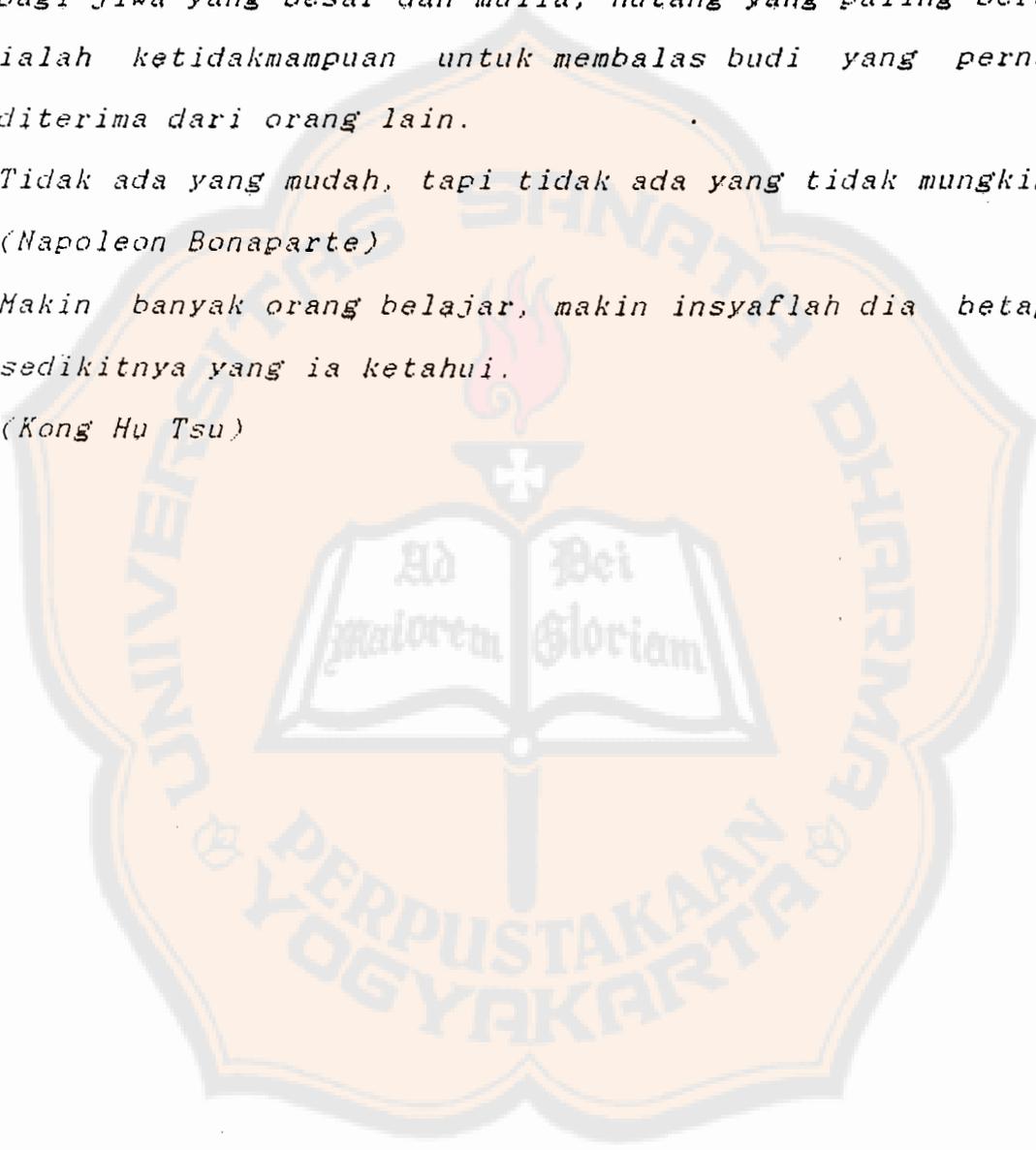
Kupersembahkan untuk

Semua yang mengasihiku dan kekasihku

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

- Bagi jiwa yang besar dan mulia, hutang yang paling berat ialah ketidakmampuan untuk membalas budi yang pernah diterima dari orang lain.
- Tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin.
(Napoleon Bonaparte)
- Makin banyak orang belajar, makin insyaflah dia betapa sedikitnya yang ia ketahui.
(Kong Hu Tsu)



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan kehadirat-Nya yang Mulia dan Maha Pengasih. Beribu terima-kasih, karena rahmatnya-Nya, sehingga kami penulis telah selesai membuat skripsi ini, yang berdasarkan pandangan kami telah disusun semaksimal kemampuan kami serta telah berhasil dengan sempurna.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kami, kepada :

1. Dr. P.J. Suworno, S.H., selaku pembimbing pertama penyusun skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi ini.
2. Drs. G. Hoedjanto, M.A., selaku pembimbing kedua, yang telah membimbing penulisan skripsi ini juga, hingga selesai.
3. Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, beserta para stafnya, yang telah membantu penulis mencari dan memperoleh bahan-bahan guna penulisan skripsi ini.
4. Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta para stafnya yang telah membantu mempermudah kami memperoleh bahan-bahan guna penulisan skripsi ini.
5. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta beserta para stafnya, yang juga telah membantu penulisan mendapatkan sumber-sumber guna penulisan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Perpustakaan Kalosani Yogyakarta, beserta para stafnya, yang telah membantu penulis mendapatkan bahan dan sumber-sumber guna penulisan skripsi ini.

7. Rekan-rekan kami, baik sesama mahasiswa atau bukan, yang telah memberikan bantuan, baik dorongan moril, atau lainnya yang sangat membantu terselesaikannya skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini kami susun dengan sebaik-baiknya, dan sesempurna mungkin. Namun ada pepatah, "tak ada gading yang tak retak", begitu pula dengan skripsi ini. Sehingga bila ada dari para pembaca yang merasa adanya kekurangan pada skripsi ini. Kami penulis dengan tangan terbuka mau menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun, demi semakin sempurnanya skripsi ini.

Terakhir harapan penulis skripsi ini akan menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di mana dalam perjuangan itu telah mengorbankan tidak sedikit harta benda, dan jiwa raga putra-putri dan patriot bangsa ini.

Hormat Saya

Penulis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Skripsi berjudul "Integrasi Negara Indonesia Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia", dibuat dengan mengacu permasalahan pada : (1) "Mengapa Negara Indonesia Timur berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ?", (2) "Bagaimana proses integrasi Negara Indonesia Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ?".

Dasar penulisan skripsi, berpegang pada tujuan bahwa pentingnya untuk mengetahui, memahami dan menghayati, "Bagaimana pahit, getirnya bangsa ini (Indonesia) dalam perjuangan menuju sebuah bangsa dan negara yang sempurna sesuai dengan keinginan segenap rakyat Indonesia ?". Perjuangan yang dibahas adalah menciptakan bentuk negara dan sistem pemerintahan yang sesuai kehendak rakyat, pada masa sesudah KMB atau ditahun 1950-an, khususnya di Negara Indonesia Timur. Selain diatas juga tekanan pokok guna mengerti dan memahami, perjuangan rakyat Indonesia Timur untuk dapat hidup bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, yang ada di pulau Jawa, Sumatera dan lain-lain lewat jalan integrasi ke RI dan menciptakan suatu negara kesatuan.

Integrasi Negara Indonesia Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui suatu perjuangan yang pahit, banyak pengorbanan dan penderitaan, walaupun hanya 4 tahun negara itu bertahan. Perjuangan untuk integrasi harus melalui tahap-tahap, menghancurkan pengaruh Belanda, dan mengalahkan keinginan kaum federal, yang tidak mau bila terjadi suatu integrasi. Perjuangan itu dibarengi pula oleh saudara-saudara di Jawa, Kalimantan, Sumatera dan pulau lainnya yang berusaha menumbangkan RIS, setelah negara mereka dibubarkan (negara bagian). Diplomasi dan militer mewarnai perjuangan rakyat Indonesia Timur pula, terutama di tahun 1950 dan semakin memuncak dipertengahan tahun 1950.

Perjuangan rakyat Negara Indoensia Timur (NIT) guna membubarkan NIT dan mewujudkan kembali Negara Kesatuan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Republik Indonesia (NKRI) seperti yang terwujud pada masa proklamasi 17 Agustus 1945 sudah dilakukan jauh sebelum Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk. Sejak berdirinya NIT atau 24 Desember 1946 sudah mulai timbul gerakan-gerakan menentang NIT, bahkan banyak pula gerakan mau menggagalkan berdirinya NIT, seperti gerakan pasukan Letkol Ngurah Rai, yang terkenal dengan "Puputan Magarana". Juga untuk mendirikan NIT, Belanda ditahun 1946 itu, telah membunuh 40.000 rakyat Sulawesi Selatan dengan tindakan penganiayaan terlebih dahulu.

Berkat perjuangan gigih rakyat NIT beserta Kaum Unitarisnya, maka di tahun 1950 bulan Agustus, tanggal 17, integrasi NIT ke NKRI dapat terwujud, setelah melalui berbagai peristiwa seperti, Andi Aziz, pertempuran di Makasar bulan Agustus antara KNIL, KL melawan APRIS, pertempuran Laskas-laskar Rakyat dengan KNIL, KL dan Polisi NIT.

Integrasi NIT ke NKRI, bersamaan dengan terbentuknya kembali NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950, sebagai ganti RIS yang telah dibubarkan. NKRI di tahun 1950 itu, bukan suatu negara baru, tetapi hanyalah suatu negara, jelmaan dari NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metodologi Penelitian	11
BAB II. TERBENTUKNYA NEGARA INDONESIA TIMUR	17
BAB III. LAHIRNYA REPUBLIK INDONESIA SERI- KAT	28
A. Latar Belakang Terbentuknya RIS	28
B. Reaksi Terhadap Negara RIS..	32
BAB IV. PROSES MENUJU NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.....	48
A. Usaha Rakyat NIT Menyatukan Diri	48

	B. Peranan Pemerintah Pusat dan RI	64
BAB	V. TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	95
	A. Pembubaran Negara Indonesia Timur	95
	B. Tercapainya Integrasi NIT ke RI	126
BAB	VI. PENUTUP	127
	DAFTAR PUSTAKA	132
	LAMPIRAN	136
	1. Induk Persetujuan KMB	138
	2. Rancangan Piagam Penyerahan Kedaulatan	141
	3. Piagam Persetujuan RIS	142
	4. Piagam Penandatanganan	144
	5. Konstitusi RIS	147
	6. Lembaran Negara	155
	7. UUDS RI	161
	8. 11 Desember Hari Bersejarah .	163
	9. Susunan DPR dan Fraksi di NIT	165
	10. Peta RIS	182
	11. Peta Sunda Kecil	183
	12. Peta Sulawesi	184
	13. Peta Sulawesi Utara	185
	14. Peta Sulawesi Tengah	186
	15. Peta Maluku	187

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini ilmu Sejarah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembarakan. Para sejarawan merasa tidak puas apabila peristiwa di masa lampau hanya ditampilkan dalam bentuk kisah, karena tidak mampu mencari latar belakang peristiwanya secara memuaskan. Di kalangan sejarawan berkembang kesadaran bahwa ilmu sejarah tidak hanya bertugas menceritakan masa lampau, tetapi juga menjelaskannya. Oleh karena itu, sejarawan harus melakukan pengkajian yang mendalam terhadap lingkungan fisik, sosial, kebudayaan, dan faktor-faktor situasional yang mendorong terjadinya suatu peristiwa.¹ Kesadaran itu tentulah suatu langkah yang sangat menggembarakan yang menimbulkan ilmu sejarah dapat mengembangkan diri dengan berbagai spesialisasi.

Salah satu studi sejarah yang menarik bagi sejarawan adalah sejarah modern di Indonesia. Salah satu masa yang paling menggugah pemikiran sejarah modern di Indonesia adalah dasawarsa-dasawarsa pertengahan abad ke-20, yang penuh diwarnai dengan pergolakan serta usaha melepaskan

¹Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, Pn. Gramedia, 1992, Jakarta, hlm. 2.

diri dari penjajah dan usaha mempertahankan kemerdekaan. Masa-masa itu merupakan masa yang sangat menentukan bagi perkembangan bangsa Indonesia baik di bidang pemerintah, politik, ekonomi, pertahanan dan kemiliteran. Kelahiran kesadaran Nasional Indonesia diiringi dengan semakin bertambahnya pengetahuan di kalangan rakyat tentang suatu sejarah Nasional yang kita miliki bersama. Sejarah itu melukiskan suatu semangat yang harus dimiliki bangsa baru yang berusaha mencari identitasnya sendiri.

Penulisan sejarah Indonesia banyak dilakukan oleh para sejarawan baik sejarawan dalam negeri maupun luar negeri. Sejarah revolusi bangsa Indonesia merupakan salah satu studi sejarah yang sangat diminati oleh banyak sejarawan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya pelaku-pelaku revolusi yang sampai sekarang sebagian masih hidup. Dan ini penting karena merupakan sumber sejarah lisan. Disamping itu sejarah revolusi Indonesia hingga tahun 1966 masih segar dalam ingatan bangsa Indonesia. Peristiwa itu sepertinya baru saja berakhir dari kemarin meskipun usia negara Republik Indonesia hampir mencapai setengah abad (49 tahun).

Sejarah masa lalu, bangsa Indonesia akan menjadi suatu pemaou dan alat terbaik untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa ini, bila para generasi-generasinya, mampu mengambil inti sari pelajaran dari sejarah bangsanya tersebut. Peristiwa-peristiwa masa lampau dapat membuat generasi sekarang dan seterusnya, mampu untuk

memilih dan menentukan langkah yang terbaik bagi masa depan bangsa dan negerinya. Peristiwa sejarah akan menjadi suatu inspirasi dan pelajaran yang tidak akan habis-habisnya bagi masa sekarang dan akan datang.

Sejarah pemerintah dan perpolitikan merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji. Bangsa Indonesia semenjak merdekanya (1945) hingga tahun 1950-an sampai sekarang mengalami berbagai pergolakan politik maupun pemerintahan. Masa peralihan Negara kesatuan Republik Indonesia ke Negara Indonesia Serikat serta berlanjut pertentangan antara golongan federalis dan unitaris yang berakhir dengan kemenangan unitaris, dengan kembalinya negara Indonesia kebentuk, "Kesatuan" pada tanggal 17-Agustus 1950. Penyatuan kembali negara-negara bagian untuk membentuk suatu negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai tercapai dipertengahan tahun 1950. Tiga negara bagian belum menyatakan meleburkan diri bersatu dengan pemerintah pusat RI. Negara Indonesia Timur merupakan salah satu negara bagian yang paling akhir menyatakan meleburkan diri masuk negara RI.

Kesadaran untuk bersatu menjadi suatu negara kesatuan seperti yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada maasa RIS amatlah sulit diukur pertentangan golongan unitaris dan federalis amat kuat nampak pada masih bertahannya NIT, walaupun Negara bagian lainnya telah bersatu dengan RI. Kesadaran Nasional akan tumbuh melalui perkembangan politik nasional dengan

gerakan-gerakan partai-partai politik yang mempunyai tujuan nasional, memupuk patriotisme dengan lambang-lambang nasional, seperti bendera lagu kebangsaan, mata uang, dan sebagainya.²

Begitu pula kesadaran Nasional di masa RIS, telah menimbulkan gerakan-gerakan untuk kembali ke negara-kesatuan dan dibubarkannya RIS. Tak kecuali di NIT juga ada gerakan-gerakan kembali Ek NKRI. Bentuk negara kesatuan (untaris) terwujud pada tanggal 17-8-'50, dimana bentuk Negara Serikat telah dihapuskan secara resmi.

Dalam skripsi ini penulis memilih judul "Integrasi Negara Indonesia Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia". Penulis tertarik pada permasalahan ini dikarenakan ingin mengetahui dan memahami berbagai aspek penyebab terjadinya integrasi NIT ke NKRI pada tahun 1950 dan proses integrasi NIT itu pula. Untuk itu beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini perlu dikemukakan di sini.

Judul skripsi menunjukkan adanya proses perubahan dari sebuah negara yang mandiri berdiri sendiri, melakukan tindakan pembubaran negaranya dengan jalan wilayahnya diserahkan kepada negara lain (disini negara RI). Proses tersebut sering kita sebut sebagai proses

²Sartono Kartodirdjo, Pemikiran Perkembangan Historiografi Indonesia, suatu Alternatif, Pn. P.T. Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 248.

integrasi. Di dalam kamus Istilah Politik karangan Yahya-Muhaimin, Amin Rais, dan kawan-kawan, mengartikan " integrasi bangsa" (National Integration) sebagai suatu penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pada pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi biasanya melalui suatu proses yang bertahap. Kemudian untuk integrasi wilayah mereka mengartikan sebagai menunjuk pada pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit atau wilayah politik yang lebih kecil yang mungkin beranggotakan suatu kelompok budaya atau sosial tertentu.³

Proses itu diawali dari timbulnya ketidakpuasan suatu kelompok tertentu terhadap pemerintahan negaranya, atau memang sejak awal sudah ada suatu kelompok yang tidak menghendaki berdirinya negara tersebut (NIT). Kelompok-kelompok tersebut, terutama tidak menghendaki adanya negara itu (NIT), bila memiliki power (kekuatan) maka mereka dapat merobohkan pemerintahan yang berkuasa, serta dapat berganti yang memiliki kekuasaan. Dengan kekuasaan dan power yang ada mereka dapat memaksa pemerintahan atau negaranya untuk berintegrasi ke negara lain. (Di sini terjadi integrasi NIT ke RI dan terbentuknya NKRI seluruh Indonesia).

³ Yahya Muhaimin, Amin Raias, Sugiono, Ilin Hallina, dan Usmar Salam, Kamus Istilah Politik, Jakarta, P&K, 1985, hlm. 98.

Dalam ilmu politik, kekuasaan yang di dalamnya terkandung pula suatu kekuatan atau power merupakan kunci bagi suatu kelompok atau politikus untuk memenangkan semua yang mereka inginkan, baik di bidang politik atau sosial, ekonomi. Politik dapat didefinisikan sebagai, "Ilmu yang mempelajari sifat dan tujuan dari negara, sejauh mana sebagai organisasi kekuasaan, serta pelajari gejala kekuasaan lain, yang dapat mempengaruhi negara."⁴

Kekuasaan sendiri diartikan sebagai, "Kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau sekelompok lain, sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan kemajuan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan."⁵

Sementara itu sumber kekuasaan dapat dari berbagai segi. Dia dapat dari kekuasaan fisik (misal: seorang polisi dapat memaksa penjahat untuk mengakui kejahatannya karena dari segi persenjataan polisi lebih kuat); dapat bersumber pada kedudukan (misal: seorang komandan terhadap bawahannya; seorang menteri dapat memecat pegawainya yang korupsi atau memutasikannya ke tempat lain); pada kekayaan (misal: seorang pengusaha kaya dapat mempengaruhi politikus melalui kekayaannya); sumber pada

⁴Dra. Soelistyati Ismail Gani, Pengantar Ilmu Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 19-20.

⁵Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1977, hlm. 35.

kepercayaan (misal, seorang pendeta terhadap umatnya), dan lain-lain.¹⁾

Sejarah bangsa Indonesia sejak tahun 1945 hingga 1950 menganut dua bentuk negara . Pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 bangsa Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1949 bangsa Indonesia menganut bentuk negara serikat. Berdasarkan buku "Ensiklopedi Nasional Indonesia", negara kesatuan diartikan sebagai suatu negara yang mempunyai satu pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya dan memegang kedaulatan ke dalam dan keluar. Negara kesatuan memiliki satu UUD, satu kepala negara (Presiden), satu Dewan Menteri, dan satu Dewan perwakilan Rakyat (DPR). Daerah negara ini terbagi atas propinsi-propinsi atau daerah tingkat satu. Kemudian untuk negara serikat diartikan sebagai suatu negara yang terbentuk bila ada beberapa negara menggabungkan diri dibawah satu kekuasaan pusat. Gabungan negara itu lalu merupakan satu kesatuan dalam tindakannya keluar, tetapi dalam tindakan ke dalam masing-masing negara masih tetap merdeka asal negara bagian itu tindakannya tidak bertentangan dengan UUD persatuan negara serikat tersebut. Dengan kata lain kedaulatan keluar dipegang pemerintah pusat, sedangkan kedaulatan ke dalam dipegang oleh negara-negara bagian.

1) Ibid., hlm. 36

Wilayah negara serikat berupa negara-negara bagian bukan propinsi-propinsi atau daerah tingkat satu. Di setiap negara bagian dapat memiliki UUD sendiri, kepala negara sendiri, Dewan Menteri sendiri, dan DPR, walaupun untuk urusan dalam negeri saja⁷

Kalau diteliti sebenarnya bentuk federal ini adalah suatu kelanjutan yang logis dari politik kolonial Hindia Belanda sebelum perang; sebab pada waktu itu Belanda memang berniat untuk membentuk daerah-daerah otonom di Indonesia. Bangsa Belanda sejak memberlakukan politik etika pada tahun 1904 sudah mempunyai kehendak melakukan perbaikan di Indonesia. Pemerintah Belanda sejak itu menyebarluaskan program penyelenggaraan pendidikan dasar, membangun banyak sarana irigrasi dan transmigrasi dengan memindahkan penduduk Jawa ke Lampung. Politik etika membuat bangsa Belanda sampai Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tetap menganggap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang belum siap merdeka atau memerintah sendiri. Sebagai contoh H.J. Van Mook, setelah berhenti bertugas di Indonesia pada tahun 1948, ia menulis buku berjudul "The Stakes of Democracy in South-East Asia". Isi buku antara lain menjelaskan bahwa Van Mook sejak lama telah merumuskan pemikirannya tentang tugas negara penjajah dan fungsi penjajah, yaitu penjajahan bertugas memerdekakan

⁷Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 11, Jakarta, PT. Cipta Adi Mustaka, 1990, hlm. 63

pihak yang terjajah. Ia menjelaskan, guna mencapai tujuan tersebut perlu syarat-syarat antara lain, kemajuan pendidikan, ekonomi, dan komunikasi.⁸

Ide ini dengan sendirinya berbeda dengan cita-cita seluruh bangsa Indonesia, yaitu sejak pergerakan Nasional. Jadi tidak mengherankan kalau tokoh-tokoh Republik yang sebagian besar adalah tokoh-tokoh Pergerakan Nasional juga menentang ide ini. Apalagi federalisme yang diinginkan Van Mook itu harus dipimpin oleh Belanda. Jadi sejak semula telah ada perbedaan paham yang sukar dapat didamaikan. Pergolakan-pergolakan dalam tahun 1946 sampai 1950 adalah perjuangan untuk mengalahkan niat Belanda itu.⁹

Dimana-mana di Indonesia rakyat dengan para pemimpinnya yang berjiwa Proklamasi 17-8-1945 berjuang menentang ide feodalisme tersebut. Dan di daerah Maluku perjuangan tersebut ditepiskan oleh para pejuang sampai terwujudnya Negara Kesatuan RI tanggal 17-8-1950.¹⁰

Di daerah Sulawesi Tengah, berdiri organisasi-organisasi yang menentang paham federalis, seperti pada bulan Juli 1949 dibentuk satu wadah menghimpun organisasi-organisasi yang ada bernama Ikatan Persatuan

⁸Seri Pembinaan Pengajaran Sejarah, Seri XVIII, April 1992, Univ. Sanata Dharma Press, hlm 3-4, 10.

⁹John A. Pattikayhatu, *op. cit.*, hlm. 55.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 54

Perjuangan Rakyat Indonesia disingkat IPPRI berpusat di Palu.¹¹

Di NIT melalui lembaga legislatif di daerah setempat dilakukanlah perjuangan yang senada dengan perjuangan partai politik karena kebetulan mayoritas dari anggotanya adalah mereka yang berjiwa republiken. Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan ini disamping gerakan rakyat bersama partai-partai politik dilanjutkan perjuangan mengarah pada membubarkan NIT untuk kembali bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah sekitar situasi politik Indonesia pada tahun 1950, di saat kembalinya negara Indonesia ke bentuk kesatuan atau TI. Mengingat begitu luasnya ruang lingkup permasalahan, sehingga penulis hanya mengfokuskan diri pada peristiwa penyatuan kembali negara bagian ke RI, dengan mengambil negara Indonesia Timur sebagai pokok permasalahannya.

Dari hal tersebut, maka dapat dibuat suatu rumusan permasalahan sebagai berikut :

¹¹Bambang Suwondo, Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah, P & K, Jakarta, 1982, hlm. 127.

¹²Ibid., hlm. 127.

1. "Mengapa Negara Indonesia Timur berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ?"
2. "Bagaimana proses integrasi Negara Indonesia Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian adalah guna mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga Negara Indonesia Timur melakukan integrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta untuk mendiskripsikan, "Bagaimana proses integrasi tersebut dapat berlangsung atau jalannya proses integrasi?"

D. Manfaat Penelitian

Berbagai manfaat dari penelitian ini dapat disebutkan yaitu, untuk menambah kasanah pengetahuan, baik untuk mahasiswa sendiri, Perguruan Tinggi, khususnya IKIP Sanata Dharma, masyarakat dan Departemen P & K. Penelitian tentang Negara Indonesia Timur ini berguna memberikan suatu sumbangan untuk menambah bahan untuk sempurnanya penulisan sejarah Indonesia.

E. Metodologi Penelitian

(a). Metode yang digunakan dan jenis penelitian sebuah penelitian adalah suatu laporan mengenai suatu

obyek, yang dikaji secara obyektif oleh seorang peneliti atau ilmuwan. Tujuan laporan yang istimewa adalah meletakkan fakta-fakta dengan tepat, dan tidak lain daripada suatu fakta-fakta yang tepat, tanpa berhubungan dengan perasaan, atau pandangan pribadi tentang fakta-fakta itu.¹³

Berdasarkan pengertian di atas dan topik penulisan penelitian ini, maka metode penelitian yang paling teliti dan akurat adalah mempergunakan jenis penelitian historis. Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat suatu rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, menverifikasi, dan mensistesisikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.¹⁴

Penelitian historis menggunakan dua sumber dalam penelitiannya, yaitu sumber primer (utama) dan sumber sekunder (kedua). Sumber utama antara lain dokumen, peninggalan langsung dari peristiwa, dan catatan saksi mata, misal notulen rapat, rekaman kejadian, karya seni, saksi mata, dan lain-lain. Sumber kedua adalah sumber dari tangan kedua seperti buku-buku, artikel, hasil

¹³Kamaruddin, Metodologi Penelitian Skripsi dan Tesis, Pn. Angkasa, Bandung, 1992, hlm. 11.

¹⁴Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Pn. Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 16.

penelitian, ensiklopedi, dan lain-lainnya.¹⁵

Beberapa langkah yang penulis tempuh dalam penulisan ini adalah :

- a). Perumusan Masalah
- b). Perumusan Judul dan Metodologi
- c). Pelaksanaan Kerja Lapangan
- d). Analisa Data dan Informasi.
- e). Penulisan Laporan.

(b) Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan kebutuhan informasi dan data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data melalui :

1). Studi Dokumentasi

Dilakukan untuk mencari data-data fakta sejarah. Hal ini dilaksanakan sebab masih banyak arsip-arsip yang membicarakan permasalahan yang diangkat. Data yang benar dan akurat diharapkan sekali dapat tercapai di sini.

Beberapa studi dokumen yang akan diteliti adalah, dokumen yang terdapat di lembar negara perpustakaan Universitas UGM (berupa tentang Pembubaran, Undang-undang darurat, dan Keputusan Presiden, semua berkisar di tahun (1949-1950), dokumen KMB dan integrasi yang terdapat di Arsip Nasional Jakarta, dan Perpustakaan Nasional

¹⁵Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Pn., Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 81.

Jakarta. Serta dokumen media massa tahun 1949-1952, yang terdapat di Perpustakaan Wilayah DIY.

2). Studi Kepustakaan

Guna menghasilkan suatu penelitian yang lengkap dan sempurna perlu ditambah dengan studi pustaka. Studi ini ditekankan pada penggunaan sumber-sumber sekunder yang berupa buku-buku, karya-karya, yang semua itu dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan mendukung tujuan serta permasalahan penelitian. Buku pustaka dan karya yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain, yaitu buku Drs. H. Bambang Suwondo, dkk., tiga jilid, berupa Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat, Drs. John Pattikayhatu, Sejarah Revolusi Daerah Maluku, I.H. Doko, Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Nusa Tenggara Timur, Ide Anak Agung Gde Agung, Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat, A.A. Schiller, The Formation Federal Indonesia 1945-1949, Prof. G. Kahin, Nationalism and Revolution Indonesia, Cornell University Press, dan lain-lainnya.

(c). Hasil Studi Awal

Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dengan ini peneliti berani memberikan suatu praduga sementara yang berisi, bahwa "Faktor-faktor penyebab integrasi NIT ke NKRI", dapat dicari dengan mendasarkan diri dalam pencarian masalah :

1. Ada keikutsertaan RI dan pemerintah pusat dalam usaha untuk terjadinya integrasi NIT ke NKRI.
2. Ada usaha dari rakyat NIT agar NIT dibubarkan dan berintegrasi ke NKRI.
3. Presiden Soekarno memiliki peranan dalam mewujudkan integrasi NIT ke NKRI.

Dugaan sementara tersebut dimaksudkan penulis untuk membantu dan memperlancar penelitian yang hendak dilakukan.

(d). Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran keseluruhan isi skripsi ini penulis di sini menyajikan bentuk dan isi penulisan yang akan di buat. Sistematika penulisan ini di bagi dalam per-bab, yang masing-masing memberikan uraian-uraian penting tersendiri.

Pada bagian Bab I, akan diuraikan permasalahan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Pembahasan skripsi ini terdiri tiga bab. Pada bagian ini, dibagi menjadi bab II, III, IV. Bab II akan menguraikan tentang latar belakang terbentuknya RIS (Republik Indonesia Serikat) di Indonesia, serta menguraikan tentang reaksi atas kelahiran RIS. Dibagian bab III, akan diuraikan tentang usaha rakyat NIT (Negara Indonesia Timur) untuk berintegrasi ke RI (Republik Indonesia). Di sini dan peranan RI di dalam proses terwujudnya integrasi NIT ke RI. Pembahasan terakhir atau

bab IV, akan menguraikan tentang proses menuju ke integrasi NIT ke RI, dan tentang pembubaran NIT serta terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Kesimpulan skripsi ini kami letakkan pada bab akhir atau bab lima. Bab ini berisikan jawaban-jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini.

(e). Teknik analisa data

Penelitian yang dipakai adalah penelitian historis, maka analisa data yang dipakai adalah pendekatan historis. Menganalisa data dalam penelitian ini menggunakan kritik internal dan kritik eksternal. Hasil yang diperoleh dari analisa data adalah rangkai fakta-fakta historis yang saling mendukung dan berkaitan satu dengan yang lain membentuk suatu kisah sejarah.

BAB II

LAHIRNYA NEGARA INDONESIA TIMUR

Pada saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Belanda di Den Haag (Negeri Belanda) maupun Pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook yang berkedudukan di Brisbane (Australia) masih memimpikan bahwa pemerintah Belanda akan dapat mengembalikan pemerintahan kolonial di atas tanah jajahannya, dahulu Hindia Belanda, sekalipun dalam bentuk yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi politik sesudah berakhirnya Perang Pasifik. Dr. H.J. van Mook menulis pada tanggal 25 Agustus 1945 dari Brisbane kepada Menteri Tanah Seberang Prof. dr. H.J. Logemann bahwa "tidak perlu menaruh perhatian kepada Republik oleh karena Republik adalah kreasi Jepang."¹⁶

Situasi Indonesia, terutama Indonesia Timur, yang mencakup Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat (yang nanti masuk wilayah NIT), dan daerah-daerah lainnya; sesudah proklamasi, penuh diwarnai dengan gejolak politik, yang semakin panas setelah kedatangan sekutu yang diboncengi tentara NICA (Belanda),

¹⁶Ide Anak Agung Gde Agung, Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat, UGM University Press, Yogyakarta, 1985, hlm. 1.

bahkan akhirnya mengakibatkan berbagai perang berdarah di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Indonesia Timur.

Pada tanggal 11 Januari 1946, pasukan Sekutu masuk daerah Nusa Tenggara Barat. Kapal perang Sekutu memasuki pelabuhan Bima. Bersama mereka ikut tentara Belanda. Beberapa hari setelah tanggal 12-1-1946 di Pulau Sumbawa, NICA mengadakan operasi penangkapan terhadap pemuda-pemuda yang dicurigai. Banyak di antaranya berasal dari polisi TKR ditahan dalam penjara. Selama ditahan mereka mendapatkan siksaan-siksaan berat.¹⁷

Pada tahun 1945, Belanda mengirim Westerling ke Sulawesi untuk memadamkan pemberontakan rakyat di sana, yang berjuang untuk merdeka. Dia telah melakukannya dengan cara yang tak kenal ampun, dan kejam. Perempuan dan anak-anak, yang pulang dari pasar, lelaki di tengah jalan ditembak dengan semauanya. Ada yang diseret dari rumahnya. Rakyat ditangkap secara membabi buta, kemudian ditembak, sebagai peringatan kepada yang lain supaya jangan mencoba menggulingkan Belanda. Sebuah kampung telah disapu bersih. Laki-laki dipaksa menggali parit sebagai kuburan dari pemukiman besar-besaran yang menyusul setelah itu.¹⁸

¹⁷Bambang Suwondo H, dkk., Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat, P & K, Jakarta, 1978, hlm. 185.

¹⁸K Tut Tantri, Revolusi di Nusa Damai, PN. Gunung Agung, Jakarta, 1965, hlm. 344-345.

Soekarno didalam pernyataannya se usai perundingan Linggarjati, didalam pembicaraan telepon, ia mengecam Van Mook dan NICA-nya. Perselisihan Soekarno dan Van Mook, timbul lama baik sesudah maupun sebelum Linggarjati. Kecaman-kecaman Soekarno banyak dilontarkan terhadap Van Mook. Soekarno menyebut Van Mook, sebagai seorang sadis, pembunuh kejam, dan pembantai masyarakat, salah satunya dengan NICA dan Westerlingnya telah menteror dan membantai rakyat Sulawesi Selatan.¹⁹

Pada tanggal 18 Maret 1946 tentara NICA mendarat di Ampenan, Nusa Tenggara Barat. Sebelum rakyat mengadakan perlawanan terhadap NICA, pemimpin-pemimpin mereka ditangkap dan ditahan. Di antara pemimpin yang ditangkap adalah antara lain: Hasmosawigito, Suwoco, Wayan Ruma, D.A. Koemenit, Reksoatmojo, R.B. Mujiman, Dr. I. Ketut Numija, Jusuf Tayib Napis, Maman Padelah, Saleh, Mamiq Ripaah, Made Putu Wirya, Nangcik, Suhardi, Sumantri, Asmo, A. Hasan, Lalu Tahir, Rasida, Kusalamwardi, I Gusti Made Murna, I Made Gelgel, Rawisah, I Made Raka, Acih, dan lain-lain. Penangkapan dan penyiksaan terhadap pejuang-pejuang kemerdekaan secara intensif dilakukan NICA. Anak-anak sekolah pun tidak luput dari penangkapan. Cacian dan cemoohan kepada pejuang kemerdekaan disiapkan

¹⁹Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, Pn Gunung Agung, Jakarta, hlm. 366.

seluas-luasnya kepada masyarakat melalui pidato, penerangan, dan surat kabar. Rinjani, dan beberapa berbagai buletin dan brosur. Selain itu ada petugas keliling dengan mobil unit menyiarkan kabar bohong dan penghinaan terhadap republik dan pejuang kemerdekaan. Karangan Mr. Mas Slamet yang menghina Bung Karno juga disiarkan dan diberi cuma-cuma, kepada semua kantor dan sekolah-sekolah. Di rumah-rumah tahanan dan penjaran-penjara mata-mata disebarakan.

Dikatakan sejak operasi penangkapan di atas, gerakan rakyat lumpuh sama sekali dan Belanda mulai menyusun pemerintahannya di Pulau Sumbawa.²⁰

Perlawanan pemuda yang paling hebat untuk menentang kembalinya kekuasaan kolonial Belanda terjadi di Bali dan Sulawesi Selatan. Tentara Belanda berusaha meluaskan kekuasaannya di luar kota-kota di Bali, dan mendapat perlawanan sengit dari TKR dan pemuda-pemuda, di bawah pimpinan Letnan Kolonel I Gusti Ngurah-Rai.²²

Peristiwa-peristiwa di atas merupakan gambaran situasi daerah Indonesia Timur setelah proklamasi, terutama setelah kedatangan pasukan NICA ke Indonesia Timur. Sehingga ketika tentara Sekutu ditarik kembali

²⁰Bambang Suwondo, *op. cit.*, hlm. 183-185.

²²Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, UGM Press, Yogyakarta, 1985, hlm. 47.

pada bulan Juli 1946, maka pasukan NICA telah bercokol dengan bebas di wilayah Indonesia Timur.²³

Kemudian setelah menguasai keadaan dan kekuasaan di Indonesia Timur, pasukan NICA, di bawah pimpinan Van Mook, segera membujuk para pemimpin atau penguasa-penguasa daerah di Indonesia Timur untuk mendirikan suatu negara yang berdiri sendiri, terpisah dari RI, dan negara itu diberi nama Negara Indonesia Timur (NIT).

Berbagai peristiwa besar yang mendahului sebelum didirikannya NIT, pada tanggal 24 Desember 1946, dapat disebutkan; (1) pertempuran puputan Magarana di Bali, dipimpin Letkol. I Gusti Ngurah Rai, yang melawan pasukan Belanda pada tanggal 20 Nopember 1946 dan Belanda berhasil membunuh seluruh pasukan Tentara Republik Indonesia di Bali. Sehingga tidak dapat disangkal lagi setelah peristiwa tersebut terutama Belanda di Bali dapat peluang untuk menormalisasi keadaan di Bali, oleh karena itu tidak ada lagi kekuatan militer RI yang dapat menghalangi Belanda secara teratur.²⁴ (2). Peristiwa di Bali di atas kemudian dilanjutkan dengan pembantaian rakyat Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh NICA pada tanggal 7 Desember 1946, dengan membunuh 40.000 jiwa rakyat Sulawesi Selatan, (3). Peristiwa tersebut dilanjutkan dengan

²³ John Patikayhatu, Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Daerah Maluku, P & K, Maluku, 1979, hlm. 54.

²⁴ Anak Agung Gde Agung, op. cit., hlm. 128-129.

pembersihan dan penangkapan 42 orang Indonesia di Makassar, pada tanggal 13 Desember 1946, dan di sekitar Limbung, patroli Belanda telah membunuh 8 orang Indonesia, (4). Pada tanggal 18 Desember 1946, kota Malino (tempat dilangsungkannya konferensi Malino pada bulan Juli 1946) diserang dengan hebat oleh sepasukan orang Indonesia, yang berjumlah 500 orang, tetapi dapat dipukul mundur oleh Belanda.²⁵

NIT (Negara Indonesia Timur) merupakan negara bagian pertama yang diciptakan oleh Belanda dalam bulan Desember 1946 dan meliputi daerah-daerah sebelah timur Selat Makasar dan Selat Bali. Rencana pendirian federasi diciptakan di Malino dalam bulan Juli 1946, sedang realisasi pendirian NIT terjadi dalam konferensi Denpasar pada bulan Desember 1946 menurut konferensi Malino federasi yang dibangun di Indonesia akan terdiri dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan NIT (dulu Timur Besar). Karena Jawa dan Sumatera di luar kekuasaan NICA sedangkan berbagai kekuatan sosial politik di Kalimantan menolak federasi (mula-mula), maka konferensi Denpasar hanya dihadiri oleh wakil-wakil berbagai daerah di lingkungan NIT saja. Mereka mencapai persetujuan tentang konstitusi NIT pada 24 Desember 1946, yang dalam perundang-undangan Belanda disebut Denpasar regeling, yang kemudian

²⁵Osman Raliby, *Documenta Historica*, Pn. Bulan Bintang, Jakarta, 1953, hlm. 468, 470, dan 475. atau Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 129-131.

diperkuat dengan wett (undang-undang). Lembaga pemerintah NIT terdiri dari badan Eksekutif (pemerintah dan menteri-menteri), DPR Sementara, Senat Sementara, Komisaris Mahkota bertindak sebagai penasehat dan pengawas agar hak-hak warganegara dijamin. Denpasar regeling mengalami perubahan dalam konferensi Malino II pada bulan Mei 1948. Sebagai presiden NIT terpilih Cokrode Gde Raka Sukawati. Di bawahnya ada kabinet yang berkuasa dengan dukungan DPR (sistem parlementer).²⁶

Dalam bulan April 1947 dibentuk Dewan PRS. Utusan-utusan dipilih dewan-dewan daerah disamping yang diangkat oleh pemerintah Belanda. Dari Maluku dikirim utusan-utusan oleh Dewan Maluku Selatan dan dewan Maluku Utara. Dalam Dewan PRS inilah ide federalisme dilawan oleh tokoh-tokoh yang menganut ide negara kesatuan atau unitarisme. Suatu perjuangan parlementer diteruskan sampai tahun 1949.²⁷

Waktu terjadi agresi militer Belanda ke II, kaum pergerakan Maluku mengambil reaksi, dengan organisasi-organisasi pergerakan mulai mengadakan gabungan-gabungan agar dapat berjuang lebih tegas. Tidak lagi suatu negara federal, akan tetapi negara Indonesia yang berdaulat penuh. Dalam parlemen golongan progresif meningkatkan

²⁶G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20, Jilid II, Pn. Kanisius, Yogyakarta, 1980, hlm. 60.

²⁷John A. Pattikayhatu, op. cit., hlm. 57.

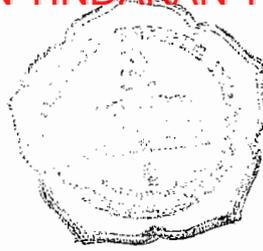
perjuangannya. Arnold Mononutu mendirikan Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI).²⁸

Pada saat menjelang KMB Delegasi Belanda didukung oleh pemerintah NIT dalam usaha melemahkan posisi Republik Indonesia dengan tindakan mengirim berita yang dilakukan oleh Menteri Sosial NIT berbunyi sebagai berikut :

"Di daerah Sulawesi Tengah pada khususnya, Indonesia Timur pada umumnya, tidak lagi ada perlawanan, semua orang Republikan sudah tertawan dan seluruhnya Rakyat NIT pada umumnya patuh kepada pemerintah."

Untuk membuktikan ketidakbenaran berita itu maka pejuang-pejuang Abdullah Riyu, Andi Baso Rahim dengan kawan-kawannya pada tanggal 29 Oktober 1949 segera menuju Masamba (daerah Kabupaten Palopo sekarang) untuk melepaskan Andi Atas bersama 40 orang kawannya yang tertawan oleh Belanda. Pasukan pejuang berhasil melepaskan semua pejuang yang tertawan oleh Belanda malah dapat merampas senjata dari pengawal penjara kemudian mereka menyerbu kantor polisi Masamba dan merampas persenjataan di kantor tersebut. Dalam waktu yang singkat praktis seluruh kota Masamba dapat diduduki oleh para pejuang dari divisi PKR Luwu. Peristiwa ini dikenal dengan nama "Masamba Affair" dan mempengaruhi suasana perundingan KMB di mana Belanda tak dapat menyangkal bahwa sebenarnya kekuatan Republik di Sulawesi masih tetap ada. Disusul pula peristiwa aksi

²⁸Ibid., hlm. 59.



pasukan Resimen VII Divisi PKR Luwu cabang Sulawesi Tengah dipimpin oleh Abdul Latief Mangitung pada bulan Desember 1949, menggempur dan menduduki asrama KNIL di Poso selama 3 x 24 jam kemudian bertempur dengan polisi Belanda di Poso. Pada peristiwa itu seorang pejuang terluka kena tembak dan 50 orang pasukan PKR tertawan. Setelah penyerbuan itu pasukan pejuang kemudian mengundurkan diri ke pedalaman.²⁹

Perjuangan menentang bentuk federasi dan menuntut pembubaran NIT muncul pula di Sulawesi Utara dengan wadah perjuangannya organisasi LRRRI (Laskar Rakyat Republik Indonesia) dan KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi). Juga telah diketahui bahwa dalam KNIL dan polisi NIT sudah banyak yang secara diam-diam menjadi pro RI berkat penggalangan dari para anggota LRRRI untuk polisi dan LFP (Laskar Front Pemuda) untuk KNIL.³⁰

Pada tanggal 8 Oktober 1949, para anggota KRIS Minahasa mengadakan pertemuan di Tondano untuk memperingati hari lahirnya KRIS di Jawa. Para pemimpin pro RI yang hadir waktu itu ialah Bert Supit, Sj. Taulu, Ompi, Moningka, L. Anes, N.Th. Rumajar, Ch. Talumikir (Letnan AURI yang menyusup), F. Runtunuwu, J. Watuseke, F. Tuju dan lain-lain. Pada waktu itu hadir pula J. Wajong yang baru

²⁹ Bambang Suwondo, Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah, P & K, Jakarta, 1982, hlm. 128.

³⁰ Drs. Bambang Suwondo, Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara, P & K, Jakarta, 1983, hlm. 185.

saja datang dari Yogyakarta yang menjabat selaku Wakil Sekretaris/Sekretaris Jenderal Pemerintahan Propinsi Sulawesi dari pemerintah RI yang berkedudukan di Yogyakarta (berhubung Sulawesi masih dikuasai NIT).

Acara peringatan itu manandakan rasa solidaritas dari KRIS di Minahasa terhadap KRIS di Jawa yang sama-sama sebagai barisan perjuangan melawan kekuatan Belanda. Juga peristiwa itu dirasakan sebagai tempat konsolidasi keanggotaan oleh tokoh KRIS J. Wajong yang dalam kata-kata sambutannya, membakar semangat perjuangan KRIS khususnya gerilya pro RI di daerah ini. Beberapa di antara mereka sudah disebutkan di depan. Peranan mereka amatlah besar dalam menunjang perjuangan gerilya melawan Belanda di daerah ini. Antaranya dapat disebutkan Kapten C. Mamahit yang lebih dikenal sebagai Tein Mamahit yang ditugaskan oleh pimpinan LRRI F.H.L.W. Mondong untuk menjabat selaku Komandan Wilayah V LRRI Kakas-Remboken. Pada tanggal 25 Oktober 1949, bersama sepasukan LRRI dari Remboken, ia pergi menyerang kedudukan polisi NIT di Kakas.³¹

Uraian-uraian di atas menunjukkan kepada kita bahwa dari awal berdirinya NIT (Negara Indonesia Timur) sampai menjelang akan diselenggarakannya KBM, selalu ditentang dan dimusuhi oleh golongan-golongan yang tidak ingin ada

³¹Ibid., hlm. 186-187.

di NIT, baik itu golongan militer maupun politik.
(Golongan-golongan ini menamakan dirinya golongan Pro-RI
(Republik Indonesia)).



BAB III
BERDIRINYA RIS

A. Latar Belakang Terbentuknya RIS

Konflik antara pemerintah RI dan BFO (Badan Permusyawaratan Federal) di satu pihak dan dengan pemerintah Belanda dipihak lain, secara formal dapat diakhiri dengan dilaksanakannya perundingan KMB (Konferensi Meja Bundar). Dalam perundingan KMB pihak RI maupun BFO mengirimkan wakil-wakil mereka masing-masing. Sebelum KMB diselenggarakan telah diadakan terlebih dahulu perundingan antara pemerintah RI dan BFO dengan tujuan untuk dapat menghadapi pemerintah Belanda bersama-sama dalam perundingan KMB nanti.

Konferensi inter Indonesia (antara RI dan BFO) diselenggarakan dalam dua konferensi. Konferensi pertama diadakan di Yogyakarta, pada tanggal 19 - 22 Juli 1949, dengan menghasilkan suatu persetujuan antara lain mengenai: Pasal 1, nama negara adalah Republik Indonesia Serikat (RIS), berdasarkan antara lain atas demokrasi dan perserikatan; Pasal 2, bahwa dalam konstitusi sementara RIS harus diterangkan dengan jelas, dari negara-negara apa RIS itu terdiri.³³

³³ K.M.L. Tobing, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia. KMB, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1987, hlm. 151.

Konferensi inter Indonesia yang kedua diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 31 Juli - 2 Agustus 1949. Konferensi ini menghasilkan suatu persetujuan, diantaranya adalah, Pasal II, bagian a, b dan c, berisi : a). oleh kedua delegasi (RI & BFO) dibentuk sebuah panitia teknik untuk merancang konstitusi sementara yang akan berdasar atas persetujuan yang telah dicapai pada konferensi Inter Indonesia yang pertama dan kedua; b). Setelah konstitusi sementara itu selesai dirancang, lalu dimajukan kepada kedua delegasi di Den Haag sebagai wakil-wakil dari negara-negara bagian RIS; c). Sesudah diperundingkan, kalau pula dengan perubahan atau disetujui oleh kedua delegasi, maka rancangan tadi diparaf oleh kedua delegasi, maka rancangan tadi di paraf oleh kedua delegasi atas nama pemerintahnya masing-masing.³⁴

Sebagai hasil dari perundingan antara delegasi Republik, delegasi BFO, dan Nederland, maka tujuan dari KMB ialah penyelesaian daripada persengketaan Indonesia dan Belanda. KMB mencapai persetujuan tentang cara penyerahan kedaulatan yang sungguh, penuh dan tidak bersyarat kepada Negara Republik Indonesia Serikat sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville.

³⁴ Ibid, hlm. 158.

Para pihak yang turut serta dalam KMB berjanji untuk berusaha supaya KMB dapat dimulai sebelum tanggal 1 Agustus 1949 dan diselesaikan di dalam waktu dua bulan sesudah itu.

Para peserta berjanji untuk berusaha mengesahkan persetujuan-persetujuan yang dihasilkan KMB itu di dalam waktu enam minggu sesudah KMB selesai. Oleh karena itu kedaulatan harus dapat diserahkan kepada Negara Indonesia Serikat sebelum penghabisan tahun 1949.³⁵

Pada tanggal 23 Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar dibuka di Den Haag, bertempat di ruang Ridderzaal. Pada tanggal 29 Oktober Konferensi itu selesai dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat di parap di Scheveningen.³⁶

Pada akhirnya konferensi Meja Bundar atau KMB dapat selesai pada tanggal 2 Nopember 1949. Semua organisasi dan partai politik di Indonesia menjadikan bulan Nopember sibuk membahas hasil KMB. Tanggal 7 Desember 1949 KNIP yang bertindak sebagai parlemen Republik Indonesia mengadakan rapat membahas hasil-hasil KMB. Selama 7 hari KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) mengadakan rapat dengan perdebatan yang sengit. Hasil rapat, KNIP menerima KMB

³⁵ Notosoetardjo, Dokumen-dokumen KMB. Sebelum Sesudah dan Pembubarannya, Pn. Endang, Jakarta, 1956, hlm. 56.

³⁶ Moh. Hatta, Mempir, Pn. Tintamas, Jakarta, 1979, hlm. 559.

secara bulat setelah dilakukan voting, 15 Desember 1949.³⁷

Keputusan KMB yang paling penting adalah pengakuan kedaulatan Indonesia Serikat oleh Belanda. Pelaksanaan pengakuan kedaulatan ini diselenggarakan pada tanggal 27-Desember 1949 di Den Haag, negeri Belanda. Di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1949 Soekarno berpidato menyatakan bahwa RIS telah terbentuk.

Pada tanggal 16 Desember 1949 di Kepatihan Yogyakarta dilakukan pemilihan Presiden R.I.S. yang pertama oleh wakil-wakil Negara Bagian. Dengan suara bulat Presiden Soekarno dipilih sebagai Presiden R.I.S. yang pertama. Penobatan Presiden R.I.S. dilakukan di Bangsal Sitinggil Yogyakarta.

Pada tanggal 19 Desember 1949 Kabinet R.I.S. dibentuk dan tersusun sebagai berikut :

Perdana Menteri	: Drs.Mohammad Hatta
Menteeri Luar Negeri	: Drs.Mohammad Hatta
Menteri Pertahanan	: Sultan Hamengkubuwono IX
Menteri Dalam Negeri	: Ide Anak Agung Gde Agung.
Menteri Keuangan	: Mr. Sjafruddin Prawiranegara
Menteri Perekonomian	: Ir. Djuanda.
Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum	: Ir. Laoh

³⁷ K.M.L. tobing, *Ibid*, hlm. 231-232.

Menteri Kehakiman : Prof. Mr. Soepomo
Menteri P. dan K. : dr. Abu Hanifah.
Menteri Kesehatan : dr. J. Leimena.
Menteri Perburuhan : Mr. Wilopo
Menteri Sosial : Mr. Kosasih Pruwanegara.
Menteri Agama : K.H. Wahid Hasyim.
Menteri Penerangan : A. Mononutu
Menteri Negara : Sultan Hamid Aljadri II.
Mr. Moh. Roem
dr. Soeparno.³⁸

Pada tanggal 27 Desember, Mr Azaat disumpah sebagai pejabat sementara Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta, dan Prawoto Mangkusasmito sebagai wakil Ketua K.N.P. Pada tanggal itu pula ada penyerahan Kedaulatan : di Amsterdam, Penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Di Jakarta Penyerahan kedaulatan Belanda dari Lovink kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil (RIS). Di Yogya Penyerahan kedaulatan Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat.³⁹

B. Reaksi Terhadap Negara RIS

Berbagai reaksi muncul atas berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Bangsa Indonesia terbagi menjadi

³⁸ Moh Hatta, op.cit., hlm. 561.

³⁹ Notosoetardjo, op.cit., hlm. 54.

dua kubu, yaitu golongan pro atau setuju dengan berdirinya RIS yang sering disebut pula sebagai golongan federalis. Golongan kedua yaitu golongan kontra terhadap RIS dan menghendaki kembali ke negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering disebut sebagai golongan unitaris.

Hanya dalam waktu 6 minggu nasib RIS sebagai yang ditentukan oleh KMB tidak diganggu gugat. Sesudah itu maka suara-suara yang menghendaki kembali NKRI timbul dan makin lama makin santer.

Banyak peninjau asing menganggap perubahan ke NKRI sebagai suatu hal yang tidak perlu tergesa-gesa. Tetapi menurut Prof. Kahin dari Amerika (yang sangat bersimpati kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia) kembalinya RIS ke NKRI sebagai suatu hal yang wajar dan sehat. Jika RIS dibiarkan hidup terus secara politis dan sosial-psikologis bisa menimbulkan keadaan yang tidak sehat. Bangsa Indonesia menilai bentuk federasi sebagai warisan penjajah yang dimaksud untuk dapat mempertahankan pengaruhnya di Indonesia. Bahkan federasi adalah cara yang ditempuh Belanda untuk merintangikan perjuangan kemerdekaan. Di samping itu mempertahankan RIS berarti pula mempertahankan posisi banyak orang Indonesia pro-Belanda yang hanya mementingkan kepentingan sendiri serta tidak mendapat dukungan rakyat.⁴⁰

40 G. Moedjanto, M.A., Indonesia Abad ke 20, Jilid II, 1988, Pn. Kanisius, Yogyakarta, hlm. 69.

Presiden RIS (Ir. Soekarno) merupakan salah satu orang yang tidak senang Indonesia menjadi negara federal. Pandangan beliau ini sudah ada jauh sebelum KMB dilaksanakan. Hal itu nampak seperti pernyataan beliau sehabis penandatanganan persetujuan Linggarjati, beliau mengatakan bahwa

Saat inilah pokok pangkal timbul guntur dan taufan. Sesungguhnya peringatan akan hujan petir masih menyala-nyala di dalam dada setiap orang, akan tetapi oleh karena kami sangat memerlukan waktu untuk bernapas kuterimalah gagasan Negara Indonesia Serikat sebagai taktik untuk beberapa waktu. Aku menyadari bahwa perundingan tawar-menawar ini akhirnya akan memakan habis masa yang reda dari adu kekuatan ini dan mengembalikan kami kepada cita-cita dasar, yaitu satu republik yang berdaulat, mereka penuh dan berbentuk negara kesatuan.

Dan ia katakan pula Belanda terlalu banyak memasang perangkat sehingga akan tidak mungkin memegang ucapan-ucapan mereka.⁴¹

Dalam KMB penyesuaian diri kepada Hollands denkeu ini disyahkan dengan jalan penyusunan UUD yang baru. Nah, begitulah jadinya kami tertipu. Begitu pula, ketika mereka mengusulkan sistem multi partai yang liberal, kami pun menganggukkan kepala.⁴²

Di daerah luar Jawa ketidakpuasan juga muncul di kalangan rakyat dan organisasi politik. Di NTT khususnya, di daerah Maluku. Dalam bulan Nopember 1949, parlemen NTT menerima persetujuan KMB. Tetapi GAPKI, gerakan gabungan politik Maluku masih menganggapnya sebagai suatu penyelesaian sementara.⁴³

⁴¹ Cindy, Adams, *op. cit.* hlm 360.

⁴² *Ibid.*, hlm. 393.

⁴³ John. A. Pattikayhatu, *op. cit.* hlm. 59.

Walaupun menurut konstitusi RIS kedudukan Hatta sebagai Perdana Menteri lebih dominan daripada Sukarno, Tetapi Sukarno mempunyai prestise dan daya tarik yang kuat dimata rakyat daripada kepada Hatta. Sebagai gambaran pada akhir tahun 1949 popularitas Sukarno sangat menonjol, orang-orang kota dan desa di wilayah BFO dan Republik dengan bangga memasang gambarnya di dinding rumah mereka dan banyak orang menyanjung di mana ia pergi mengadakan kunjungan.⁴⁴ Di dalam pandangan dari presiden Sukarno bentuk federasi mendorong timbulnya sifat regionalisme. Dalam kunjungannya ke berbagai daerah pada tahun 1950 ia disambut dengan gelombang perasaan nasionalisme yang luar biasa, bagi Sukarno pada pokoknya ia menginginkan pembubaran Negara RIS. (39)

Dilihat dari lintasan sejarah, maka dapat dikatakan Sukaarno melakukan suatu manuver politik. Suatu hal yang tidak dapat diingkari bahwa pada dasarnya Sukarno juga ikut mendukung berdirinya negara Republik Indonesia Serikat (RIS), hal ini nampak dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1948. Sukarno nampak mendukung kebijaksanaan Hatta; Sukarno mengatakan, bahwa:

Peretujuan Renville tidak lebih daripada dasar untuk menyelesaikan soal Indonesia, yang menjadi persengketaan antara kita dengan Belanda. Penyelenggaraan persetujuan Renville itu tak lain melainkan meratakan jalan untuk mencapai selekas-

⁴⁴ Herbert Feirt, The Decline of Constitutional Democracy In Indonesia, Itaca, Cornell University, New York, 1962, hlm. 51.

lekasnya terbentuknya negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dari mulai sekarang titik berat perjuangan kita harus dialihkan dari mempertahankan Republik semata-mata kepada pembentukan Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat yang menjadi cita-cita dan tujuan bangsa kita selama ini.⁴⁵

Reaksi pro dan kontra terhadap RIS terjadi pula di daerah NIT. Hanya golongan Republikein yang merasa tidak puas terhadap lahirnya RIS, sehingga timbullah 2 kelompok di wilayah NIT yaitu, aliran Unitaris yang menghendaki bubatnya NIT dan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Proklamasi 17 Agustus 1945. Sementara lainnya aliran federalis, ingin RIS tetap hidup, begitu pula NIT.⁴⁶

Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak puas dengan bentuk federasi hasil KMB. Ketidakpuasan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk tuntutan agar negara-negara begitu bersatu dengan RI atau RIS dilikuidasi. Pemimpin-pemimpin RI dan orang-orang RI yang duduk di pusat menanggapi keinginan mereka secara positif dan terang-terangan, sehingga keinginan bergabung dengan RI dan melebur RIS menjadi makin keras, terlebih-lebih setelah tentara Belanda ditarik mundur dari negara-negara

⁴⁵ Moch Said, Pedoman Untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat, II, Permata, (Kumpulan Pidato Proklamasi Soekarno), Surabaya, hlm. 1469.

⁴⁶ Bambang Suwondo, dkk., Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah, P&K, Jakarta, 1982. hlm. 129.

bagian dan politisi-politisi di negara-negara bagian yang ditahan karena pro RI dibebaskan.

Kedudukan golongan Pro RIS (federalis) menjadi lebih buruk karena di antara mereka ada yang berlaku jahat terhadap RIS sendiri. Di antara mereka ini terdapat Sultan Hamid dari Kalimantan Barat yang menjabat Menteri Negara. Ia bersekongkol dengan Westerling, pembantai rakyat di Sulawesi Selatan, yang dengan APRanya yang berkekuatan kira-kira 800 tentara, hendak menolong Hamid untuk membunuh Menteri Pertahanan, Sultan Yogyakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian tersebut, Ali Budiharjo dan Kepala Staf Angkatan Perang, Kolonel Simatupang. APRA adalah singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil.

Petualangan Westerling dimulai di Bandung, ibukota negara Pasundan, pada bulan Januari 1950. Tetapi situasi egera dapat dikuasai. Karena itu rakyat Jawa Barat merasa enggan untuk mempertahankan kelangsungan RIS. Rakyat menuntut dibubarkannya pemerintahan Negara Pasundan. Untuk menanggapi keinginan rakyat pemerintah RIS mengeluarkan undang-undang darurat pada 8 Februari. Dengan undang-undang darurat itu pemerintah Pasundan di bawah Wali Negara (Presiden) Wiranatakusumah, harus menyerahkan kekuasaannya kepada Komisaris Negara (RIS), Sewaka.

Apa yang terjadi di Pasundan kemudian diikuti oleh Sumatera Selatan. DPR Sumatera Selatan pada 10 Februari memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah

pusat RIS di Jakarta, . Negara-negara lain kemudian menyusul, tetapi kebanyakan cenderung untuk bergabung dengan RI daripada dengan RIS sendiri.⁴⁷

Tuntutan-tuntutan rakyat membuat negara-negara bagian meleburkan diri bergabung dengan RI. Bersatunya kembali ke RI juga dikarenakan wibawa pemerintah RIS hilang sebab gelombang protes yang besar di masyarakat. Setelah negara-negara bagian melebur diri ke RI, tinggalah tiga negara yang belum bersatu, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur.⁴⁸

Salah satu pendapat yang mendukung kembalinya RIS ke NKRI, antara lain datang dari Mr. Moh Yamin yang tidak berpartai. Beliau seorang yang sangat disegani dan diakui sebagai seorang yang pintar. Dikatakannya keuntungan yang kita dapat dengan hasil KMB adalah kesempatan yang kita dapat untuk membentuk suatu natie Indonesia.

Membicarakan bentuk negara apakah menurut paham federalisme atau unitarisme, Yamin mengatakan, bahwa federalisme adalah mahal biayanya, sedangkan untuk itu harus banyak kita pakai zijne excellenties yang di Nederland, kini harganya sudah gedevaluerd. Yamin berkata

⁴⁷ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 70.

⁴⁸ Joeniarto, S.H., Sejarah Ketatanegaraan RI, Pn. Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 70.

bahwa unitarisme sangat murah biayanya. Ia menganjurkan supaya kita memilih Unitarisme dalam menyusun negara kita.

Mengenai konstitusi Yamin mengatakan bahwa kita hanya dengan tiga konstitusi saja kelak, guna mencapai tujuan kita selaras dengan proklamasi Indonesia merdeka, sedang untuk itu berbagai negara lainnya seperti Inggris, Perancis menggunakan lebih banyak konstitusi.

Akhirnya Yamin berkata;

Akhirnya saya percaya, bahwa RIS adalah alat rakyat untuk berjuang melaksanakan cita-cita, dan proklamasi kita pada tahun 1945.⁴⁹

Kecaman-kecaman terhadap hasil KMB dan pembentukan "Republik Indonesia Serikat", hadir di mana-mana, khususnya mereka yang selama ini bekerja di lingkungan Negara Republik Indonesia (RI). Sejak bulan Desember 1949 kaum Republikan merasa sangat khawatir, karena banyaknya negara bagian yang muncul. Sejak sebelum KMB mencapai persetujuan, kaum Republikan telah bertekad bulat menghancurkan sistem federalisme yang telah terbentuk di Indonesia. Namun niat mereka itu, mereka tutup-tutupi, kekhawatiran pokok mereka adalah khawatir bila sistem federal akan lama sekali untuk dihancurkan dan kembali ke

⁴⁹ Surat Kabar, ~~Menara~~, Jl. Schutterij, Manadt, Pn. Yayasan Menara, Makasar, tanggal 17 Desember 1949. hlm. 2.

"Negara Kesatuan", seperti waktu proklamasi 17 Agustus 1945.⁵⁰

Peluang untuk memulai perjuangannya, akhirnya didapat oleh kelompok Republikan di Jawa. Suatu peristiwa di Bandung yang memakan banyak korban dan sangat memukul bangsa Indonesia, telah memberi angin segar bagi kaum Republikan guna menarik simpati rakyat, menggerakkan massa rakyat, guna mengikuti pandangan kaum Republikan, untuk kembali ke negara kesatuan sesuai proklamasi 17 Agustus 1945.

Pasukan APRA pimpinan Westerling mulai menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya, pada tanggal 23 Januari 1950, dengan kekuatan 500 orang menyerang dan membunuh sekitar 80 orang prajurit reguler di Bandung. Kota itu mereka duduki pula. Keesokan hari satuan-satuan Siliwangi merebut kembali ibukota Pasundan itu, tapi tidak dapat menghancurkan APRA. Hari berikutnya APRA dengan Westerling mengancam Kota Jakarta dan mencoba menangkapi anggota-anggota kabinet federal, membunuh Sultan Hamengku Buwono IX dan Simatupang. Gerakan pasukan APRA dan rencananya di Jakarta dapat digagalkan oleh pasukan Siliwangi yang siaga dipinggir kota. Tak lama pasukan APRA dapat dibuat berantakan oleh pasukan TNI. Pemimpin pasukan APRA (Westerling) dengan mudah menyela-

⁵⁰ Robert Bridson Cribb, Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949, Pn. PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1990, hlm. 196.

matkan diri dan lari dari Indonesia dengan naik pesawat terbang Belanda.⁵¹

Peristiwa di Ibukota negara Pasundan (Bandung) berakibat jauh terhadap kelangsungan hidup negara itu, dan ini berarti awal kemenangan kaum Republikan. Tindakan Westering bersama APRANYA, membuat rakyat marah dan menuntut dibubarkannya negara-negara Jawa Timur dan Pasundan. Didalam DPR juga timbul suara-suara guna dibubarkannya negara Pasundan dan Jawa Timur. Pada tanggal 11 Januari 1950, tuntutan itu mulai dibicarakan oleh pemerintah RIS. Serta Menteri Dalam Negeri mulai menyiapkan rencana Undang-undang pemerintah federal, yang mengatur masalah pembubaran sesuatu negara bagian, seperti yang dimaksudkan pasal 43 dan 44 UUD RIS. Rencana Undang-undang dari Menteri Dalam Negeri itu akan diajukan ke sidang Parlemen RIS yang akan dimulai pada awal bulan Februari.⁵²

Tuntutan pembubaran negara bagian tersebut kemudian diikuti pula oleh negara Madura. Madura lewat DPRnya mengambil keputusan untuk membubarkan negara Madura. Dari Pamekasan telah dikabarkan bahwa dalam raparnya pada

⁵¹ ULF. Sundhaussen, Politik Militer Indonesia, 1945-1967, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 92-93.

⁵² Surat Kabar, Harian Indonesia Bandung, Bandung, Grote- Postweg Oost 53, Post Box No. 165, tanggal 13-11-1950, hlm. 1.

tanggal 10-1-1950, DPR negara Madura telah melangsungkan membentuk suatu panitia untuk segera mengadakan perundingan dengan pemerintah pusat (RIS) buat tercapainya pembubaran negara Madura. Juga hendak mengajukan suatu resolusi mendesak dibentuknya negara Kesatuan Indonesia, seperti waktu proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagai alasan pembubaran negara Madura sebab negara ini sudah nyata tidak dapat membiayai administrasinya sebagai sebuah negara.⁵³

Gerakan menentang sistem federal (pemerintahan RIS) ini juga muncul di daerah luar pulau Jawa. Di daerah Sumatera Selatan, terdengar suaranya, bahwa dalam sidang istimewanya DPRS NSS (Negara Sumatera Selatan) pada tanggal 2 Januari 1950, menerima suatu resolusi hasil sidang dengan suara bulat, sidang memutuskan untuk;

- (1) Menghendaki dibubarkannya Negara Sumatera Selatan (NSS).
- (2) Menolak dimasukkannya daerah-daerah TBA ke dalam NSS.
- (3) Demokratisasi sering di DPRS NSS.
- (4) Bubarkan DPRS NSS.⁵⁴

Hal-hal di atas, merupakan berbagai contoh kongkrit reaksi rakyat dan beberapa pemimpin serta orang terkemuka

⁵³ *Ibid*, tanggal 14-1-1950, hlm. 1.

⁵⁴ Surat Kabar, *Pikiran Rakyat*, Pn. *Pikiran Rakyat Palembang*, Palembang, tanggal 3 Februari 1950, hlm. 1.

di masyarakat, atas berubahnya Indonesia dari suatu negara kesatuan Republik Indonesia, menjadi suatu negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Pergolakan dimasa pemerintahan RIS, merupakan suatu pergolakan pertentangan antara tekad kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tekad ingin Indonesia tetap menjadi negara serikat (RIS) kehendak membubarkan negara-negara bagian, merupakan suatu bukti, mereka menentang sistem federalisme, dan menginginkan kembali ke negara kesatuan.

Kecaman-kecaman terhadap hasil KMB dan pembentukan "Republik Indonesia Serikat", hadir di mana-mana, khususnya mereka yang selama ini bekerja di lingkungan Negara Republik Indonesia (RI). Sejak bulan Desember 1949 kaum Republikan merasa sangat khawatir, karena banyaknya negara-negara bagian yang muncul. Sejak sebelum KMB mencapai persetujuan, kaum Republikan telah bertekad bulat menghancurkan sistem federalisme yang telah terbentuk di Indonesia. Namun niat mereka itu, mereka tutup-tutupi, kekhawatiran pokok mereka adalah khawatir bila sistem federal akan lama sekali untuk dihancurkan dan kembali ke "Negara Kesatuan", seperti waktu proklamasi 17 Agustus 1945.⁵⁵

⁵⁵Robert Bridson Cribb, Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949, Pn. PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1990, hlm. 196.

Peluang untuk memulai perjuangannya, akhirnya didapat oleh kelompok Republikan di Jawa. Suatu peristiwa di Bandung yang memakan banak korban dan sangat memukul bangsa Indonesia, telah memberi angin segar bagi kaum Republikan guna menarik simpati rakyat, menggerakkan massa rakyat, guna mengikuti pandangan kaum Republikan, untuk kembali ke negara kesatuan sesuai proklamasi 17 Agustus 1945.

Akan bom waktu yang pertama yang ditinggalkan oleh Belanda. Kapten Westerling beserta anak buahnya (KNIL) di Bandung memproklamasikan dirinya sebagai "Ratu Adil". Tujuannya adalah mempertahankan sistem federal, serta melindungi orang-orang Sunda terhadap hegemoni Jawa. Westerling membentuk pasukan, "Legium Ratu Adil", yang tan Porang Ratu Adi (APRA) dan minta diakui sebagai kepolisian resmi dari negara ditolak oleh pemerintah pusat (RIS).

Pasukan APRA mulai menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya. APRA dengan pemimpinnya Westerling pada tanggal 23 Januari 1950, dengan kekuatan 500 orang menyerang dan membunuh sekitar 80 orang prajurit reguler di Bandung. Kota itu mereka duduki pula. Keesokan hari satuan-satuan Siliwangi merebut kembali ibukota Pasundan itu, tapi tidak dapat menghancurkan APRA. Hari berikutnya APRA dengan Westerling mengacau Kota Jakarta dan mencoba menangkap anggota-anggota kabinet federal, membunuh

Sultan Hamengku Buwono IX dan Simatupang. Gerakan pasukan APRA dan rencananya di Jakarta dapat digagalkan oleh pasukan Siliwangi yang siaga dipinggir kota. Tak lama pasukan APRA dapat dibuat berantakan oleh pasukan TNI. Pemimpin pasukan APRA (Westerling) dengan mudah menyelamatkan diri dan lari dari Indonesia dengan naik pesawat terbang Belanda.⁵⁶

Peristiwa di Ibukota negara Pasundan (Bandung) berakibat jauh terhadap kelangsungan hidup negara itu, dan ini berarti awal kemenangan kaum Republikan. Tindakan Westering bersama APRANYA, membuat rakyat marah dan menuntut dibubarkannya negara-negara Jawa Timur dan Pasundan. Didalam DPR juga timbul suara-suara guna dibubarkannya negara Pasundan dan Jawa Timur. Pada tanggal 11 Januari 1950, tuntutan itu mulai dibicarakan oleh pemerintah RIS. Serta Menteri Dalam Negeri mulai menyiapkan rencana Undang-undang pemerintah federal, yang mengatur masalah pembubaran sesuatu negara bagian, seperti yang dimaksudkan pasal 43 dan 44 UUD RIS. Rencana Undang-undang dari Menteri Dalam Negeri itu akan diajukan ke sidang Parlemen RIS yang akan dimulai pada awal bulan Februari.⁵⁷

⁵⁶Sundhaussen, Politik Militer Indonesia, 1945-1967, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 92-93.

⁵⁷Media Massa, Harian Indonesia, tanggal 13-11-1950, hlm. 1.

Tuntutan pembubaran negara bagian tersebut, kemudian diikuti pula oleh negara Madura. Madura lewat DPRnya mengambil keputusan untuk membubarkan negara Madura. Dari Pamekasan telah dikabarkan bahwa dalam raparnya pada tanggal 10-1-1950, DPR negara Madura telah membentuk suatu panitia untuk segera mengadakan perundingan dengan pemerintah pusat (RIS) buat tercapainya pembubaran negara Madura. Juga hendak mengajukan suatu resolusi mendesak dibentuknya negara Kesatuan Indonesia, seperti waktu proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagai alasan pembubaran negara Madura sebab negara ini sudah nyata tidak dapat membiayai administrasinya sebagai sebuah negara.⁵⁸

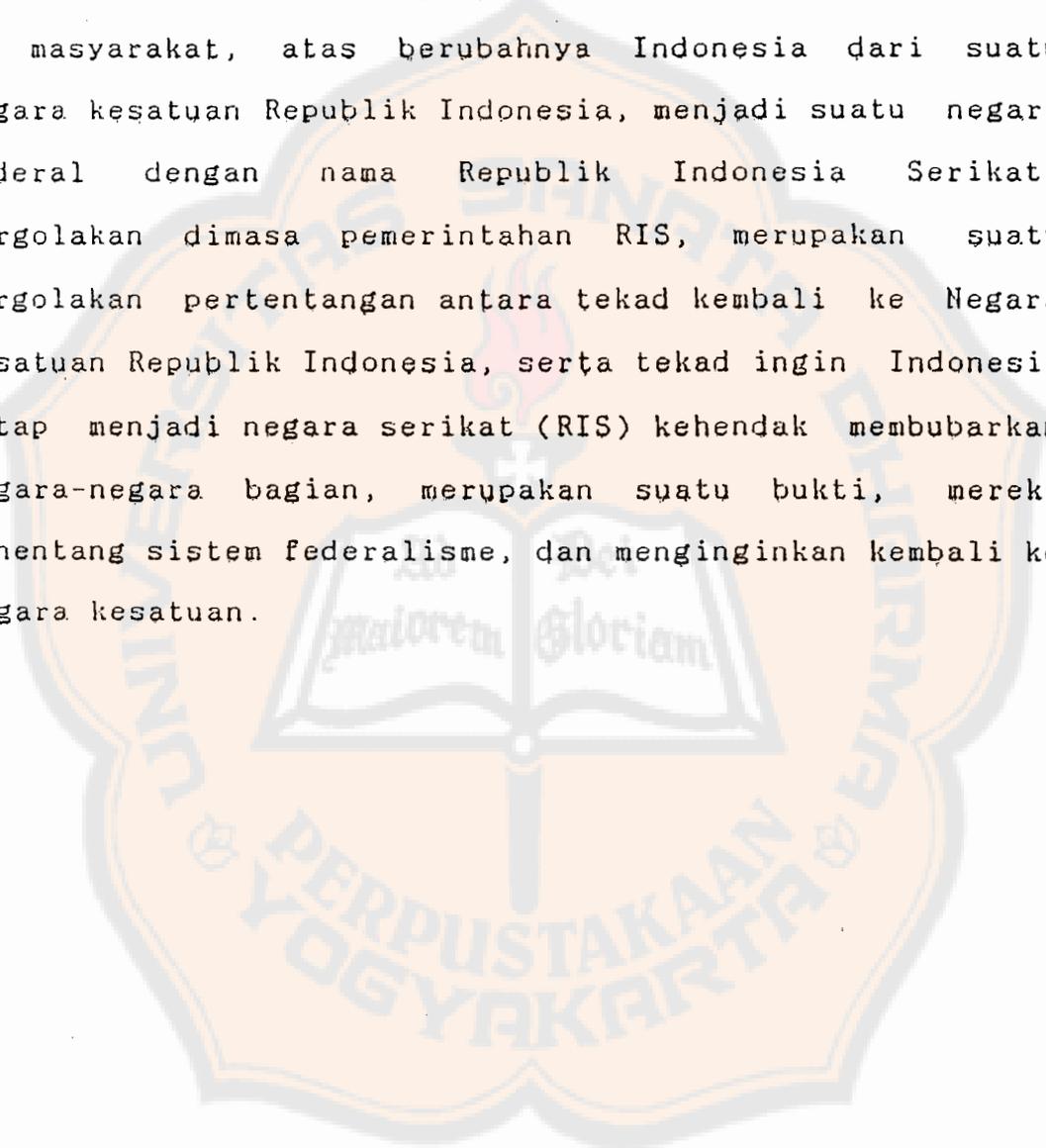
Gerakan menentang sistem federal (pemerintahan RIS) ini juga muncul di daerah luar pulau Jawa. Di daerah Sumatera Selatan, terdengar suaranya, bahwa dalam sidang istimewanya DPRS NSS (Negara Sumatera Selatan) pada tanggal 2 Januari 1950, menerima suatu resolusi hasil sidang dengan suara bulat, sidang memutuskan untuk;

- (1) Menghendaki dibubarkannya Negara Sumatera Selatan (NSS).
- (2) Menolak dimasukkannya daerah-daerah lain ke dalam NSS.
- (3) Demokratisasi sering di DPRS NSS.
- (4) Bubarkan DPRS NSS.⁵⁹

⁵⁸Ibid, tanggal 14-1-1950, hlm. 1.

⁵⁹Media Massa, Pikiran Rakyat, Pn. Pikiran Rakyat Palembang, Palembang, tanggal 3 Februari 1950, hlm. 1.

Hal-hal di atas, merupakan berbagai contoh kongkrit reaksi rakyat dan beberapa pemimpin serta orang terkemuka di masyarakat, atas berubahnya Indonesia dari suatu negara kesatuan Republik Indonesia, menjadi suatu negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Pergolakan dimasa pemerintahan RIS, merupakan suatu pergolakan pertentangan antara tekad kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tekad ingin Indonesia tetap menjadi negara serikat (RIS) kehendak membubarkan negara-negara bagian, merupakan suatu bukti, mereka menentang sistem federalisme, dan menginginkan kembali ke negara kesatuan.



BAB IV

PROSES MENUJU NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

A. Usaha Rakyat NIT Menyatukan Diri

Indonesia pada masa Proklamasi 17 Agustus 1945, hingga masa pemerintahan RIS merupakan suatu masa untuk menghilangkan segala sesuatu yang bersifat kolonialisme (terutama dari penjajahan Belanda). Masa itu disebut sebagai proses dekolonisasi yang berlangsung hingga 15 Agustus 1962, yaitu hari Nieuw Guinea (Irian Barat) menyatakan lepas dari Indonesia atau jadi negara sendiri.⁶⁰

Sebagian besar kelompok-kelompok di Indonesia Timur juga mempunyai anggapan bahwa pengaruh kolonialisme belumlah hilang di Indonesia Timur. Pada tanggal 16 Februari 1950, Front Kesatuan Nasional Indonesia mengadakan rapat umum, yang diadakan di Gedung Flora Manado. Dihadiri oleh anggota Front Kesatuan Nasional Indonesia yang beranggotakan : Barisan Nasional Indonesia, Gerakan Indonesia Merdeka, Partai Syareat Islam Indonesia, Masyumi, Gabungan Pemuda Indonesia, Persatuan Pekerja Indonesia, dan Gabungan Buruh Sulawesi Utara, yang dihadiri oleh 1.200 orang antara lain utusan-utusan dari partai-partai dan perserikatan-perserikatan : Pemakat, Dewan Islam Sangir Talande, Penyelenggara Kebutuhan rakyat, Serikat Buruh Coprafonds dan utusan pres : mimbar buruh, Sepakat, Kemudi, Kebenaran (Gorontalo), Pembela, Sinar Merdeka, Suara P.S.I.I, Pikiran Rakyat, Menara, Sekata, dan Antara.⁶¹

⁶⁰Smit, Dekolonisasi Indonesia, Pustaka Azet, Jakarta, 1986, hlm. 11.

⁶¹Surat Kabar, Menara, op. cit., hlm. 1.

Pertemuan yang dihadiri 11 partai, ditambah 11 media massa (Press) itu mendapat perhatian yang banyak dari rakyat Indonesia Timur. Dalam rapat telah tercapai suatu kesepakatan bulat, yang isinya, yaitu : menimbang,

(1) Bahwa NIT dibentuk oleh Belanda sebagai siasat untuk memblokir RI (2) Bahwa waktu pembentukan NIT itu rakyat tak dibolehkan mendengarkan suaranya dengan bebas, (3) Bahwa menimbang keamanan baik batin maupun lahir akan baru sempurna jika APRIS yang berintikan TNI telah ada di Indonesia Timur. Maka rapat memutuskan mendesak pemerintah NIT, agar :

(1) supaya pemerintah NIT secepat mungkin akan menyerahkan mandatnya kepada RIS supaya secepat mungkin RI kesatuan dapat dibentuk atas dasar kerakyatan.

(2) Secepat mungkin agar supaya sudah ditempatkan di Indonesia Timur umumnya dan Minahasa khususnya, APRIS yang berinti TNI. Dalam penjelasannya menteri penerangan Doko yang ada di Minahasa dengan para pemimpin-pemimpin partai-partai. beliau mengatakan bahwa hal ini sudah tentu saja terserah kepada kehendak rakyat seluruh NIT, jika rakyat memang menghendaki demikian, maka tentang penyerahan mandat kepada RIS, tidak boleh pemerintah NIT sekarang ini mempertahankan kedudukannya.⁶²

Konferensi yang diselenggarakan di Manado tersebut pada bulan Februari, menunjukkan pada kita, sebagian besar rakyat NIT menginginkan terjadinya integrasi negara tersebut kedalam negara RI. Banyaknya peserta yang mewakili berbagai organisasi dan media massa menunjukkan keinginan yang kuat, ditambah dengan dukungan massa rakyat. Pemerintah NIT sendiri dengan diwakili menteri

⁶²Ibid., hlm. 1.



penerangan I.H. Doko denan jelas menegaskan semua tergantung pada kehendak rakyat. Hal itu membuat pertentangan golongan unitaris dan federalis mulai nampak di NIT.

Segala pergolakan politik yang terjadi di Jawa, Madura dan Sumatera, ditambah munculnya APRA dengan Westerling, serta pembubaran beberapa negara bagian seperti Pasundan, telah membuat rakyat NIT menjadi gelisah dan semua penganut golongan republiken, juga di Makasar mulai berani bergolak lebih tegas menuntut NIT dibubarkan. Perkembangan yang dapat mengancam ketertiban dan keamanan umum terasa di Makasar, hingga kabinet Tatengkeng mengambil keputusan melarang adanya demonstrasi dari masing-masing golongan tersebut. Suasana pertikaian ini semakin bergelora menjelang hendak dibukanya sidang DPR NIT.⁶³

Perjuangan menumbangkan NIT juga tumbuh di Sulawesi Utara, yaitu kekuatan-kekuatan pro. RI yang menghendaki timbulnya Negara Kesatuan, seperti BNI, KRIS, dan lain-lain. Di dalam sidang-sidang DPR Minahasa sejak bulan Maret 1948 sampai 1950, senantuiasa mendesak agar dewan bentukan Belanda itu menyatakan diri lepas dari NIT dan bergabung dengan NKRI. Tokoh-tokoh Pro-RI ini antar lain, M.B. Tumbel (juru bicaranya), M. Sondakh, R.M.A. Dahlan, O.F. Pua. Di Sulawesi Utara, di daerah Bolaang mongondow,

⁶³Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 704.

takyat membentuk organisasi politik dan perjuangan, yaitu organisasi-organisasi, seperti :

PSII, PNI, GIM, KERWANI, (Kerukunan Wanita Indonesia), PERGINDO (Persatuan Guru Indonesia), PERPIBOM (Persatuan Pegawai Indonesia Bolaang Mongondow), SERPIBOM (Serikat Buruh Indonesia Bolaang Mongondow), SIAP Kaum Tukang (SIKAT), PPI (Pasukan Pemuda Indonesia), Laskar Rakyat Bolaang Mongondow, SPK (Serikat Pegawai Kesehatan), KPM (Kesatuan Pemuda Masehi), dan sebagainya. Mereka ini melakukan kegiatan memperjuangkan Negara Kesatuan, yang nyata sekali terutama pada tahun 1950 saat untuk melikuidir NIT dan bergabung dengan RI.⁶⁴

Sunda Kecil bagian dari NIT, menurut I.R. Lobo, seorang anggota parlemen RIS yang berasal Sunda Kecil, menjelaskan para kaum progresif maupun yang konservatif. Mereka yang konservatif menghendaki lebih suka tetap negara federal. Kelompok progresif, berpendapat supaya negara bagianya digabungkan dengan RI. Kelompok bertiga yaitu diantara progresif dan konservatif berpandangan, mulai merasakan mahalanya federalisme, dan lebih suka bergabung, tetapi hendaknya penggabungan itu, janganlah merupakan jalan lewat paksaan. Kelompok ketiga ini mempertanyakan bila sudah tergabung dengan RI, apakah alat-alat yang ada di RI sudah cukup guna menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, terutama termasuk pula di Sunda Kecil.⁶⁵

⁶⁴Suwondo, Sulawesi Utara, *op. cit.*, hlm. 190-191.

⁶⁵Kabar, Warta Indonesia, Senen No. 37, Jakarta, 1950, tanggal 20-2-1950, hlm. 1.

Pada tanggal 22-2-1950, di Makasar telah dilantik suatu parlemen baru oleh presiden Sukawati. Kesibukan para anggota nampak jelas, bukan persiapan kerja, namun sibuk mencari-cari teman yang sepaham, mengatur serta menjalankan siasat. Tokoh-tokoh muncul, seperti Bung Henki (H. Rondonuwu) dari partai Kedaulatan Rakyat, dan Bung Lanto (Lanto Dg Pasewang) yang merupakan salah seorang pelopor PNI dimasa Westerling di Sulawesi Selatan yang dulu dibuang di Serui. Mereka itu sibuk mengatur perjuangan para pro-RRI, yang berminat berjuang di parlemen. Dari mereka lahirlah kelompok Fraksi Kesatuan yang nanti merupakan fraksi yang berani membubarkan Negara Indonesia Timur, sebagai "negara". Menurut harian surat kabar Menara, untuk sementara rakyat puas, dengan pergantian parlemen tersebut dan sudah saatnya rakyat menuntut di bubarkannya NIT.⁶⁶

Kelompok-kelompok organisasi yang menginginkan integrasi NIT ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga terdapat di daerah Lombok. Kaum pro-RI, pada awal Maret (8 Maret 1950) yang dipelopori front nasional yang beranggotakan dari PIR (Partai Indonesia raya), Masyumi, Pargindo (Partai Guru Indonesia), dan lain-lain perkumpulan, telah mengajukan suatu resolusi terhadap pemerintah NIT dan RIS yang resolusi itu, berbunyi :

⁶⁶Kabar Menara, *op. cit.*, tanggal 22-2-1950, hlm. 1.

- (1) Mendesak kedatangan APRIS yang berintikan TNI ke NIT
- (2) Pembubaran NIT dan menuntut dibentuknya Negara Kesatuan,
- (3) Serta semua jawatan diserahkan kepada bangsa Indonesia.⁶⁷

Suatu tindakan yang tidak demokratis dan memaksakan pendapat, dengan ancaman senjata api siap meletus, telah dilakukan oleh kaum penganut faham federalisme terhadap para anggota parlemen seorang demi seorang. Hal itu terjadi beberapa hari setelah parlemen baru diresmikan. Pemimpin kabinet Perdana Menteri Diapari sampai sering jatuh sakit, karena berbagai kesulitan di kabinet.

Dari kaum Republikan didesak untuk membubarkan NIT dan leburkan diri dalam Negara Kesatuan RI, sedang dari kaum reaksioner Twapro, (Twaalfde Propinsi) dipimpin oleh Mawikere, Persatuan Timur Besar (PTB) dipimpin oleh Pollupessy 'Lima Serangkai' di Timor dipimpin oleh F.W. macare, yang terang-terang didalangi oleh Belanda dengan KNIL dan kaki tangannya menghendaki pembentukan Negara Indonesia Timur yang merdeka dan berdaulat dalam ikatan Kerajaan 'Groot Nederland'. Anggota-anggota KNIL didalangi oleh Belanda mengadakan tindakan terror dan intimidasi.⁶⁸

Tindakan pemaksaan-pemaksaan, banyak dilakukan oleh anggota KNIL dibantu KL yang dihasut oleh Belanda (kelompok federalis tersebut di atas). Hal itu berakibat banyak anggota parlemen, antara lain yang berasal dari Timor, Sumba, Flores melarikan diri kembali ke tempat asal

⁶⁷Ibid, tanggal 8 Maret 1950, hlm. 1.

⁶⁸I.H. Doko, *op. cit.*, hlm. 240.

masing-masing. Salah satu contoh, pada awal Maret 1950, seorang Serjan Mayor KNIL, suku Ambon berusaha memaksa Menteri Doko (seorang pemimpin parlemen dan anggota pemerintahan) dengan meletakkan senjatanya yang larasnya tepat ditujukan kepada Doko. Ia menuntut agar NIT diproklamasikan menjadi negara merdeka, berdaulat lepas dari RIS, dan ± 60.000 anggota KNIL yang ada di Makasar, Minahasa, Ambon dan Timor, siap berdiri dibelakang pemerintah NIT. Namun pada akhirnya anggota KNIL tersebut dapat disadarkan oleh Doko, yang mengatakan bahwa keinginan rakyat harus disatukan lewat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dan beliau memberi contoh, bahwa baik Twapro, begitu pula PTB dan Lima Serangkai tidak berhasil mendapatkan sebuah kursipun dalam parlemen NIT. Dan mengenai bantuan luar negeri, sehabis perang dunia ke II pada umumnya dunia masih bosan berperang." Dan apa saudara mau jadi "pion" negara asing guna kepentingan mereka ?" Maka Serjan itu minta maaf dan mohon petunjuk apa yang sebaiknya dilakukan KNIL. Supaya masuk ke APRIS-lah yang disarankan oleh Menteri Doko. Dan beberapa hari setelah itu datang wartawan Perancis menemui menteri Doko dirumahnya. Wartawan itu menanyakan, "mengapa NIT tidak berdiri saja menjadi negara sendiri lepas dari RIS ?" Menteri Doko mengatakan bahwa :

Cita-cita rakyat Indonesia sejak dulu dan hingga kini tetap menginginkan Negara Kesatuan, dan berdirinya negara-negara bagian, termasuk NIT hanyalah sebagai alat dan bukan sebagai tujuan

(medium untuk datang kepada pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai Proklamasi). Dan kami dengan sekuat tenaga kami akan terus berusaha mencapai cita-cita perjuangan kami, yaitu membentuk Negara Republik Kesatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke."⁶⁹

Pertentangan antara golongan federalis dan unitaris di Sulawesi Selatan, terutama di Makasar pada awal bulan Maret 1950, semakin berkobar dan gawat. Para kelompok pemuda di jalan-jalan mulai menyatakan sikap mereka menentang terus berdirinya NIT. Mereka menuntut kepada pemerintah NIT untuk diperbolehkan mengadakan demonstrasi secara besar-besaran. Gejolak menuntut pembubaran Negara Indonesia Timur semakin bersemangat. Setelah mendengar pemerintah RIS mengeluarkan suatu undang-undang darurat yang mengatur pembubaran suatu negara bagian, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 1950. Pada akhirnya karena desakan yang keras dari golongan unitaris, maka pemerintah NIT pada tanggal 16 Maret 1950, membatalkan keputusan kabinet Tatengkeng melarang adanya demonstrasi. Kabinet Diapari yang memulai tugasnya pada tanggal 14 Maret 1950 tidak mampu lagi membendung gerakan massa yang ingin demonstrasi. Kaum unitaris kemudian mengadakan demonstrasi secara besar-besaran pada tanggal 17 Maret 1950 di Makasar. Demonstrasi itu diikuti oleh puluhan ribu pemuda dan rakyat yang menuntut Negara Indonesia Timur dibubar-

⁶⁹ Ibid, I.H. Doko, hlm. 241-246.

kan. Serta mengajukan mosi ke Badan Perwakilan Rakyat agar badan tersebut membubarkan Negara Indonesia Timur. Mosi yang dipelopori Fraksi Kesatuan Nasional dan Fraksi Indonesia, dibacakan oleh Lanto Daeng Pasewang (ketua Fraksi Kesatuan Nasional) pada tanggal 22 Maret 1950 di depan rapat Badan Perwakilan rakyat, yang bunyinya antara lain :

"Memperhatikan,
Bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara ciptaan rakyat Indonesia seluruhnya, dan sebagainya.
"Memutuskan,
Mendesak dengan sangat Pemerintah Negara Indonesia Timur supaya Negara Indonesia Timur segera dibubarkan dan digabungkan pada Negara Republik Indonesia.

Pemerintah NIT memberi tanggapan dengan mengeluarkan hasil-hasil pembangunan selama tiga tahun yang dinilai cukup berhasil, sebagai bukti bahwa NIT layak untuk tetap berdiri sebagai negara.⁷⁰

Perjuangan untuk mewujudkan Negara Kesatuan seperti pada waktu proklamasi 17 Agustus 1945 yang secara jelas dan terang-terangan terjadi di daerah Sulawesi Tengah, dimana telah didirikan suatu pemerintahan darurat daerah Republik Indonesia Palu pada tanggal 19 Maret 1950, dan pucuk pimpinan dipimpin oleh Tjatjo Idjazah, sedangkan anggota Dewan Pemerintahan terdiri dari kepala-kepala

⁷⁰Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 714-716.

distrik wilayah Palu. Dengan KNI (Komite Nasional Indonesia) sebagai badan legislatif dan BKR (Badan Keamanan Rakyat) sebagai Dewan pemerintah daerah RI darurat di Palu. Dan sebagai penjaga keamanan, diserahkan kepada pemuda yang bersenjata sebagai APRI darurat yang berjumlah satu batalyon, dan ditempatkan dalam satu markas. Tugas penjaga keamanan pemerintah darurat Republik Indonesia ini, diambil dari anggota polisi NIT atas persetujuan bersama dengan pimpinannya memakai ban lengkap putih bercap PRI (Polisi Republik Indonesia) pada lengan baju dinasya sebelah kiri. Inspektur pembantu Lumowa dan Awandatu sebagai komandannya dan R. Soengkowo sebagai Komandan BKR, dengan wakilnya Hamzah Sanusi. Pemerintahan darurat Republik Indonesia di Palu ini, mempunyai susunan anggota pemerintahan, sebagai berikut (1) Ketua KNI dipegang oleh I Made Geria dan beranggotakan wakil-wakil partai politik dan tenaga ahli dari pemerintah (kepala-kepala jawatan) (2) Kepala staf BKR dipegang M. Djaruddin Abdullah, (3) Keuangan oleh M. Yunus Sanusi, (4) Publikasi oleh Horas Siregar dan M.A. Inca Makka. Dibantu oleh Perwani (Persatuan Wanita Indonesia) yang bertugas pokok di dapur umum (konsumsi buat BKR). Sifat dan corak pemerintahan ini jelas sangat

nasionalis dan bercita-cita membentuk Negara Kesatuan, dengan satu negara, yaitu Republik Indonesia.⁷¹

Sementara diseluruh Negara Indonesia Timur berbagai gerakan untuk menghancurkan negar itu oleh rakyatnya sendiri, suatu sandiwara lucu yang berupa suatu tipu muslihat agar NIT mendirikan negara lepas dari RIS dilakukan oleh Belanda, dengan mencoba memancing emosi orang-orang penting oleh Kolonel Schotburg (seorang pemimpin Angkatan Bersenjata Belanda di Makasar) mengirimkan suatu kawat berita kepada pemerintah NIT pada tanggal 25 Maret 1950 yang isinya bahwa APRIS telah mengirimkan pasukan-pasukan bersenjata yang kuat dengan beberapa kapal pengangkut dari berbagai pelabuhan di Jawa menuju ke NIT.

Berita yang jelas-jelas bermaksud mengadu domba antara NIT dan pemerintah pusat (RIS) tersebut, ternyata berhasil membuat orang-orang NIT kalang kabut dan bingung. Sidang Istimewa diadakan presiden Sukawati tanggal 25 Maret 1950 itu juga. Beberapa orang setuju untuk memproklamasikan NIT jadi negara lepas dari RIS. Akan tetapi karena sikap bijaksana dari menteri Doko dan menteri Dr. D.P. Taihitu maka tindakan tersebut dapat ditunda, bahkan rapat kabinet itu akan diulang lagi, setelah pemerintah NIT mendapatkan informasi berita yang

⁷¹Bambang Suwondo, Sulawesi Tengah. op. cit., hlm. 136-137.

jelas dan benar. Guna mencapai hal tersebut, maka menteri Doko dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan berita yang benar. Setibanya di Jakarta, Doko segera menemui menteri dalam negeri Anak Agung Gde Agung, yang hanya tertawa saja mendengar pertanyaan Doko. Akhirnya setelah Anak Agung, Doko dan Kepala Perwakilan Pemerintah NIT di Jakarta (J. Tahiya), mengecek semua media massa dan setiap pelabuhan dari Tanjung Priok, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Probolinggo, Banyuwangi ternyata tak ada kapal APRIS satupun yang akan pergi ke NIT. Menteri Doko selanjutnya kembali ke Negara Indonesia Timur, disambut para anggota kabinet, dan mereka semua akhirnya sadar, telah ditipu oleh Belanda lewat kolonel Schotburg. Sehingga menetapkan tidak lagi berniat memproklamasikan NIT lepas dari RIS. Peristiwa inipun hanya menjadi bahan tertawaan dan ejekan saja, baik di NIT maupun di RIS. Dan hanya berakibat kelompok unitaris semakin lantang berbicara.⁷²

Perbuatan yang memalukan yang telah dilakukan oleh kelompok federal dengan mencoba menipu pemerintah NIT dan mereka gagal serta mendapat malu, belum membuat nyali (tekad) mereka mengendor. Usaha mereka kemudian mencontoh kaum unitaris yaitu mengadakan demonstrasi besar-besaran. Rencana itu akan dilakukan pada tanggal 26 Maret 1950,

⁷²I.H. Doko, *op. cit.*, hlm. 240-251.

sebagai unjuk rasa, bahwa mereka ingin mempertahankan prinsip federalisme dan tetap berdirinya Negara Indonesia Timur. Kelompok unitaris di kota Makasar dan sekitarnya tidak mau mengambil sikap berdiam diri. Beberapa hari sebelum dan semalam sebelum demonstrasi dilakukan, kelompok unitaris melakukan tindakan teror di Kota Makasar dengan menembakkan senapan mereka beberapa kali di tempat tertentu. Intimidasi juga dilakukan terhadap para tokoh federalis, seperti telah dilemparkan granat didepan rumah anak Massarappi. Melihat keadaan itu, kabinet Diapari mengeluarkan pernyataan kaum federalis dilarang melakukan demonstrasi, sebab dikhawatirkan akan terjadi suatu pertumpahan darah. Pernyataan itu ditaati kelompok federalis, sehingga gagal rencana demonstrasi tersebut.⁷³

Pertentangan antara aliran federalis dan unitaris semakin meruncing setelah kegagalan usaha demonstrasi kaum federal yang dikacaukan dengan insiden bersenjata oleh para penganut unitaris. Di dalam parlemen pertentangan tersebut berpengaruh pula. Hingga untuk sedikit kelompok unitaris yang duduk didalam bangku parlemen, khususnya fraksi kesatuan Nasional pada tanggal 25 Maret 1950 untuk sementara Negara Indonesia Timur. Beberapa hari kemudian kaum federal diwakili fraksi Nasional progresif untuk itu

⁷³Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 722-723.

juga sementara waktu menarik pula mosinya untuk mempertahankan Negara Indonesia Timur.⁷⁴

Berlainan dengan situasi di dalam parlemen. Diluar parlemen keadaan pertentangan kedua golongan tetap meruncing. Rakyat tetap terus menyatakan hasratnya untuk membubarkan Negara Indonesia Timur dengan jalan tetap terus berdemonstrasi, yaitu dengan cara :

Beberapa tempat dipedalaman Sulawesi oleh partai-partai politik dilangsungkan demonstrasi menuntut pembubaran NIT. Demonstrasi itu mendapat sambutan hangat dari rakyat, ternyata jumlah yang turut dalamnya; Pare pare oleh 45.000 orang. Kalopo oleh 104.000 orang, Djeneponmto oleh 50.000 orang, sedang di Limbung oleh 20.000 orang. Dalam demonstrasi-demonstrasi itu yang bermaksud sama, antara lain terdapat semboyan, "Sukawati serahkan mandat kembali kepada RI, bubarkan NIT masuk REpublik Indonesia", dan lain-lain.⁷⁵

Situasi negara yang semakin kacau dan tak menentu, membuat pemerintah NIT memutuskan menyelenggarakan acara pemandangan umum anggota Badan Perwakilan Rakyat, yang diselenggarakan mulaidari tanggal 27 Maret 1950, sampai permulaan bulan April 1950. Didalam acara pemandangan umum yang banyak berbicara adalah kelompok fraksi Kesatuan Nasional. Dalam setiap Pidato pokok pidato selalu diulang-ulang sekitar tuntutan pembubaran, yaitu :

⁷⁴Surat Kabar , Harian Umum tanggal 29 Maret 1950, hlm. 2, kolom 5.

⁷⁵Ibid, hlm. 2, kolom 5.

Tema selalu mendesak agar Negara Indonesia Timur dibubarkan dan digabungkan ke dalam Negara Republik Indonesia, dan oleh karena Kabinet Diapari menentang pendirian tersebut, maka Kabinet Diapari diharap mengundurkan diri oleh karena :

- (1) Susunan kabinet tidak dapat disetujui, sebab tidak berdasarkan kerakyatan.
- (2) Asas politik pemerintah yang federalistis yang bertentangan dengan aliran yang telah berkembang dan menjadi idam-idaman rakyat, yang didambakan untuk membubarkan Negara Indonesia Timur dan menggabungkannya ke dalam negara Republik Indonesia.⁷⁶

Kaum unitaris guna mencapai maksud dan tujuan mereka membubarkan dan menggabungkan NIT kedalam Negara RI, mereka perjuangankan hingga di Jakarta (Pusat pemerintahan RIS). Rombongan pimpinan Andi Gappa telah pergi ke Jakarta menerangkan situasi dan keadaan di NIT dan meminta pemerintah federal (RIS) turut campur dalam membereskan masalah pertentangan dua faham yang terjadi di Negara Indonesia Timur. Andi Gappa menjelaskan bahwa dengan perasaan tanggung jawab sepenuhnya sebagai wakil rakyat yang memperhatikan setiap kepentingan rakyat dan negara, maka Andi Gappa menyatakan bahwa di Negara Indonesia Timur (NIT) elemen feodal dan kolonial masih mempengaruhi masyarakat banyak di NIT. Andi Gappa menambahkan penjelasan bahwa :

Program kabinet bertentangan dengan acara-acara partai-partai politik. Politik beberapa orang disana merupakan bela negara, padahal dikatakan bahwa negara menghormati dasar demokrasi. Manai Sophiaan menambah keterangan Andi Gappa dengan beberapa

⁷⁶Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 724.

kenyataan yang pernah dialami dan disaksikannya sendiri waktu mengadakan perjalanan keliling NIT : NIT tidak mengenal keadaan perang atau bahaya, tetapi disana tidak ada kemerdekaan bersuara, menurut pembicara ketika mengunjungi NIT Polisi Negara menduduki semua gedung pemerintah. Demonstrasi-demonstrasi dilarang dan sebelum mengadakan rapat orang harus minta izin lebih dulu.

Rakyat dan para pemimpin daerah serta partai-partai pergerakan di Sulawesi Tengah turut berjuang menumbangkan Negara Indonesia Timur. Diawal bulan April 1950 para pemimpin pergerakan unitaris di Sulawesi Tengah, seperti Horas Siregar, Ince Makka, M. Dj. Abdullah (orang Biromaru) dan Haji M. Yoto Daeng Pawindu D.S. Mereka berempat menemui raja Palu Tjatjo Idjazah, guna membuat suatu mosi tuntutan dibubarkannya NIT dan diwujudkan suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti waktu proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 2 April 1950 konsep pernyataan selesai dibuat dan akhirnya pada tanggal 3 April 1950, dikirimlah kawat kepada wakil Sulawesi Tengah dalam parlemen NIT di Makasar (Ujung Pandang), berbunyi :

"Imade Geria/Binol DPR Empres hotel Makasar.
Kami partai-partei pergerakan Sulawesi Tengah di Palu koma Tawaeli koma Wani koma Donggala dan Sigi Dolo terdiri dari 29 partai koma memutuskan setuju dan menyokong adanya gerakan embubaran NIT dengan segera dan terbentuknya negara kesatuan RIS titik

⁷⁷ Surat Kabar Harian Umum, op. cit., tanggal 30 Maret 1950, hlm. 1.

hbs. "IPPRI" Palu 3 April 1950 ttd Raming -
Abdullah.⁷⁸

Perjuangan M. Dj. Abdullah, I Made Geria, Raja Palu Tjatjo Idjazah dan kawan-kawan dilanjutkan oleh mereka di tanggal 30 April 1950. Untuk mempercepat pembubaran NIT, di tanggal tersebut diadakan rapat di rumah Tjatjo Idjazah, yang dihadiri oleh unsur pemerintah dan kepolisian, para anggota parlemen NIT wakil dari Sulawesi Tengah dan anggota DPR daerah dan wakil organisasi "Isteri Sedar" Ny. A.H. Siregar. Hasil rapat secara aklamasi menyatakan mendukung dan mempertahankan isi kawat yang pernah dikirim pada tanggal 3 April 1950. Rapat memutuskan mengirim P.A. Raming menemui raja-raja Donggala, Tawaeli, Sigi Dolo, Kulawi, dan Parigi agar mendukung dan ikut berjuang mempertanggungjawabkan isi kawat 3 April 1950. Oleh para tokoh-tokoh itu diputuskan pula agar meminta pemerintah pusat (RIS) secepatnya mengirim pasukan TNI dari Jawa.⁷⁹

Berbagai cara dilakukan rakyat dan kaum unitaris untuk mengalah kaum federal. Usaha yang dilakukan untuk menghancurkan Negara Indonesia Timur, telah dilaksanakan lewat berbagai jalan, baik secara halus (lewat parlemen) maupun kasar dengan suatu kekuatan senjata.

⁷⁸Bambang Suwondo, Sulawesi Tengah, op. cit., hlm. 133.

⁷⁹Ibid, hlm. 133-134.

B. Peranan Pemerintah Pusat dan RI

Republik Indonesia Serikat berdasarkan isi persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar), walaupun di dalamnya RIS mengakui struktur federal yang didirikan oleh Belanda (serta mencakup pula rencana konstitusi RIS), tetapi pengakuan kedaulatan itu suatu pengakuan tidak bersyarat, maka dengan demikian bangsa Indonesia tidak ada yang melarang bila melakukan suatu perubahan struktur dan bentuk negara Indonesia dikemudian hari.⁸⁰

Didalam RIS suatu Panitia Persiapan Nasional telah dibentuk yang beranggotakan wakil-wakil dari Republik dan BFO. Beberapa keputusan diambil oleh panitia tersebut, yaitu Menteri Pertahanan RIS, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, akan bertanggungjawab mengenai masalah-masalah keamanan negara dan bangsa Indonesia. Sri Sultan dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kolonel A.H. Nasution, mengangkat dan menempatkan seorang Komandan Pasukan TNI di setiap negara bagian, guna memangku jabatan sebagai "Gubernur Militer". Untuk keperluan tersebut, Sri Sultan dan Kolonel A.H. Nasution kemudian mengunjungi ibukota ke-15 negara bagian yang ada di Indonesia dan meresmikan berdirinya Gubernur Militer di masing-masing negara bagian. Komandan Pasukan TNI yang

⁸⁰Barbara Sillars Harvey, Pemberontakan Kahar Muzakkar, Dari Tradisi ke DI/TII, Pn. P.T. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1989, hlm. 153.

menjadi Gubernur Militer, memiliki tugas bertanggungjawab atas terpeliharanya keamanan dan ketertiban di negara bagian tersebut. Serta bertugas menerima penyerahan kekuasaan dari pasukan KL dan KNIL yang ada di negara bagian itu. Sesuai dengan persetujuan KMB, maka pasukan-pasukan KL akan dikembalikan ke negeri Belanda. Pasukan KNIL akan ikut pulang ke Belanda atau di demobilisasikan di Indonesia atau mereka dimasukkan sebagai bagian anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).⁸¹

Orang-orang bangsa Indonesia banyak pula yang sangat kecewa pada perubahan bentuk negara yang pada mulanya negara kesatuan, lalu menjadi negara federal (serikat). Dulu hanya ada satu negara bagi bangsa Indonesia, yaitu Republik Indonesia, namun kini menjadi ada 16 negara walaupun berada dalam satu naungan negara federal RIS.

Kelompok yang ingin kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, disebut kaum unitaris. Satu penganut paham unitaris adalah para pemimpin negara Republik Indonesia yang berdomisili di kota Yogyakarta mereka berjuang untuk kembalinya Indonesia menjadi negara "kesatuan". Pada waktu pembentukan program kabinetnya, pada tanggal 21 Januari

⁸¹A.H. Nasution, Sejarah Perjuangan Nasional di bidang Bersenjata, Pn Buku Mega, Jakarta, 1966, hlm. 161-162.

1950, RI memasukkan perjuangan untuk mencapai negara kesatuan menjadi salah satu program kabinetnya. Dengan persetujuan seluruh partai politik, maka RI dengan presidenya Mr. Aşaat, salah satu programnya adalah meneruskan perjuangan untuk mencapai suatu negara "kesatuan" kembali, sesuai proklamasi 17 Agustus 1945, dengan wilayahnya mencakup seluruh kepulauan Indonesia.⁸²

Program kabinet negara Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta itu, tidak hanya dijalankan saja oleh pemerintah RI, tetapi juga oleh rakyat negara RI dan usaha-usaha penyebaran ide-ide peerwujudan negara kesatuan, oleh pemimpin yang sudah punya nama dan berpengaruh, seperti Mr. Moh Yamin dan Syahrir. Pendapat dan ide Syahrir tentang pembentukan negara kesatuan dimuat di dalam harian "Indonesia Bandung", yang antara lain mengatakan bahwa RI hasil proklamasi 17 Agustus 1945, memiliki daya yang lebih kuat dari pada RIs, karena merupakan hasil perjuangan nyata bangsa Indonesia sendiri. Syahrir berpendapat bahwa RI layak untuk dipelihara dan dipertahankan eksistensinya, bahkan harus dikembalikan sebagai pemerintahan tunggal di Indonesia. Mr. Moh Yamin, sendiri berencana akan keliling Indonesia untuk menjelaskan arti dan pentingnya unitarisme. Para

⁸² Surat Kabar, Harian Indonesia, Bandung, hlm. 1, kolom 2.

penganut paham unitaris ini yakin bahwa pada saat ini kekuatan pro-perjuangan pembentukan negara kesatuan baru sedang giat dilaksanakan di mana-mana.⁸³

Pihak pemerintah Republik Indonesia Serikat, golongan pro-unitaris, datang dari presiden RIS sendiri, Ir. Soekarno. Memang tidak secara terang terangan presiden Soekarno menyatakan sikapnya yang menentang terhadap sistem federal (serikat), namun sikap tidak senangnya terhadap sistem federal, sering nampak dalam setiap pidatonya, pidatonya, semenjak tahun 1948 hingga 1950.

Di dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1948, presiden Soekarno, antara lain mengatakan, bahwa :

Pemerintah Republik yang mengenal semangat rakyat dan kesetiaan rakyat kepada republik percaya bahkan lebih dari percaya, mengetahui bahwa jika diadakan plebisit (pemungutan suara) itu, rakyat tidak boleh tidak sebagian besar tentu akan memilih Republik. Tentu tidak mau pula memilih sesuatu negara bikinan atau anjuran Belanda. Kalau masa peralihan yang mestinya berarti peralihan ke NIS yang berdaulat mau dijadikannya masa pengembalian pena. Hindia Belanda yang sedia kala. Lalu tentang bentuknya NIS, kecuali sudah barang tentu tentang soal negara-negara bagian yang tiap-tiap orang, telah mengetahui apa yang dikehendaki Belanda tidak terlalu besar perbedaan faham. Rupanya orang Belanda mengerti juga bahwa soal ini terutaa sekali adalah soal orang Indonesia dan orang Indonesia, bukan soal orang Indonesia dengan orang Belanda.⁸⁴

⁸³Ibid., hlm. 1, kolom 1.

⁸⁴Hoch Said, op.cit. hlm 1466-1474.

Federalisme pada awal sejarahnya memang Belanda yang membentuk terutama Negara Indonesia Timur. Negara itu didirikan dengan terbunuhnya 40.000 Jiwa rakyat Sulawesi Selatan (Makasar). Belanda saat itu, algojonya bernama Westerling seorang Belanda, pemimpin pasukan Belanda di Makasar. Ia telah memerintahkan menyiksa sekejam-kejamnya rakyat Sulawesi Selatan dan membunuh mereka satu persatu secara perlahan-lahan (dengan siksaan terlebih dulu). Tindakan yang sudah diluar kewajaran itu (bisa disamakan tindakan binatang) tidak lain adalah guna memadamkan semangat perlawanan rakyat dan kaum gerilyawan melawan Belanda (Guna memadamkan semangat untuk merdeka berdiri di atas kaki sendiri). Untuk tujuan itu Westerling melakukan perbuatan di luar batas kemanusiaan, Syamsudin Lubis dalam bukunya "Sulawesi Selatan", menjelaskan, bahwa :

Tidak ada yang mencegah penyembelihan besar yang dilakukan Westerling, sebelum berdiri Negara Indonesia Timur. Melihat perkembangan keadaan di Sulawesi itu dapat pula dikatakan, bahwa Belanda sengaja melakukan kekejaman luar biasa itu untuk menakutkan rakyat dan membunuh perlawanannya guna menegakkan negara boneka Indonesia Timur di atasnya. Pengorbanan itu tak luput dari analisa bahwa mereka mati karena adanya revolusi dan N.I.T.⁸⁵

Peristiwa-peristiwa pembantaian, agresi militer I, II dan setiap perundingan yang gagal atau selalu

⁸⁵ Syamsudin Lubis, Sulawesi Selatan, Pn. Analisa, Jakarta, 1954, hlm. 95-98.

diingkari oleh pihak Belanda membuat para tokoh-tokoh dan pemimpin nasional seperti Bung Karno, Moh Yamin, Syahrir tidak percaya bahwa penjajah (Belanda) akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan Indonesia. Federalisme merupakan elemen dan sesuatu hasil ciptaan penjajah (Belanda) dan dari awal memang bukan cita-cita dari para pemimpin nasional kita, seperti: Ir. Soekarno, Hatta, Soebardjo, dan lain-lain (terutama mereka yang ikut berjasa terselenggaranya proklamasi 17 Agustus 1945).

Seorang yang ikut berusaha menggulingkan sistem federalisme adalah, Ir. Soekarno presiden RIS sendiri. Soekarno dalam salah satu pidatonya pada tanggal 1 Agustus 1948, mengatakan, bahwa :

Pandangan kami terhadap negara-negara di luar Republik tidak berubah. Kami tetap berpegangan kepada falsafah III Linggarjati, bahwa RIS akan terdiri atas tiga negara, yaitu Republik, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Saudara-saudara di Kalimantan dan Indonesia Timur itu tetap kita pandang sebagai saudara-saudara sebangsa. Namun begitu, saya minta perhatian dari saudara-saudara di luar Republik itu, supaya mengerti benar-benar akan duduknya perjuangan kami ini. Kami mempertahankan republik, kami berjuang mati-matian untuk memelihara kedudukan Republik itu, ... sebenarnya bukan semata-mata mempertahankan republik-an sich. Akan tetapi perjuangan kami mempertahankan Republik itu berarti memperjuangkan modal perjuangannya seluruh bangsa Indonesia, mempertahankan suatu pokok jaminan bagi pelaksanaan Negara Nasional Indonesia, Rumah pengayoman bagi seluruh bangsa Indonesia yang 70.000.000. Republik adalah penjelmaan, perwujudan, konkretisasi dari cita-cita kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia, Republik ibarat pemegang amanat atas modal tersebut tetapi kewajiban memeliharanya sebagai modal perjuangan, terletaklah diatas pundak seluruh bangsa Indonesia. Tidak saja terletak di atas pundak rakyat di Jawa, Sumatera, dan Madura tetapi juga terletak di atas pundak mereka, hai

saudara-saudara di Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Sunda-kecil, Maluku dan Irian !. Marilah kita mempertahankan Republik ini bersama-sama ! Kita tidak mempertahankan Republik ini untuk Republik. Kita mempertahankan Republik ini sebagai milik bersama, sebagai modal bersama, sebagai alat bersama untuk menegakkan, "Rumah kemerdekaan dan kejayaan seluruh Nusa dan Bangsa, ... sebagai benteng bersama dari perjuangan besar seluruh Indonesia !".⁸⁶

Berdasarkan pidato itu, amatlah jelas sekali Presiden Republik Indonesia Serikat, menghendaki pemerintahan yang ia pimpin sendiri harus dikarenakan dan diganti dengan republik seperti yang telah ia proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam salah satu pidatonya yang lain pada tanggal 17 Agustus 1949, beberapa bulan sebelum RIS terbentuk (4 bulan sebelumnya), presiden Soekarno mengatakan bahwa :

Revolusi Nasional kita belum selesai, jauh belum selesai. Revolusi Nasional kita itu harus kita teruskan, sedang kita teruskan, akan kita teruskan sampai jauh sesudah berdirinya RIS Revolusi Nasional itu harus kita teruskan ! Politik memecah belah yang dimulai Van Mook semenjak 1946 untuk memisahkan Republik dari pemuka-pemuka bangsa Indonesia di luar darah Republik, mencapailah salah satu kulminasinya dengan berupa konferensi Bandung. Dualismenya politik Belanda pada waktu itu sungguh berjalan di segala lapangan mereka mengadakan dua perundingan ! satu dengan Republik satu lagi dengan pemuka-pemuka di luar Republik. Semenjak itu timbullah itu dua istilah yang dipergunakan untuk memisahkan kita antara kita istilah "Republik" dan istilah "Federalisme". Tak dapat kita menamakan Politik semacam ini selain daripada politik dualistis. Politik berunding sambil mencoba memperlemah kedudukan lawan berunding, di atas lapangan politik, di atas lapangan ekonomis, di atas lapangan militer !.

⁸⁶Said, *op. cit.*, hlm. 1486-1487.

Maka masuklah kita ke dalam satu halaman sejarah, yang amat sedih bagi Republik. Hatiku masih gemetar, kalau saja ingat halaman itu. Sebab, apa yang hendak saya ceritakan adalah ceritanya suatu negara yang hampir-hampir saja tenggelam, karena merobek-robek adanya sendiri. Dan blokade ekonomi yang laksana lilitan ular makin lapan, makin menyekek leher Republik itu, makin lama makin menyekarkan perekonomian rakyat. Aduhai Negara kita terkena cobaan berat. Ia kena cobaan bencana. Dadaku sesak kalau aku ingat melapetaka yang diperbuat oleh bangsaku sendiri ini. Keluar, Republik menghadapi kepungan politis, sepuah ekonomis, kepungan militer. Ke dalam menghadapi bencana perang saudara. Rakyat Republik, Republikeinnen ! Senantiasa peganglah sebagai bundelan hatimu, bahwa kamu mempunyai kewajiban tetap dalam memelopori perjuangan kemerdekaan kita sekarang dan dalam faase yang baharu nanti. Ingatlah bahwa kamu kamulah yang melopori proklamasi kemerdekaan ini, dan bahwa kamulah telah bersumpah di dalam hati untuk melaksanakan isi proklamasi itu.

Kita belum hidup di dalam sinar bulan yang purnama, kita masih hidup di masa pancaroba, tetaplah bersemangat elang-radjawali !. Ya sesudah RIS nanti tercapai tetaplah semangat elang-rajawali.⁸⁷

Presiden Soekarno tidak hanya memberi pendapatnya mengenai ketidaksesuaian beliau pada sistem federal (RIS), namun dalam pidatonya ia menyuruh agar rakyat dan para pemimpin Indonesia lainnya menghancurkan sistem federal (membubarkan RIS). Dalam bukunya, Mavis Rose, antara lain mengatakan bahwa Soekarno di tahun 1950. Sangat kecewa sekali dengan bentuk Republik Indonesia Serikat. Mavis Rose dalam "Biografinya Moh Hatta", mengatakan :

Soekarno dengan kepercayaan diri, ia menyarankan untuk kembali ke bentuk pemerintah kesatuan.

⁸⁷ Ibid., hlm. 1500-1515.

Federalisme dalam pandangan Soekarno merupakan sesuatu yang mendorong terjadinya regionalisme. Pernyataan presiden Soekarno ini, selalu menjadi fokus pembicaraannya di dalam pidato-pidato Soekarno selama tahun 1950, ketika ia berkeliling ke berbagai daerah di luar Jawa, di mana ia disambut dengan penuh semangat dalam gelombang suasana nasionalistis. Dengan demikian Soekarno secara aktif berkampanye untuk menghancurkan RIS.⁸⁸

Demikianlah bukan hanya pemerintah Republik Indonesia (suatu negara yang ada di Yogyakarta) saja, yang mempunyai program menghancurkan RIS. Tetapi orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan RIS yang berjiwa "republikan" seperti Soekarno berusaha membubarkan Negara RIS. Para republikan (golongan unitaris) merasa sekali bahwa bentuk maupun konstitusi federalis itu hanya akan menimbulkan perpecahan. Bukan saja semata-mata golongan etnis Jawa, tetapi non-etnis Jawa juga mulai merasakan perpecahan akibat sistem federalis. Banyak pemimpin republikan di Jawa dan luar Jawa, terutama Soekarno dan Sultan Hamengkubuwono IX (Menteri Pertahanan Keamanan RIS), sudah mempunyai tekad kuat sejak awal KMB guna secepat mungkin menghapuskan sistem federal dan kembali ke "negara kesatuan".⁸⁹

Akibat dari tindakan Westerling pada bulan Januari 1950, maka pemerintah Hatta (federal) mengambil tindakan

⁸⁸Mavis Rose, Indonesia Merdeka, Biografi Politik Moh. Hatta, Pn. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 289.

⁸⁹ULF. Sundhaussen, op. cit., hlm. 91.

negara Pasundan diletakkan di bawah kekuasaan langsung pemerintah pusat pada tanggal 30 Januari 1950. Dan untuk menangkal agar tidak terjadi suatu kekacauan yang sama dengan di negara Pasundan, maka pada tanggal 10 Januari 1950 sesudah peristiwa Westerling, pemerintah Hatta mengeluarkan suatu peraturan baru dan Menteri Dalam Negeri Anak Agung Gde Agung diperintahkan menjalankan kebijaksanaan kabinet Hatta, yang aturan itu menegakkan, bahwa pemerintah berhak menempatkan negara-negara bagian langsung di bawah kekuasaan dari pemerintah federal yaitu menempatkan seorang komisaris pemerintah. Dalam peraturan itu tidaklah berarti pemerintah telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar Sementara RIS, akan tetapi sebab negara, mengatasi kesulitan Politik yang timbul, sehingga pemerintah federal berhak mengambil tindakan darurat guna menghindari terjadinya kerusuhan dan kekacauan di negara-negara bagian, terutama yang sampai membahayakan eksistensi pemerintah pusat (RIS).⁹⁰

Berpegang pada kebijaksanaan kabinet Hatta itu, maka berturut-turut, pemerintah federal dapat membubarkan beberapa negara-negara bagian. Pertama kali negara Pasundan pada tanggal 30 Januari 1950 di bubarkan, meski rakyat dan beberapa orang pemimpin negara Pasundan memang ingin Pasundan dibubarkan, namun peraturan pemerintah pada tanggal 10 Pebruari akan semakin memperkuat bahwa

⁹⁰Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 701-702.



negara itu layak untuk dibubarkan. Selanjutnya menyusul negara Jawa Tengah, negara Jawa Timur, dan Madura. Puncaknya pada tanggal 10 Februari 1950, negara Sumatera Selatan juga dibuat di bawah pemerintah federal secara langsung.⁸¹

Pemerintah federal (RIS) selalu mendukung perbuatan dan kehendak kaum unitaris. Anggota parlemen RIS, Mr. Moh Yamin dalam menyoroti perkembangan di dalam parlemen RIS, terutama tentang usulan rancangan Undang-undang federal guna menggabungkan daerah-daerah, mengenai soal tata caranya. Yamin memberikan komentar bahwa dengan tindakan seperti itu maka dalam tahun ini juga suatu "negara kesatuan" akan terbentuk kembali, terutama bila sudah banyak negara bagian digabungkan ke pusat. Negara kesatuan itu pada saat ini oleh rakyat Indonesia sudah diimpikan untuk terwujud dan rakyat sedang bergerak untuk mewujudkannya dan sekarang sudah nyata-nyata nampak kehendak rakyat tersebut. Mengenai masalah penggabungan daerah-daerah dengan Republik Indonesia di Yogyakarta, Mr. Moh Yamin, dengan tegas menerangkan, bahwa :

Menurut peninjauan selama ini, terang di daerah Jawa, Sumatera, Madura dan Kalimantan umumnya rakyat menghendaki bergabung pada Republik. Ini kemudian akan disusul pula oleh rakyat Indonesia Timur, yang menurut Yamin sekarang ini mereka sudah menghendaki

⁸¹Ibid, hlm. 701.

bergabung dengan Republik, tetapi sampai sekarang pernyataan itu belum tegas, karena tekanan kaum reaksioner.⁹²

Kekuatan yang memiliki pengaruh besar pada masa demokrasi liberal (masa RIS) yaitu yang bersumber dari presiden Soekarno dan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Mereka merupakan kelompok yang serangannya terhadap sistem demokrasi liberal paling langsung dan efektif. TNI selalu mencurigai sipil secara umum dan memandang rendah terhadap kelemahannya dan ketidak cakapan pemerintah sipil. TNI sebagai badan yang lahir dalam masa revolusi bersenjata, membuat TNI sangat menekankan pendekatan dan keakraban dengan rakyat, terutama masa "agresi militer Belanda I dan II". Namun TNI punya pula problem-problem sendiri yang meningkat sehabis "Pengakuan kedaulatan," beberapa problem TNI adalah :

Dalam tubuh TNI terdapat masalah persaingan perseorangan, perpecahan ideologi, dan ketegangan-ketegangan antara pusat dan daerah, serta dalam membangun tentara Indonesia.⁹³

Selain masalah sistem dan bentuk pemerintahan yang masih merupakan problema yang harus dipecahkan. Di dalam ketentaraan nasional menghadapi pula berbagai masalah

⁹² Surat Kabar , Tanah Air, V. Hogendorpsir, No. 12, Semarang, hlm. 1.

⁹³ Barbara Sillans Harvey, PERMESTA Pemberontakan Setengah Hati, Pn. PT. Grafika Press, Jakarta, 1984, hlm. 19.

yang harus segera diselesaikan. Inti angkatan bersenjata Indonesia adalah TNI, yang meliputi ketiga angkatan dan Polri. Kenyataan yang terjadi di awal tahun 1950, angkatan bersenjata Indonesia memiliki anggota terlalu banyak untuk angkatan daratnya yaitu sekitar 500.000 orang, yang semua itu hanya terdiri dari keatuan. Kesatuan infantri, Arteri, kavaleri, dan kesatuan-kesatuan bantuan tempur lainnya tidak ada. Akibatnya di Indonesia, tidak ada industri pembuatan senjata sama sekali, kecuali sebuah pabrik senjata ringan di Bandung yang sudah tua. Angkatan Laut dan Angkatan Udara nyaris tidak memiliki peralatan sama sekali, sebagai contoh walaupun kedua angkatan telah dibentuk di masa perang kemerdekaan, namun begitu kita masuk dalam kancah perang sesungguhnya, praktis mereka tidak berperan selayaknya sesuai angkatannya. Permasalahan ini ditambah menakutkan sebab dunia terbagi antara dua blok yaitu "blok barat dan blok timur", sementara Indonesia mengambil sikap netral, maka bila ada serangan dari negara lain, praktis tidak akan ada yang membantu Indonesia. Persoalan ditambah membengkaknya veteran perang yang sebenarnya tidak memiliki ketrampilan sebagai tentara, hanya tahu lewat pengalaman perang gerilya saja, yang veteran tua perlu pula di beri uang pensiun. Banyak prajurit menolak untuk didemobilisasikan dari dinas ketentaraan, sebab banyak

mereka usia masih mudah sehingga tidak punya pekerjaan lain, selain hanya sebagai prajurit. Mereka tidak mau sebab derajat sosial menjadi prajurit lebih tinggi dari pada menjadi petani. Masalah itu semakin diperberat dengan hasil persetujuan KMB, bahwa KNIL harus sebagian ditampung menjadi pasukan APRIS. Orang-orang prajurit TNI yang jumlahnya sudah banyak jelas merasa tidak senang sebab mengurangi peluang mereka tetap menjadi tentara. Dan orang-orang TNI merasa tidak senang bahu-membahu dengan atau bahkan ditempatkan di bawah, orang-orang yang mereka anggap sebagai pengkhianat perjuangan kemerdekaan Indonesia, apalagi KNIL memang sautu pasukan milik Belanda pada mulanya.⁹⁴

Pemerintah Perdana Menteri Hatta pada masa RIS memang memikul banyak masalah dari bentuk negara, pemerintahan, angkatan perang. Situasi tersebut diperburuk dengan keadaan perekonomian negara yang benar-benar nol besar, dalam arti tidak ada sedikitpun modal guna membangun negara, semula hancur di masa perang kemerdekaan, khusus saat agresi militer Belanda I dan III. Kesejahteraan rakyat menurut, kekurangan pangan muncul di sana sini. Situasi dan kondisi itu nyata dalam pernyataan presiden Soekarno, bahwa banyak harta, nyawa hilang bahkan, "Bangsa Indonesia di saat ini sedang

⁹⁴U.L.F. Sundhaussen, *op. cit.*, hlm. 99-103.

merobek-robek dadanya sendiri", dalam pidatonya di tahun 1949 hari kemerdekaan Indonesia (17 Agustus).

Kebijakan pemerintah pusat (RIS) pada tanggal 29 Februari 1950, sangatlah membantu perjuangan kaum unitaris. Beberapa isi kebijaksanaan itu adalah :

- (1) Untuk menentukan status tetap salah satu bagian RIS dalam hubungan federasi, keputusan rakyat yang diperoleh dengan jalan demokrasi merupakan syarat mutlak.
- (2) Prakarsa untuk mewujudkan perubahan status dapat diambil oleh daerah-daerah bagian oleh pemerintah pusat dengan ketentuan bahwa keputusan pada tingkat terakhir harus ditentukan oleh rakyat yang bersangkutan lewat jalan plebisit.
- (3) Di daerah yang ada DPR, maka keputusan diambil oleh suatu Dewan yang dipilih khusus untuk keperluan itu.
- (4) Rencana Undang-undang ini memberi ke empatan bagi Dewan-Dewan yang akan dibentuk untuk memilih antara, masuk dalam daerah kekuasaan negara bagian Republik Indonesia atau berdiri di bawah kekuasaan pemerintahan pusat (RIS).⁹⁵

Rancangan Undang-undang itu mempermudah suatu negara bagian untuk membubarkan diri dan bergabung ke RI Yogya. Dari isi-isi tiap undang-undang jelas sekali nampak pemerintah Hatta (pusat) merestui pembubaran suatu negara bagian tersebut. Bahkan kalau memang rakyat yang menghendaki yang terlihat dari tuntutan rakyat baik lewat DPR atau plebisit, demonstrasi, maka negara federal (pusat) memiliki pula kekuasaan, hak untuk

⁹⁵Ide Anak Agung Gde Agung, *Op. cit.*, hlm. 702-703.

membubarkan negara bagian yang bersangkutan. Pengeluaran undang-undang ini merupakan suatu langkah maju bagi kaum unitaris bila ada kaum unitaris yang menentang undang-undang ini, maka itu hanyalah suatu manuver politik guna menyempurnakan undang-undang agar lebih mempermudah dalam pembubaran negara bagian. Hal ini nampak, yaitu setelah undang-undang dikeluarkan, kaum unitaris justru menentang undang-undang, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut prosedurnya terlalu berbelit-belit, sehingga setiap kekacauan yang timbul akan sulit di atasi pemerintah, maka tidak setuju bila suatu daerah bagian ditempatkan langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat (federal). Penentang ini berasal dari anggota-anggota parlemen dan pemerintah Republik Indonesia sendiri di Yogyakarta. RI Yogyakarta, sebenarnya dalam sikapnya ini punya alasan lain, yaitu :

Suatu alasan yang tidak diumumkan, alasan itu bahwa mereka berpendirian agar daerah-daerah bagian itu diberi kesempatan untuk masuk ke dalam daerah kekuasaan Republik Indonesia dan dengan begitu Republik Indonesia Serikat akan bubar dengan sendirinya, dan akan berakhir pula pertentangan antara penganut federalisme dan unitarisme (kesatuan) dengan berdirinya lagi, "Negara Kesatuan Republik Indonesia".⁹⁶

Usaha-usaha manuver politik dilakukan pemerintah RI di Yogyakarta dengan memanfaatkan berbagai keadaan dan

⁹⁶Ibid, hlm. 703.

kondisi yang ada guna mencapai posisi yang semakin kuat guna membubarkan RIS, mereka dibantu oleh orang-orang di luar RI yang pro-unitaris pula, baik di daerah negara bagian atau dipemerintah pusat. Permintaan anggota parlemen RI dan orang pro-unitaris dikabulkan pemerintah. Pada tanggal 1 Maret 1950 dalam sidang kabinet DPR dan Senat RIS, berpendapat bahwa tidak ada suatu daerah yang langsung di bawah RIS. Dan diperbolehkan pengembalian suatu daerah atau negara bagian lain, ke dalam negara bagian RI Yogya. Usaha pengembalian daerah-daerah ini dipermudah dan di atur dengan suatu Undang-Undang Darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat (RIS). Pihak pemerintah RI mengajukan tuntutan lagi agar soal penggabungan suatu daerah atau negara bagian sebaiknya, pemerintah pusat tidak perlu ikut campur. Pemerintah RI di Yogyakarta berpendapat bahwa :

Penggabungan daerah-daerah ke RI sebenarnya, RI bisa bertindak secara merdeka sesuatu dengan kenyataan yang ada pada saat ini, di mana rakyat sudah tak sabar menunggu lebih lama lagi. Jika dalam soal penyelesaian penggabungan daerah-daerah yang sebenarnya mudah diselesaikan dengan waktu yang pendek, maka kurang perlunya jika soal itu dibicarakan dalam parlemen yang akan memakan waktu lama.⁹⁷

Permintaan yang keras dari pemerintah RI, terutama wakil-wakil yang duduk di dalam parlemen RIS, serta

⁹⁷ Surat Kabar, Tanah Air, *op. cit.*, tanggal 1 Maret 1950, hlm. 1.

bantuan kaum unitaris termasuk presiden Soekarno sendiri, maka lahirlah beberapa Undang-Undang Darurat yang sangat menguntungkan bagi perjuangan kaum unitaris. Salah satu Undang-Undang Darurat yang mengatur soal penggabungan suatu negara bagian ke RI atau RIS, adalah Undang-Undang Darurat yang ditetapkan oleh pemerintah RIS pada tanggal 8 Maret 1950, yaitu : Undang-Undang Darurat No. 16, tahun 1950, mengenai tata cara perubahan susunan kenegaraan dari wilayah RIS, yang berisi antara lain :

1. Pasal 4, berisi :

- (1) Daerah-daerah bagian dapat mengambil inisiatif untuk :
 - a. Menghapuskan daerah-daerah itu dalam pokoknya dan menggabungkannya dengan suatu daerah bagian yang lain.
 - b. Memecahkan satu bahagian dari pada daerah-daerah bagian, dan digabungkannya bahagian itu dengan satu daerah bagian lain.
 - c. Penggabungan dengan satu atau beberapa daerah-daerah bagian menjadi satu daerah bagian baru.

- (2) Satu daerah bagian tidak dapat mengambil inisiatif untuk meluaskan wilayahnya.

2. Pasal 21, berisi :

Jika diperlukan untuk kepentingan pertahanan, maka bagian-bagian kecil dari wilayah yang termasuk atau tidak termasuk dalam suatu daerah bagian, dengan undang-undang federal dapat ditempatkan seluruhnya atau sebagiannya langsung di bawah pemerintah dari RIS, dan untuk itu, jika dianggap perlu, diceraikan dari daerah bagian atau dari satuan-satuan kenegaraan yang lain.

3. Pasal 22, berisi :

- (1) Jika sebelum terbentuknya undang-undang ini oleh suatu dewan perwakilan sudah ambil pernyataan yang berisi suatu inisiatif sebagai

yang dimaksudkan dalam undang-undang ini, maka pernyataan itu dalam menjalankan UU ini dapat dianggap sebagai inisiatif atau sebagai pernyataan⁹⁸

Dikeluarkannya Undang-Undang Darurat pada bulan Maret itu, bagaikan jembatan emas, bagi kemenangan kaum unitaris terhadap kaum federalis. Isi undang-undang amatlah jelas memberi peluang besar untuk dibubarkannya suatu negara bagian, serta tampilnya negara RI Yogyakarta suatu sebagai kekuatan tunggal (mayoritas) di Indonesia, didukung RI sebagai negara pelopor kemerdekaan Indonesia. Situasi di Negara Indonesia Timur sedikit berbeda dengan di negara-negara bagian lainnya. Di situ, kaum anti federal (unitaris) harus berjuang lebih keras guna mengalahkan kaum federalis, sebab :

Negara Indonesia Timur dengan sekitar sebelas juta penduduk merupakan negara federal yang paling tua, dengan kekuasaan yang lebih besar dan identitas yang lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara federal lainnya yang telah diciptakan oleh Belanda. di dalam wilayahnya praktis tak ada pasukan Republik, kecuali sepasukan laskar, yang untuk bagian terbesar terdiri dari orang-orang Islam, di Sulawesi Selatan. Sebaliknya, di sana terdapat kontingen-kontingen KNIL yang besar yang anggotanya sedang disiapkan untuk dibubarkan atau dimasukkan ke dalam APRIS. Golongan-golongan etnik di Indonesia Timur, terutama sukubangsa Minahasa di Sulawesi Utara dan Ambon di Maluku Selatan, secara tradisional telah menyediakan bagian terbesar dari serdadu-serdadu untuk KNIL.⁹⁹

⁹⁸Pemerintah RI, Lembar Negara Republik Indonesia, Jakarta, No. 1-85, hlm. 3- 10

⁹⁹ULF. Sundhaussen, *op. cit.*, hlm 94.

Indonesia Timur merupakan focus perhatian pokok kaum unitaris, karena musuh bangsa Indonesia dan elemen-elemen kolonialisme masih banyak bercokol di sini, khususnya di Ambon, di mana prang-orang Belanda masih ikut di dalam pemerintahan. Anggota KNIL terbesar terdapat di daerah itu. Hal inilah yang sangat ditakutkan kaum unitaris dan militer serta beberapa pejabat RIS, sebab baru jelas dengan tegas kesetiaan mereka kepada RIS.

Pada bulan Maret tanggal 17, akhirnya kaum unitaris (Republikan) merasa sedikit lega sebab berita kemenangan kaum unitaris di dalam parlemen RIS. Ketua parlemen RIS (Mr. Sartono) mengeluarkan suatu pernyataan, bahwa :

Melihat, dari keadaan aliran-aliran yang ada di dalam parlemen sekarang ini, maka soal unitaris tidak menjadi soal lagi. Hampir semua anggota parlemen menghendaki unitarisme, hanya jika ada anggota yang menyimpang, mereka ini tidak membawa suara rakyat.¹⁰⁰

Pernyataan "Ketua Parlemen RIS", ditambah dengan kecaman bagi para anggota yang tidak setuju kembali ke negara kesatuan (dalam arti RIS dibubarkan) tidak membawakan suara rakyat Indonesia. Hal ini jelas nampak "Negara Indonesia Serikat", sudah harus dibubarkan,

¹⁰⁰ Surat Kabar, Tanah Air, op. cit, tanggal 17 Maret 1950, hlm. 1.

karena masa itu menganut "demokrasi ditangan rakyat" (kekuasaan tertinggi di tangan rakyat) maka hal ini berarti kehendak dan keinginan rakyatlah yang harus terjadi, tanpa ada kekuatan apapun juga yang boleh menghalanginya.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Darurat pada tanggal 8 Maret 1950, yang mengatur tata cara penggabungan suatu negara bagian ke negara bagian lain atau ke pusat (RIS), maka pada tanggal selanjutnya pemerintah pusat menerima dan mengesahkan penggabungan negara Jawa Timur, Jawa Tengah dan Madura ke dalam RI Yogyakarta. Kalimantan Barat akhirnya menyusul menggabungkan diri dengan RI pada tanggal 22 April 1950. Sehingga tinggal tiga negara bagian yaitu Sumatera timur, NTT dan RI. Di daerah NIT terjadi suatu tindakan yang kotor dan curang, dilakukan oleh perintah Menteri kehakiman Soumokil, yaitu memenjarakan tokoh-tokoh pro-RI Yogya, serta melakukan tindakan pembatasan pembebasan terutama demonstrasi. Perbuatan licik dan curang dari Soumokil dilakukan setelah terjadi demonstrasi besar-besaran rakyat NIT yang di dukung oleh mosi DPR-NIT yang intinya meminta pembubaran NIT dan penggabungan NIT ke dalam RI di Yogyakarta.¹⁰¹

Sehingga bila kita konsekuensi mengikuti Undang-Undang Federal (yaitu Undang-Undang Darurat) yang

¹⁰¹ Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 70-71.

ditetapkan oleh pemerintah RIS pada tanggal 8 Maret 1950, maka pada saat itu pemerintah pusat (RIS), sudah memiliki hak untuk membubarkan "Negara Indonesia Timur", tanpa persetujuan negara bersangkutan, dengan alasan demi kepentingan rakyat (umum). Namun saat itu pemerintahan federal (RIS) tidak ambil sikap apapun, selain hanya menyaksikan saja keadaan di NIT tersebut.

Puncak kesabaran pemerintah pusat di uji berat oleh NIT, dengan meletusnya insiden 5 April 1950. Kapten Andi Azis dengan tanpa persetujuan pemerintah NIT telah menggagalkan masuknya pasukan APRIS ke Makasar (NIT), yang juga menjabat sebagai Panglima Besar Angkatan, bertindak keras, dengan mençap Azis sebagai pemberontak", pada tanggal 13 April 1950. Selanjutnya 20 April 1950, APRA telah berhasil masuk Makasar dan membebaskan para golongan P-RI yang dipenjarakan. Soumokil dalang semua peristiwa pemenjaraan itu takut pada APRIS dan melarikan Republik Maluku Selatan. Kedatangan APRIS membuat kaum unitaris dapat bekerja kembali, sampai mampu menjatuhkan kabinet PM Diapari dan menggantikannya dengan kabinet likuidasi, pimpinan PM Putuhena (seorang unitaris, republikan).¹⁰²

Segala perbuatan, dan kejadian yang amat cepat berubah di NIT, yaitu dengan mundurnya kabinet Diapari

¹⁰²Ibid, hlm. 71.

dan kekalahan hampir diambang pintu bagi kaum federal, sebelum ini kaum unitaris memang mendapatkan semangat dari PM RIS Moh. Hatta, yang pada tanggal 11 April 1950, memberi amanat kepada seluruh bangsa Indonesia. Di dalam pidatonya, beliau mengatakan bahwa :

Pada dasarnya tidak ada perbedaan faham antara Republik dan NIT. Kedua-duannya berpegang kepada demokrasi dan kedua-duanya mengakui bahwa rakyatlah yang menjadi hakim akhirnya dan rakyatlah yang menentukan bentuk negara Indonesia kelak.¹⁰³

Keşeragaman cara penyelesaian masalah pertentangan golongan unitaris (Republikan) dan golongan federalis, telah terapai diantara para pemimpin di pusat (RIS), yaitu antara presiden Soekarno, P.M. Hatta dan, Mr. Sartono (Ketua Parlemen) di mana rakyatlah yang memiliki kedaulatan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan itu, suara-suara rakyat baik yang lewat DPR pusat DPR daerah atau DPR suatu negara bagian serta suara rakyat lewat demonstrasi besar-besaran, haruslah yang dianut dan harus dilaksanakan oleh pemerintah, baik pusat, maupun daerah. Apapun yang dikehendaki oleh rakyat, itulah yang haarus diwujudkan tanpa boleh ada suatu kekuatan apapun juga yang menghalanginya.

¹⁰³ Surat Kabar, Rakyat Medan, op. cit., tanggal 11 April 1950, hlm. 1.

BAB V
TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

A. Pembubaran Negara Indonesia Timur

Keinginan terwujudnya Negara Kesatuan dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah jelas merupakan impian hati nurani seluruh rakyat Indonesia, baik para pemimpinnya maupun rakyatnya. Perjuangan panjang yang dirintis dan dipertahankan oleh putra dan putri Indonesia sejak dikumandangkannya proklamasi 17 Agustus 1945, hingga pertengahan tahun 1950 saat negara-negara Bagian RIS terutama NIT bergolak. Hal itu suatu kenyataan kongkrit gerakan suara hati nurani rakyat yang tulus, menginginkan suatu negara kesatuan.

Memasuki bulan April 1950, merupakan awal langkah-langkah kemenangan kelompok faham unitarisme secara nyata. Suatu perbuatan mencoba mengadakan suatu coup militer terhadap APRIS yang dipimpin Kapten Andi Aziz, terhadap pasukan APRIS yang hendak didatangkan ke Negara Indonesia Timur, justru mempercepat tumbanginya NIT sebagai suatu negara bagian.

Kapten Andi Aziz, atas bujukan dan rayuan dari menteri kehakiman Soemokil dan Belanda, akhirnya ia mengerahkan anak buahnya dari kesatuan KNIL untuk menyerang pasukan APRIS agar tidak dapat mendarat masuk ke wilayah NIT di Makasar. Beberapa hari sebelum

penyerangan itu dilakukan, Kapten Andi Aziz dan anak buahnya, mengadakan suatu rapat pada tanggal 3 April 1950, di mana kira-kira 2.700 orang KNIL diambil mosi yang semuanya menyetujui untuk menolak kedatangan kesatuan-kesatuan APRIS ke Makasar dan ke NIT pada umumnya, sebelum anggota-anggota KNIL dimasukkan ke dalam kesatuan APRIS.¹⁰⁴

Atas penerangan Dr. Soumokil, maka Kapten Andi Abdul Aziz mengumpulkan orang-orang KNIL dan membentuk "Pasukan Bebas". Tindakan tersebut, pada tanggal 5 April 1950 dilanjutkan dengan menangkap Letnan Kolonel Mokoginta, yang didahului dengan penyerangan terhadap benteng tentara RIS di Makasar. Andi Aziz setelah menawan Mokoginta, ia minta kepadanya menggunakan pengaruhnya untuk mencegah pendaratan. Batalyon Worang. Bila batalyon tersebut berusaha mendarat, maka Aziz akan menembak kapal yang mengangkut mereka. Bila hal itu ditaati, Aziz menjanjikan akan membebaskan tahanan-tahanan TNI dan CPM seandainya batalyon Worang mau kembali ke Jawa. Mokoginta mengabulkan permintaan Aziz, dengan memberi berita kepada batalyon worang agar tidak mendarat ke Makasar tetapi kembali ke Jawa. Pemerintah RIS meminta bantuan komandan Belanda, dan Belanda menganjurkan KNIL jangan ikut campur tangan

¹⁰⁴Surat Kabar, Rakyat, Medan, tanggal 6 April 1950, hlm. 1.

dalam soal-soal RIS. Namun Aziz memberi jawaban bahwa tindakannya dilakukan bukan sebagai seorang anggota KNIL, tetapi sebagai anggota APRIS untuk mempertahankan Negara Indonesia Timur.¹⁰⁵

Pernyataan Aziz, mengenai dirinya merupakan anggota APRIS, memanglah suatu hal yang benar. Beberapa hari yang lalu, Kapten Andi Abdul Aziz bersama-sama dengan satu kompi pasukan KNIL, pada tanggal 30 Maret 1950, telah dilantik dan diresmikan oleh Letnan Kolonel Akhmad Yunus Mokoginta (Kepala Komisi Militer) di Indonesia Timur, sebagai anggota APRIS. Sehingga perbuatan Andi Aziz itu sangat mengejutkan dan memancing rasa anarah pihak RIS yang merasa telah melakukan tindakan yang sudah adil terhadap KNIL di Makasar tersebut dengan memasukkan mereka ke dalam APRIS, yang sebenarnya bila belum, sebenarnya termasuk lawan TNI, sebab KNIL adalah pasukan milik kerajaan Belanda.¹⁰⁶

Pemerintah RIS, dalam peristiwa Andi Aziz, tanggapannya dapat dilihat dari pernyataan wakil ketua parlemen RIS, Mr. Tambunan, yang memberikan keterangan, bahwa:

Dengan tindakan pasukan KNIL tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia Timur hendak mempertahankan bentuk federalis dan akan memakai alat-alatnya guna mempertahankan pendiriannya tersebut. Namun dalam

¹⁰⁵Barbara Sillars Harvey, *op. cit.*, PT. Temprint, Jakarta, 1989, hlm. 164-165.

¹⁰⁶Ramadhan KH, *A. E. Kawilarang, Untuk Sang Merah Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm. 194.

peristiwa Andi Aziz ini tidak dapat dinyatakan, "Apakah pasukan-pasukan Kapten Andi Aziz bertindak dengan persetujuan pemerintah negara Indonesia Timur atau bertindak dengan kemauannya sendiri untuk mempertahankan NIT.¹⁰⁷

Pemerintah Negara Indonesia Timur, kabinetnya melakukan suatu tindakan mengundurkan diri, dengan itu mengisyaratkan ketidaksetujuannya dengan tindakan pasukan Andi Aziz itu. Selanjutnya sebagai seorang pemimpin Kabinet NIT, menteri Doko, setelah peristiwa Andi Aziz, segera beliau mengirimkan berita kawat kepada pemerintah pusat (RIS), yang isinya menyatakan bahwa:

"Tidak benar bila pemerintah NIT mendukung penuh aksi Andi Aziz itu. Mungkin saja presiden Sukawati sendiri yang merestui, menyetujui tindakan Andi Aziz itu, tetapi kabinet sama sekali tidak. Malah Kabinet mau menandakan bahwa tindakan itu merupakan suatu penyelewengan yang tidak bisa dapat dibenarkan sama sekali.¹⁰⁸

Di Jakarta, Perdana Menteri Hatta menyerukan suatu penyelesaian masalah Andi Aziz lewat jalan perundingan. Dan rencana ini terlaksana pada tanggal 10 April 1950. Konferensi ini diikuti oleh RIS - NIT, dan RI atau disebut Konferensi Segi Tiga". Di dalam konferensi itu, delegasi NIT dipimpin oleh menteri penerangan I.H. Doko, pihak RIS dipimpin oleh P.M. Halim. Dalam konferensi itu, diambil keputusan bahwa:

Soal-soal Negara Indonesia Timur harus diselesaikan atas dasar persatuan bangsa Indonesia yang sekokoh-kokohnya. Serta di pihak Negara Indonesia Timur

¹⁰⁷ Surat Kabar, Rakyat, *op cit.*, hlm. 1.

¹⁰⁸ I.H. Doko, *op cit.*, hlm. 256.

dinyatakan bahwa rakyatlah yang akan menentukan secara konstitusional demokratis bentuk ketatanegaraan Indonesia di kemudian hari.¹⁰⁹

Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, atau menganut sistem demokrasi Kerakyatan. Rakyatlah penguasa tunggal dalam suatu negara dalam bentuk apapun, baik itu, dalam bentuk Negara Kesatuan (Unitaris) atau Negara Serikat (Federalis). Jadi secara garis besarnya kehendak rakyatlah yang harus jadi, dalam arti bila kebanyakan rakyat ingin bentuk federal maka negara itu harus menjadi negara "federal" (Serikat), kebalikannya, apabila mayoritas rakyat Indonesia menghendaki bentuk negara "Kesatuan" (Unitaris) maka bentuk negara federal (RIS) yang sekarang ini berdiri harus diruntuhkan sesuai kehendak rakyat dan diganti menjadi "Negara Kesatuan" (Unitaris). Begitu pula di Negara Indonesia Timur, apabila mayoritas rakyatnya ingin berintegrasi ke Negara Republik Indonesia dan membentuk Negara Kesatuan (Unitaris) sesuai dengan negara yang lahir pada waktu "Proklamasi 17 Agustus 1945", maka Negara Indonesia Timur dan Negara Republik Indonesia Serikat, tidak boleh mempertahankan eksistensinya masing-masing.

Dalam masalah Andi Aziz beserta anak buahnya, pada akhirnya, Sri Sultan Hamengku Buwono (Menteri Pertahanan dan Keamanan) mengambil sikap yang keras, sebab merasa

¹⁰⁹ Surat Kabar, Rakyat, *op.cit.*, hlm. 1 dan 4.

tindakan dari pasukan KNIL di Makasar pada tanggal 5 April 1950, bukan hanya menyangkut soal masalah ketentaraan atau KNIL saja, tetapi sudah mencakup masalah politik dan tindakan itu jelas sesuatu hal yang sangat meremehkan serta merendahkan wibawa RIS sebagai pusat pemerintahan. Hal tersebut masih ditambah pernyataan dari Letkol Mokoginta, bahwa perasaan "Malinosasi" masih kuat dipupuk di Negara Indonesia Timur. Maka hal itu juga merupakan suatu usaha untuk menggerogoti kekuasaan dan wibawa RIS, yang bukan sekedar guna mempertahankan bentuk federalisme. Menteri pertahanan menilai bahwa Soumokil merupakan seseorang yang mendalangi peristiwa Andi Aziz dengan mendapat dukungan moral dari Sukawati sendiri. Beliau selanjutnya menilai bahwa soal Andi Aziz, dan NIT umumnya, akan lebih sulit untuk diselesaikan nantinya dibandingkan dengan permasalahan APRA/Westerling yang ada di Bandung. Hal itu dikarenakan KNIL yang melakukan pemberontakan di Negara Indonesia Timur merupakan suatu gemobiliseerden (mereka yang dimobilisasi), yaitu mereka pasukan yang dikeluarkan dari KNIL, namun mereka tetap punya pakaian dan persenjataan yang lengkap. Karenanya suatu tindakan yang tegas amatlah penting. Hanengku Buwono menyarankan kepada P.M. Moh. Hatta, agar menolak setiap perundingan dengan NIT tentang soal Andi Aziz, sebelum Andi Aziz diserahkan kepada pemerintah RIS,

beserta anggotanya yang ikut melakukan insiden 5 April 1950.¹¹⁰

Sebelum peristiwa Andi Aziz meletus P.M. Hatta telah memperingatkan presiden Sukawati, di dalam surat pribadi beliau yang diterima presiden Sukawati pada tanggal 1 April 1950. Hatta dalam suratnya menyatakan bahwa:

Pemerintah RIS meliputi seluruh daerah Indonesia, terutama dalam soal keamanan. Oleh sebab itu menteri pertahanan berhak mengatur tentara supaya keselamatan dan kemerdekaan Tanah Air dapat dipertahankan. Hatta mengingatkan presiden Sukawati bahwa, "KNIL merupakan bagian dari tentara Belanda, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk mempertahankan Indonesia tanpa persetujuan Belanda, cara ini berlawanan dengan hak dan wewenang suatu negara berdaulat". Hatta mengatakan pula, "Sudah pada adatnya, sebelum meminta bantuan orang lain, Tanah Air kita harus dipertahankan dengan tentara sendiri". Penyebaran tentang RIS ke seluruh Indonesia, harus dilihat dalam rangka ini. Menteri pertahanan telah memberitahukan semua pemerintah daerah tentang penyebaran tersebut".¹¹¹

Berkaitan dengan peristiwa Andi Aziz, Perdana Menteri NIT (Diapari) melaporkan bahwa, ia dan pemerintahnya tidak berdaya terhadap tindakan *eigenmachtig* ("menurut kehendaknya sendiri") dari pasukan KNIL, anak buah Andi Aziz, yang baru saja dilantik menjadi APRIS, yang dengan "pasukan bebasnya", ia telah menduduki markas CPM APRIS, melawan Letkol Mokoginta dan para opsir-opsir dan serdadunya. Telah melakukan ancaman dengan kekuatan senjata

¹¹⁰Deliar Noer, Mohammad Hatta. Biografi Politik, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 383.

¹¹¹Ibid, hlm. 384.

berat terhadap Batalyon Worang yang mau mendarat, menyuruh Mokoginta memberi perintah berlawanan dengan perintah pemerintah pusat (RIS). Pasukan Azis ini telah menyebabkan terbunuhnya beberapa orang anggota pasukan Batalyon Worang. Hatta seketika itu juga, pada tanggal 5 April 1950, mengirim langsung surat kawat balasan, yang isinya beliau mengecam, peristiwa itu sebagai suatu tindakan menjurus pada pemberontakan karena kata Beliau,

"Memang bukan kewajiban satu pasukan untuk menentukan cara bagaimana meskinnya pemerintah negara diatur dari atas ke bawah, ini adalah urusan pemerintah dan pemerintah Juga meminta Perdana Menteri NIT agar Andi Aziz kembali ke tangsi, agar polisi bertanggung jawab atas keamanan (dan agar bukan tentara seperti Andi Aziz), agar orang-orang yang ditawan Andi Aziz dibebaskan, dan agar Perdana Menteri, beserta Letkol Mokoginta dan Andi Aziz ke Jakarta. Pimpinan tentara Belanda di Jakarta akan memerintahkan KNIL, agar kembali ke tangsi". Untuk Andi Aziz, PM Hatta mengirim surat sendiri pada tanggal 7 April 1950 yang isinya tegas menyatakan, "Tuan yang menyebut diri putera Indonesia tentu menginsafi bahwa pemerintah tidak dapat membiarkan seorang militer dari angkatan perangnya bertindak menurut paham dan pendiriannya sendiri". Hatta memberi waktu 3 x 24 jam kepada Andi Aziz untuk ke Jakarta.¹¹²

Perintah Perdana Menteri Hatta tersebut, merupakan perintah resmi pemerintah federal (RIS) terhadap Kapten Andi Aziz agar menghadap ke Jakarta. Perbuatan Aziz sangat mengecewakan pemerintah RIS, ia tidak menghadap ke Jakarta sampai batas waktu habis ditetapkan, yaitu tanggal 13 April 1950. Akan sikap membangkang tersebut

¹¹²Ibid, hlm. 385-386.

maka presiden Soekarno pada tanggal yang sama sebagai Panglima Tertinggi APRIS mengeluarkan pernyataan pada jam 20.15 malam, melalui Radio RIS di Jakarta, yang menyatakan Kapten Andi Abdul Aziz sebagai pemberontak terhadap kekuasaan pemerintah RIS dan mempercayakan kepada APRIS guna menyelesaikan masalah di Makasar itu, yang bertentangan serta melawan hukum Negara dan Tentara. Adapun beberapa isi pidato presiden RIS (Soekarno), adalah:

Soekarno mengatakan bahwa, "Ia selalu mengikuti usaha-usaha penyempurnaan Angkatan Perang RIS dengan gembira, terutama sekali apabila mendengar, suatu satuan bekas KNIL dimasukkan ke dalam APRIS". Beliau dengan kepercayaan, berpikir bahwa, "anggota baru itu, akan turut menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi kesempurnaan Angkatan Perang Indonesia dan Kejayaan Indonesia dan saya masih punya kepercayaan itu, sekalipun harus saya nyatakan di sini, bahwa kejadian di Makasar baru-baru ini menyakiti saya sebagai Panglima Tertinggi". Beliau menegaskan bahwa, "Soal apakah Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Republik Indonesia, dan sebagainya, akan tetap ada atau tidak, soal itu bukanlah suatu hal yang menjadi soal dari Angkatan Perang, melainkan dari rakyat Indonesia." Dan juga keahlian bekas KNIL akan dihargai setimpal dalam APRIS. Hasutan yang mengatakan bahwa, "saudara tidak akan diterima di dalam APRIS adalah dusta. Di dalam KNIL saudara-saudara tidak pernah turut politik, anti ini atau pro itu. Apabila saudara masuk dalam APRIS, maka disitupun saudara-saudara tidak boleh berpolitik. Tidak boleh pro aliran politik ini atau anti aliran politik itu ! Di dalam KNIL saudara telah terdidik untuk menjadi prajurit-prajurit yang berdisiplin, dan hanya bertindak kalau diperintah bertindak. Di dalam APRIS pun prajurit tidak boleh bertindak, kalau tidak diperintah untuk bertindak oleh atasan".¹¹³

¹¹³Sejarah Militer Kodam VI Siliwangi, Siliwangi Dari Masa ke Masa, Pn. Fakta Mahjuma, Jakarta, 1968, hlm. 398-407.

Selanjutnya dalam pidatonya presiden Soekarno menyatakan Andi Aziz bersama anak buahnya, telah melawan hukum negara dan Tentara, sehingga dinyatakan bahwa Andi Aziz seorang pemberontak terhadap kekuasaan pemerintah RIS, sebab ingin mempertahankan NIT dengan kekuatan sendiri tanpa perintah dari pemerintah NIT atau rakyat NIT. Presiden Soekarno juga percaya bahwa pemerintah NIT, rakyat Makasar dan Sulawesi Selatan akan memperlakukan Andi Aziz sebagai seorang pemberontak terhadap kekuasaan yang sah, yaitu melangkahi wewenang dan hak pemerintah NIT dan rakyat NIT yang belum tentu sepaham dengan Aziz. Dan yang paling parah, Aziz telah berani memberontak RIS. Dalam akhir pidatonya, presiden Soekarno memerintahkan agar Angkatan Perang RIS menyelesaikan masalah Andi Aziz secara tuntas dan sebaik-baiknya.¹¹⁵

Di dalam masalah Angkatan Perang Belanda (KNIL dan KL), sebenarnya menteri Doko sudah memberikan suatu ulasan yang jelas kepada pihak militer yang diwakili oleh seorang perwira KNIL, yang penjelasan beliau tentang KNIL, beliau sampaikan pada saat awal bulan Maret 1950, di mana seorang perwira KNIL, mencoba memaksa menteri Doko untuk memproklamasikan NIT lepas dari RIS. Pada waktu itu menteri I.H. Doko mengenai masalah KNIL menjelaskan, bahwa :

¹¹⁵Ibid, hlm. 402-404.

"Kedudukan orang-orang KNIL sampai saat ini belum beres. Saudara-saudara (KNIL) masih harus memilih dari tiga kemungkinan yaitu:

1. Masuk menjadi anggota APRIS atau,
2. Tetap selaku KNIL dan kemudian beralih menjadi anggota Koninklijke Leger (K.L.) = Tentara Belanda, atau
3. Melepaskan pakaian dan menjadi orang sipil biasa serta kembali ke tempat asal masing-masing.

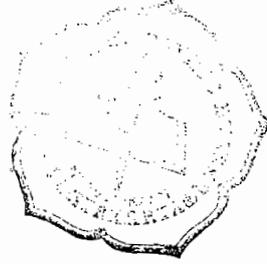
Sehingga sebelum saudara-saudara memilih ketiga alternatif di atas, saudara masih dianggap musuh APRIS".¹¹⁵

Para anggota kaum unitaris NIT pun memiliki pandangan serupa menteri Doko mengenai permasalahan KNIL, yaitu harus dilebur masuk APRIS atau jadi orang sipil biasa. Dari pihak kaum federalis, seperti Soumokil yang menghaturkan Andi Aziz berontak, jelas punya pandangan yang berbeda dengan menteri Doko dan kaum unitaris. Bagi kelompok Soumokil dan kaum federalis, KNIL walaupun belum dimasukkan dalam APRIS, sudah dapat diperintah oleh NIT walau masih berstatus sebagai tentara Belanda yang tentunya pemimpin tentara Belanda di Indonesia yang berhak memerintah dan menggerakkan KNIL dan KL. Namun bagi yang ingin memproklamasikan NIT lepas dari RIS, seperti kehendak Dr. Soumokil dan orang-orang Belanda, seperti Kolonel Schotburg (pemimpin Angkatan Belanda di Makasar, serta organisasi Persatuan kaum Maluku dan Twapro, jelas peleburan pasukan KNIL ke dalam tubuh APRIS tidaklah perlu dilakukan sebab NIT akan berdiri sebagai sebuah negara sendiri,

¹¹⁵I.H. Doko, *op. cit.*, hlm. 241-242.

berdaulat lepas dari pemerintah pusat (RIS). Dan cita-cita itu telah pernah dicoba oleh kelompok federalis di bulan Maret dari awal sampai akhir bulan, tetapi mereka selalu dapat digagalkan oleh kelompok unitaris, serta federalis yang tak ingin NIT lepas dari RIS.

Selanjutnya suasana di Makasar yang keruh akibat dari pemberontakan Kapten Andi Abdul Azis, berpengaruh pula di Ambon. Kelompok pro Soumokil, yaitu orang-orang Belanda yang masih banyak memegang kekuasaan umum, terutama kepolisian sampai tingkat inspektur dan komisaris, peristiwa Andi Azis oleh orang-orang Belanda itu mereka manfaatkan untuk menipu dan menghasut "Persatuan Timur Besar", beserta KNIL di Ambon dan rakyat untuk menolak kedatangan pasukan APRIS ke Ambon. Lewat organisasi "Persatuan Timur Besar" pada tanggal 12 April 1950 dikeluarkan desas-desus fitnah (penipuan) bahwa APRIS juga akan mendarat di Ambon. Dengan berbagai hasutan, maka KNIL di Ambon telah mempersiapkan diri dengan persenjataan yang lengkap. Untuk menyambut kedatangan APRIS, yang diisukan APRIS ini akan memaksa Ambon masuk ke wilayah RI keluar dari NIT dengan kekuatan angkatan bersenjata. Hingga pada tanggal 12 April itu, karena rasa takutnya, sebagian penduduk keluar dari kota Ambon dan karena di kota KNIL melakukan stelling-stelling (melakukan interograsi) di beberapa sudut jalan, dan patroli bersenjata berkeliling kota Ambon. Namun desas-desus itu



tidak benar, sampai beberapa hari tidak ada pasukan APRIS menuju ke Ambon.¹¹⁶

Kembali ke Jakarta, setelah pernyataan presiden Soekarno pada tanggal 13 April 1950, maka menteri pertahanan dan keamanan RIS, yaitu Sultan Hamengku Buwono IX, mengeluarkan suatu perintah "Harian Menteri Pertahanan RIS", yang perintah tersebut berbunyi :

1. Perintah PJM Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat untuk menyelesaikan pemberontakan di Makasar telah diterima oleh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.
2. Perintah akan segera dilaksanakan.¹¹⁷

Kemudian dengan surat nomer 142/MP/50, Menteri Pertahanan RIS, Letnan Jendral Hamengku Buwono IX, pada tanggal 15 April 1950 mengeluarkan surat keputusan mengangkat Kolonel A.E. Kawilarang sebagai pejabat komandan Tentara dan Toritorium Indonesia Timur. Dengan tugas sebagai panglima militer dari semua satuan - satuan darat, laut, dan udara yang ditugaskan menjalankan operasi militer di Indonesia Timur, sehubungan dengan peristiwa pemberontakan Andi Aziz, guna menertibkan dan menjaga keamanan di Indonesia Timur, khususnya Makasar,

¹¹⁶Yusuf A. Puar, Peristiwa Republik Maluku Selatan, Pn. Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 23.

¹¹⁷Sejarah Militer KODAM VI Siliwangi, op. cit., hlm. 404.

agar tak muncul lagi gerakan melawan pemerintah pusat (RIS).¹¹⁸

Sehubungan dengan amanat presiden RIS (Soekarno) dan perintah harian Menteri Pertahanan RIS, maka dibentuklah pasukan ekspedisi ke Negara Indonesia Timur di Sulawesi, Makasar khususnya. Pasukan ekspedisi ke NIT sebelumnya sudah dibentuk oleh Menteri Pertahanan RIS pada tanggal 7 April 1950, dengan susunan :

Ekspedisi itu dipimpin oleh Kolpinel A.E. Kawilarang dengan kekuatan 1 Divisi yang terdiri dari:

- (1). Brigade XVIII/Divisi I dipimpin oleh Letkol S. Sukowati dan Mayor Worang.
- (2). Brigade X/Divisi III dipimpin oleh Letkol Soeharto.
- (3). Brigade XIV - Divisi IV Jawa Barat dipimpin Mayor Abdullah
- (4). Batalyon Seberang dipimpin Mayor Andi Matalata.¹¹⁹

Dengan sudah tersusunnya anggota ekspedisi, maka setelah pidato presiden 13 April 1950, maka pasukan APRIS tinggal menjalankan tugas. Pada tanggal 17 April 1950, Letkol Sentot Iskandardinata menyampaikan perintah kepada Brigade X/Divisi III, untuk melakukan operasi ke Negara Indonesia Timur. Rencana operasi penumpasan dan penjaga keamanan dan ketertiban, dijelaskan sebagai berikut:

- (1). Batalyon Matalata mendarat di selatan Pare-Pare dan merebut kota itu yang dijaga KNIL/KL dengan kuat.

¹¹⁸Ramadhan K.H., *op.cit.*, hlm. 195-196.

¹¹⁹Tjahyadi Nugroho, *Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia*, Pn. Yayasan Telapak, Semarang, 1984, hlm. 120.

- (2). Batalyon Worang mendarat di selatan Makassar dan terus ke utara untuk menduduki kota Makasar.
- (3). Brigade X mendarat di Bonthain, seterusnya menguasai kota. Markas Brigade tetap di Bonthain, kemudian mengirimkan satu Batalyon ke Makasar.
- (4). Brigade XVIII mendarat di antara Palopo dan Bone, 1 batalyon ke Palopo, 1 Batalyon ke Ujung Lumuru, dan 1 Batalyon ke Bone. Markas Brigade di Bone.
- (5). Brigade XIV dijadikan cadangan taktis.¹²⁰

Di sisi kesibukan pasukan Angkatan Perang RIS dalam menyiapkan pasukan ekspedisi ke Negara Indonesia. Di daerah wilayah NIT, tepatnya di pulau Dewata (Bali), para pemuda-pemuda di daerah tersebut dengan semangat persatuan mereka, maka pada tanggal 14-17 April 1950, mengadakan suatu "Kongres Pemuda Seluruh Bali", dengan mengambil tema, "bersatu menghadapi pembangunan di masa yang akan datang". Kongres ini diadakan dengan mengundang seluruh kelompok pemuda-pemuda di pulau Bali. Kongres ini diikuti oleh berbagai golongan dan berbagai paham yang ada di Bali. Kongres ini mengambil keputusan, mosi dan resolusi, antara lain, adalah:

- a. Agar selekas-lekasnya didatangkan TNI (Tentara Nasional Indonesia) ke Bali untuk menjaga keamanan, menggantikan tentara yang sekarang ada di Bali;
- b. Kesatuan Ardjuna, di mana Pemuda-Pemuda Gerilya tergabung di dalamnya, supaya diresmikan menjadi inti Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang bertugas di Bali;
- c. Kedudukan yang penting-penting (kedudukan kunci yang menentukan) dalam pemerintahan supaya dipegang oleh orang-orang betul-betul berjiwa kebangsaan;

¹²⁰Ibid., hlm. 120.

- d. Paruman Agung sebagai suatu lembaga kenegaraan yang tidak mencerminkan kemauan rakyat supaya diganti dengan badan lain yang lebih demokratis;
- e. Polisi supaya direorganisir, sebab dalam bentuknya yang sekarang sukar dapat diterima oleh rakyat;
- f. Menunjuk 3 orang formatur untuk membentuk susunan pengurus dan merumuskan segala keputusan sidang kongres;
- g. Mengesahkan nama Kesatuan Pemuda Nasional Indonesia (KPNI) sebagai sebuah organisasi yang mencerminkan hasrat bersatu pemuda-pemuda seluruh Bali.¹²¹

Isi resolusi kongres pemuda di pulau Bali, memberi peluang besar bagi RIS guna menjalankan tugasnya mereorganisasi pasukan-pasukan bersenjata untuk dimasukkan sebagai anggota APRIS atau masuk sipil biasa. Keputusan resolusi itu sangat menggebu-gebutkan pemerintah pusat, dimana baru saja beberapa hari yang lalu muncul peristiwa yang sangat memprihatinkan pemerintah RIS, kini muncul dukungan bahwa pasukan APRIS yang berintikan pasukan TNI ternyata diharapkan oleh rakyat NIT untuk hadir di Negara Indonesia Timur itu, terutama di pulau Bali. Beberapa pernyataan resolusi pemuda Bali, amat sangat jelas menunjukkan, "bagaimana keadaan dan situasi daerah Bali, baik dari segi politik, maupun militer, terutama?". Angkatan perang dan kepolisian nampak jelas sebagai badan yang sangat ingin sekali diperbaiki di pulau Bali, yang tentunya APRIS yang diminta tolong oleh rakyat Bali guna memperbaiki situasi daerah Bali, seperti

¹²¹Nyoman. S, Pendit, *op. cit.*, hlm. 345-346.

isi resolusi kongres pemuda mereka, yang merupakan suatu tindakan yang pantas dipuji dan dihargai.

Setelah mendengar pidato presiden Soekarno lewat radio RIS, maka Kapten Andi Abdul Azis memenuhi panggilan pemerintah federal (RIS) untuk menghadap presiden dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya pada tanggal 5 April, yang lalu. Sehingga pada tanggal 14 April, paginya ia menyerahkan diri dan datang juga ke Jakarta memenuhi panggilan Perdana Menteri Hatta. Setelah sampai di Jakarta, Andi Aziz dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, karena kedatangannya dianggap terlambat dari waktu yang ditentukan, ditambah lagi presiden Soekarno telah menyatakan Andi sebagai pemberontak.¹²²

Kelompok pro-RI di daerah Sulawesi Utara, bertindak lebih radikal. Di daerah ini terdapat suatu perjuangan bersenjata guna membubarkan Negara Indonesia Timur. Badan perjuangan bersenjata ini bernama LRRI (Laskar Rakyat Republik Indonesia) dan LFP (Laskar Front Pemuda). LRRI di bawah Komandan FHLW Mondong, sedangkan LFO di bawah Komandan L. Anes. Kedua badan itu memiliki tugas yang berbeda-beda. LRRI bertugas untuk melucuti senjata polisi NIT. Sementara LFP bertugas untuk menyadarkan anggota KNIL agar mau bergabung dengan mereka. Kedua organisasi ini pada tanggal 14 April 1950 merencanakan

¹²²Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 387.

mengadakan serangan bersama-sama ke markas KNIL di Teling dan di Wanea (kedua markas berada di kota Manado). Guna melaksanakan rencana tersebut maka LRRI dan LFP melakukan operasi penyelidikan di sekitar kedua markas. Penyerangan terhadap markas besar KNIL dimaksudkan guna merebut persenjataan yang cukup. Para anggota KNIL yang pro-RI, sudah diberi tahu, dan mau membantu serangan dari dalam markas. Akan tetapi karena ada seorang pengkhianat yaitu Sersan Rawung, yang memberi tahu kepada KNIL dan Reserve Corps di Teling dan Wanea, maka penyerangan dibatalkan oleh pihak pro-RI.¹²³

Kegagalan penyerangan, tidak membuat pasukan pro-RI di Sulawesi Utara itu menyerah. Mereka (LRRI dan LFP) segera menyusun kembali serangan terhadap KNIL dan RC (Reserve Corps) dan pasukan polisi NIT. Serangan akan dilakukan secara serentak pada tanggal 24 April 1950, dengan sasaran yang diserang adalah kedudukan polisi NIT yang berada di Tomohon, Tomohon, Airmadidi, Kawangkoan, Tumpaan, dan Amurang. Jalannya penyerangan pasukan LRRI dan LFP adalah, serentak pada tanggal yang bersamaan, yakni 24 April 1950, dengan jam yang berbeda, yakni jam 22.00 menyerang Amurang, Tumpaan dan Airmadidi; jam 23.00 menyerang Tondano dan Kawangkoan; sedangkan untuk Tomo-

¹²³Bambang Suwondo, Sulawesi Utara, op. cit., hlm. 203-204.

hon, dilakukan jam 01.00 tanggal 25 April 1950. Sudah dibentuk enam pasukan untuk menyerang keenam kota itu.

Sesuai rencana maka pasukan diberangkatkan ke Amurang untuk melucuti polisi NIT di Amurang dan Tumpaan. Gerakan itu dipimpin oleh F. Wongkar, J. Kaindeh dan Boy Potu yang di Amurang diperkuat oleh Komandan LRRI Wilayah VII H.L. Kaligis yang juga sudah siap untuk itu. Dengan mudah pasukan LRRI itu melucuti semua senjata polisi NIT di Amurang dan Tumpaan tanpa pencegahan dari KNIL dan RC yang ada di tempat itu yang mungkin sekali tidak mengetahui adanya serangan. Pasukan LRRI itu karena tidak diperintahkan maka juga tidak mau menyerang pasukan KNIL dan RC sebab hal itu menjadi bagian tugas dari LFP. Setelah berhasil dalam tugasnya, pasukan LRRI itu tidak melanjutkan dengan menyerang/melucuti polisi NIT yang ada di Kawangkoan sesuai rencana berhubung harus cepat-cepat kembali ke Tomohon untuk membantu serangan di sini. Tiba di Tomohon, pimpinan pasukan diambil alih lagi oleh Komandan LRRI FHL Mondong, yang bersama kekuatan-kekuatan LRRI yang siap siaga di sini menyerang markas polisi yang ada di kota itu. Beberapa anggota polisi NIT yang pro LRRI antaranya Sem Mait ikut membantu, sehingga Komandan Polisi NIT yang ada di Tomohon (bernama Rusman), menyerah bersama seluruh anak buahnya (Posumah, 1978 : 95-99). Semua senjata mereka dirampas oleh LRRI.

Pasukan yang diperintahkan menyerang polisi NIT di Tondano dan Airmadidi gagal, sebab rencana serangan sudah

diketahui musuh. Tanpa menunggu berita dari kedua tempat itu, pasukan LRRRI pimpinan Mondong memindahkan Markas Besare dari Tomohon ke desa Pndos (kecamatan Motoling, Minahasa Selatan). Pemandahan itu dilakukan tanggal 25 April 1950 untuk menghindari serangan balasan dari polisi, KNIL dan RC di Minahasa, yang tentu saja tidak akan tinggal diam. Saat itu, daerah Minahase Selatan sudah dibebaskan seluruhnya dari kekuasaan NIT. Kepala Daerah Minahasa P.M. Tangkilisan sebelum memimpin sidang DPR Minahasa (30 April 1950), pergi menemui Komandan LRRRI FH LW Mondong untuk menyatukan perjuangan politik dan militer dalam membebaskan Minahasa dari NIT dan bergabung dengan RI yang berkedudukan di Yogyakarta.¹²⁴

Di masa itu LRRRI merupakan suatu gerakan pasukan yang menamakan diri, pasukan pembela Republik Indonesia dan berjuang menghancurkan Negara Indonesia Timur, agar seluruh Indonesia Timur masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. LRRRI memiliki semboyan dan lagu perjuangan. Adapun lagu perjuangan mereka yang terkenal di bulan April adalah :

Lakar Rakyat, Pengawal Rakyat
Bertindak cepat, lagipun tepat
Kalau terlambat barang sesaat
Banyak terhambat lagi terlambat

Aksi Westerling menjadi bukti
Aksi Azis, nyata munafik
Aksi 18 April bahaya mendekat
Laskar Rakyat terpaksa nekad

¹²⁴Ibid., hlm. 204-205.

25 April tonggak sejarah
Laskar Rakyat membuang jejak
Menegak tonggak kesatuan
Agar lepas dari tipuan

Roda sejarah berpusing terus
Laskar Rakyat mengintai terus

Mengawal rakyat, tanah dan bangsa
Agar tanahnya makmur bahagia.¹²⁵

Meskipun lagu itu seperti baru ada di bulan April 1950, namun bukan berarti pada bulan itu, LRRI baru muncul. LRRI telah ada jauh sebelum persetujuan KMB muncul. Dan dari awal LRRI memang bertujuan menghancurkan Negara Indonesia Timur dan mengembalikan Indonesia Timur menjadi wilayah Negara Republik Indonesia, dan pula yang pasti bukan RIS tapi RI di Yogyakarta, yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Batalyon Worang yang dikirim pertam akali ke Negara Indonesia Timur (Makasar) telah ditolak oleh pasukan KNIL pimpinan Kapten Andi Azis, pada tanggal 5 April 1950. Tapi setelah Azis menyerahkan diri, ekspedisi Batalyon Worang akhirnya dapat mendarat di dekat Djeneponto pada tanggal 18 April 1950. Dan pada tanggal 21 April mereka memasuki kota Makasar, dengan tenang tanpa ada insiden apa-apa dan rakyat menerima dengan tenang tanpa ada unjuk rasa yang bersifat demonstratif.¹²⁶

¹²⁵Ibid., hlm. 205.

¹²⁶Sejarah Militer KODAM VI Siliwangi, *op. cit.*, hlm. 409-410.

Pasukan ekspedisi pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang pada tanggal 20 April 1950 mulai siap menuju ke sasaran masing-masing. Letkol Soeharto bersama pasukannya berangkat pada tanggal 21 April 1950. Setelah mendengar kabar penyerahan Andi Azis dan anak buahnya, serta keberhasilan Batalyon Worang mendarat di Jeneponto dan menguasai Makasar, maka rencana operasi pada tanggal 24 April 1950, saat briffing terakhir pukul 23.40, dirubah agar Brigade dan pimpinan Letkol Soeharto yang berangkat lebih dulu supaya mendarat di Makasar dan bukan di Bonthain. Perubahan rencana operasi tersebut adalah:

- (1). Brigade X di bawah pimpinan Letkol Soeharto mendarat di Makasar. Letkol Soeharto menjadi Komandan Sektor Makasar yang meliputi kota Makasar dan daerah pantai barat Jeneponto sampai gunung Lompobatang, ke utara lurus sampai timur Pancana, membelok ke barat hingga selatan Pancana.
- (2). Batalyon Abdullah mendarat di Bonthain dan membentuk Sub Sektor III dan Sektor Timur.
- (3). Khusus kota Makasar ditetapkan sebuah Komandan Militer Kota (KMK).
- (4). Brigade XVIII mendarat di Bone dan membentuk Sektor Timur dengan Komandan Letkol S. Sukowati dengan kekuatan Batalyon Mayor Magenda, Batalyon Mayor Abdullah, Batalyon Mayor Wahman.
- (5). Hari H adalah 26 April 1950 dan jam D adalah 06.50.¹²⁷

Secara keseluruhan pasukan ekspedisi APRIS ke Negara Indonesia Timur sampai ketujuan pada tanggal 26 April 1950. Kedatangan pasukan APRIS baik ekspedisi terakhir

¹²⁷Tjahyadi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 121-122.

atau yang pertama (Batalyon Worang) pada umumnya disambut dengan gembira dan sangat meriah oleh rakyat di Sulawesi Selatan. Hanya saja pada saat tanggal 26 April 1950 terjadi insiden kecil-kecilan antara pasukan gerilya rakyat dengan pasukan KNIL, di sekitar pelabuhan. Dari beberapa sumber pasukan APRIS yang masuk di Makasar mendapat keterangan, bahwa sebelum pasukan ekspedisi APRIS tiba di Makasar, banyak kekejaman dilakukan oleh pasukan KNIL dan KL terhadap rakyat. Mereka itu melakukan perampokan dan pemerasan terhadap rakyat di jalan-jalan. Setelah pendaratan APRIS, maka KNIL dan KL dilarang keluar dari pos-pos mereka. Pos mereka dipusatkan di Kampenen Mariso dan Mattoangin. Dan larangan keluar pos itu sudah diberlakukan sejak tanggal 25 April 1950, di mana sudah empat hari pasukan Batalyon itu masuk kota Makasar, sejak Batalyon itu masuk kota Makasar pada tanggal 21 April 1950. Kolonel A.E. Kawilarang selanjutnya setiba di kota Makasar pada tanggal 26 April 1950, segera diangkat menjadi Panglima Territorial Indonesia Timur, menggantikan pejabat lama, Letnan Kolonel Mokoginta yang ditarik kembali ke Jakarta.¹²⁸

Di sela-sela ketegangan antara pasukan APRIS dan pasukan KNIL serta KL, muncul berita yang sangat

¹²⁸Sejarah Militer KODAM VI Siliwangi, *op.cit.*, hlm. 410-411.

menggembirakan dari pihak pemerintah Negara Indonesia Timur. Presiden Sukowati pada tanggal 21 April 1950 kepada pemerintah pusat (RIS) di Jakarta mengeluarkan suatu pernyataan dari Negara Indonesia Timur, yang berisi, bahwa pemerintah negara Indonesia Timur (NIT) bersedia dimasukkan ke dalam suatu "Negara Kesatuan", dengan syarat Negara Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta ikut dimasukkan ke dalam pembentukan "Negara Kesatuan" tersebut. Dalam hal ini berarti Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan diganti "Negara Kesatuan Indonesia". Dan beberapa minggu berikut seluruh daerah bagian Negara Indonesia Timur menyatakan pernyataan yang sama dengan pemerintah NIT di Makasar, yaitu meleburkan diri menjadi daerah "Negara Kesatuan" yang hendak dibentuk menggantikan "RIS". Negara Kesatuan yang akan dibentuk ini, sesuai dengan "Negara Kesatuan", yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Hanya satu daerah NIT yang tidak mengeluarkan pernyataan serupa, yaitu Maluku Selatan, tidak memberi pernyataan apapun juga.¹²⁹

Masalah R.H.S dapat diselesaikan tuntas hingga bulan Oktober 1950 akhir. Pertempuran dengan kaum RMS sudah usai dan tinggal pembersihan. Pada tanggal 27

¹²⁹George Mc. Turnan Kohin, Nationalism and Revolution In Indonesia, Cornell University Press, New York, 1970, hlm. 460.

Oktober 1950 dan seterusnya, daerah Maluku secara keseluruhan telah masuk wilayah Republik Indonesia. Sehingga hanya pulau Irian Jaya dan Timor-Timur yang belum masuk ke wilayah RI¹³⁰

Tuntutan pembubaran NIT dipulan Mei 1950 semakin menghebat. Pergolakan politik di Minahasa menghebat menuntut di bubarkannya DPR dan diganti dengan Komite nasional Indonesia (KNI) Daerah Minahasa. Pada tanggal 2 Mei 1950 di Sulawesi Utara itu, di daerah Balaan Mongondow, Gorontalo dan Briol menuntut agar Dewan Sulawesi Utara dibubarkan diganti dengan KNI Daerah Gorontalo. Lalu pada tanggal 2 Mei 1950 pemerintah sub daerah Gorontalo menyatakan diri keluar dari NIT serta menggabungkan diri dengan RI di Yogyakarta. Begitu pula daerah Bolaang Mongondow di bulan Mei 1950 mengeluarkan pernyataan yang sama bergabung dengan RI.¹³¹

Pemerintah presiden Sukawati telah menyatakan mau bergabung dalam negara kesatuan, asal RI juga bersedia. Kemudian guna merealisasi tujuan itu maka kemudian pemerintah RIS bersama dengan NIT dan Negara Sumatera Timur melakukan konferensi pada tanggal 3 sampai 5 Mei 1950. Moh. Hatta, presiden Sukawati (NIT), presiden Dr.

¹³⁰Sejarah Militer Kodam VI Siliwangi, op. cit., hlm. 411

¹³¹Bambang Suwondo, Sulawesi Utara, op. cit., hlm. 213-214.

Mansur (Negara Sumatera Timur), mencapai kesepakatan bahwa akan mendirikan suatu negara kesatuan.¹³²

Setelah presiden Sukowati menyampaikan pernyataan bahwa NIT bersedia dimasukkan ke dalam wilayah "negara kesatuan", suku perjuangan kaum unitaris di NIT semakin kuat. Pasukan LFP di Sulawesi Utara pada tanggal 2 menjelang 3 Mei 1950 dipimpin oleh N. Th. Rumajar mengadakan aksi di markas Tebing dengan mengajak 72 anggota KNIL pimpinan sersan Mamengki dan Sersan Angkouw. Setelah bergabung di daerah Airmadidi mereka melucuti pasukan RC yang ada di sana. Pasukan LFP bermaskas di Tomohon, juga para pasukan KNIL yang memihak mereka. Akibat aksi LFP, maka Belanda kehilangan ratusan pasukan KNIL di kota Manado. Pasukan KNIL yang pro-Belanda tinggal dua pleton, yaitu RC di Wanea dan CPM, serta tinggal punya 50 orang polisi NIT. Setelah mendapat tambahan anggota, maka para pemimpin LFP, membentuk satu batalyon pasukan, yang di beri nama "Batalyon 3 Mei", pada tanggal 4 Mei 1950, dengan Komandanya A.H. Mongko, dan Wakil Komandannya L. Anes. Pada tanggal 6 Mei 1950 pasukan Batalyon 3 Mei melakukan serangan terhadap kota Manado dan menawan komandan pasukan KNIL pro-Belanda yaitu Mayor Nues serta semua perwira KNIL yang ada di Sario, Manado. Dengan memaksa Nues maka semua sisa KNIL

¹³²George Mc. Turnan Kahin, *op. cit.*, hlm. 460-461.

pro-Belanda dapat menyerah semua. Sehingga pada tanggal 10 Mei 1950, pasukan APRIS, yaitu "Batalyon Worang", pimpinan Mayor H.V. Worang mendarat di Manado tanpa ada paksaan, bahkan malah disambut dengan meriah dan gembira oleh Batalyon 3 Mei, yang menginginkan NIT dibubarkan dan berdirinya "Negara Kesatuan Republik Indonesia"¹³³

Tuntutan-tuntutan rakyat baik di Jawa maupun di luar Jawa (Sumatera, Kalimantan, Indonesia Timur) membuat pemerintah-pemerintah negara bagian tidak pernah dapat menjalankan pemerintahnya. Tuntutan agar kembali ke negara kesatuan seperti masa proklamasi 17 Agustus 1945 disalurkan rakyat lewat DPR masing-masing di daerah mereka, setelah aspirasi mereka tidak terwujud mulailah rakyat turun ke jalan dan mengadakan demonstrasi-demonstrasi. Di Indonesia Timur malah ada kelompok bersenjata yang sengaja melucuti senjata bahkan bila terpaksa membunuh KNIL atau Polisi NIT.

Tuntutan-tuntutan rakyat, membuat negara-negara bagian semuanya meleburkan diri di bawah pemerintah pusat bergabung dengan RI. Bersatunya kembali ke RI, juga dikarenakan wibawa pemerintah pusat hilang sebab gelombang protes yang besar di masyarakat. Setelah negara-negara bagian melebur diri ke RI, tinggallah tiga

¹³³Bambang Suwondo, Sulawesi Utara, op.cit., hlm. 208-211.

negara yang belum bersatu, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur.¹³⁴

Hasil konferensi pada tanggal 3-5 Mei 1950, merupakan puncak kemenangan RI. Semua daerah di Indonesia bersedia masuk ke dalam "Negara Kesatuan Republik Indonesia", kecuali Maluku Selatan (RMS). Di negara Indonesia Timur Presiden Sukawati, mengumumkan Indonesia Timur bersedia bergabung dalam "negara kesatuan". Selanjutnya presiden Sukawati pada tanggal 9 Mei 1950, membentuk sebuah kabinet baru di Makasar dengan tujuan khusus membubarkan negara Indonesia Timur.¹³⁵

Pada tanggal 9 Mei 1950 itu, pergolakan-pergolakan semacam demonstrasi, pernyataan DPR di daerah tetap berguna menuntut NIT dibubarkan, meskipun sudah keluar pernyataan dari presiden Sukawati (NIT).

Sebagai contohnya adalah :

Pada tanggal yang sama 9 Mei 1950 Dewan Raja-raja bersama DPR daerah Sumbawa yang dibantu oleh partai-partai politik dan organisasi, mengeluarkan pernyataan politik keluar dari NIT dan menggabungkan diri dengan pemerintah RI di Yogyakarta. Di daerah Lombok keluar pula suatu pernyataan politik yang sama, yaitu keluar dari NIT dan menggabungkan diri dengan RI pada bulan dan tahun yang sama dengan Sumbawa.¹³⁶

¹³⁴ Joeniarto, S.H., op. cit., hlm. 70.

¹³⁵ ULF. Sundhaussen, op. cit., hlm. 97.

¹³⁶ H. Bambang Suwondo, dkk., op. cit., hlm. 186.

Di daerah Nusa Tenggara Timur satu hari selanjutnya atau tanggal 10 Mei 1950, gabungan dari hasil rapat para pemuka masyarakat, tokoh-tokoh PDI (Timor) dan berdasar hasil sidang Umum DPR Nusa Tenggara Timur, mengeluarkan suatu pernyataan politik yang sama, yang berbunyi :

Mengharapkan, (1) mendesak kepada pemerintah RIS dan NIT, agar secepatnya NIT dihapuskan melalui Undang-Undang Darurat dan meleburkan diri ke dalam RI. (2). Menganjurkan kepada pemerintah-pemerintah RIS dan RI, agar supaya daerah Timor dan kepulauannya dijadikan bagian dari RI.¹³⁷

Gencarnya aksi-aksi demonstrasi rakyat di seluruh wilayah NIT dan ditambah suara-suara dalam parlemen NIT sendiri yang makin kuat menuntut dibubarkannya NIT dan kembali ke "Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah NIT tidak mampu lagi bertahan. Sehingga tanggal 12 Mei 1950 pemerintah NIT mengirimkan utusan delegasi NIT ke Jakarta, yang beranggota PM Ir. Putuhena, dan Menteri Penerangan Henk Rondonuwu guna berunding dengan pemerintah RIS serta menyerahkan mandat NIT kepada PM RIS, Drs. Moh Hatta, agar RIS melaksanakan perundingan tentang pembentukan "Negara Kesatuan" dengan pemerintah RI di Yogyakarta. Dengan begitu NIT menganjurkan agar "negara kesatuan" segera dibentuk, hal jelas berarti bahwa NIT harus pula dibubarkan. Pemerintah RIS dan RI di

¹³⁷I. H. Doko, *op cit.*, hlm. 253-254.

Yogya, akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 mencapai kata sepakat bahwa "Negara Kesatuan Indonesia" akan dibentuk.¹³⁸

Pemerintah Sumatera Timur juga telah memberikan mandatnya kepada RIS. Sehingga perundingan RIS dengan RI secara de Yure dan de facto. Perundingan 19 Mei 1950 di Jakarta itu, persetujuannya yang paling penting, adalah;

Persetujuan tentang kesediaan bersama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai jelmaan dari RI proklamasi 17 Agustus 1945.¹³⁹

Dengan demikian sah sudah secara de yure dan de facto, bahwa "Negara Indonesia Timur", harus dibubarkan dan tidak boleh lagi ada yang menentang keputusan ini, sebab pemerintah NIT secara de yure dan de facto telah menyerahkan mandatnya kepada RIS, begitu pula SUMATERA Timur, guna membentuk sebuah "negara kesatuan", sebelum tercapainya persetujuan 19 Mei 1950. Dan dari sini sebenarnya sudah tidak ada lagi masalah ketatanegaraan dalam negara Indonesia secara de yure dan de facto. Sehingga segala gerakan yang ingin mempertahankan NIT setelah tanggal 19 Mei 1950 adalah tidak punya kekuatan hukum lagi. Gerakan semacam itu berdasarkan kepada

¹³⁸Bambang Suwondo, Sulawesi Tengah. op. cit., hlm. 138.

¹³⁹G. Hoedjanto, op. cit., hlm 72.

ketatanegaraan internasional dianggap sebagai perbuatan, pemberontakan. Sehingga periode selanjutnya seperti, gerakan Kahar Muzakkar dan termasuk pula RMS dianggap sebagai gerakan pemberontakan atau pengacau, maka pada saat pemerintah pusat (RI) tidak mampu menyelesaikan secara damai, masalah pemberontakan itu, lalu pemerintah menyelesaikannya secara hukum militer. Tindakan pemerintah pusat itu (RI) jelas tindakan yang benar dan sah, apalagi sudah dicoba secara damai (perundingan) menemui jalan buntu. RMS dapat disebut pula pemberontak sebagai pendiriannya bukan dari kehendak rakyat Maluku sendiri, namun hanya keinginan sekelompok orang yang pro dengan Belanda.

Mengenai keadaan di NTT, setelah persetujuan 19 Mei 1950, PM. Putuhena menjelaskan bahwa;

Di NIT dewasa ini, baik, yang mengenai keamanan maupun pembentukan negara kesatuan Indonesia adalah menggembirakan. Juga soal yang tadinya mengenai masuk kepada RI dan sebagainya itu sekarang telah tidak merupakan soal yang runcing lagi, bahkan pemerintah darurat di daerah Sulawesi Selatan itupun telah menyatakan berdiri dibelakang pemerintah NIT sekarang ini, demikian Putuhena. Juga kemarin telah diadakan konggres rakyat, yang dipimpin Yusuf Banti dan Karang Djarung. Akhirnya Putuhena menerangkan bahwa di daerah NIT umumnya tidak terlihat kalangan-kalangan bagi pembentukan Negara kesatuan Indonesia itu. 140

Kedadaan secara de jure, Negara Indonesia Timur, sudah tidak dapat dilanjutkan lagi hidupnya, apalagi bila, "Negara Kesatuan Indonesia" telah terbentuk. Namun hingga awal Agustus 1950, "Negara Kesatuan" itu belum dibentuk, sehingga antara pasukan KNIL, KL dengan pasukan APRIS di Makasar masih terus tegang, dan sewaktu-waktu masih dapat pecah insiden-insiden bersenjata. Awal Agustus, tepatnya tanggal 5 Agustus 1950 terjadi pertempuran antara KNIL, KL melawan APRIS hingga tanggal 8 Agustus 1950. Pihak Belanda yang membantu KNIL dan KL, akhirnya menyerah dan mengajak APRIS untuk berunding pada tanggal 8 Agustus 1950. Pasukan KNIL, KL dan Belanda menyerah dan bersedia meninggalkan Makasar tanpa bersenjata apapun juga. Jalannya hasil perundingan itu adalah :

Pada tanggal 9 Agustus 1950, diadakan penjerahan kendaraan-kendaraan lapis baja seperti: bren-carrier, humber, scout-car, kemudian selanjutnya dilakukan penyerahan alat-alat perang lainnya. Pengangkutan angkauta-anggauta KL dan KNIL secara berangsur-angsur pada tanggal 20 Agustus 1950 belum seluruh KL, KNIL meninggalkan kota Makasar, namun dianggap telah selesai, sesuai persetujuan yang dicapai. Hari itu juga jam 12.00, pasukan-pasukan dari Sektor Makasar, dengan didahului oleh pasukan Geni Pionir dan Polisi Militer APRIS kita mulai memasuki Makasar. Demikianlah pada akhir bulan Agustus 1950, seluruh pasukan KL/KNIL telah meninggalkan Makasar tanpa bersenjata, sehingga mulai saat itu Peristiwa Makasar dianggap telah berakhir.¹⁴¹

¹⁴¹Sejarah Militer KODAM VI Siliwangi, op. cit., hlm. 417.

Pada tanggal 15 Agustus 1950, panitia yang sejak pada tanggal 19 Mei 1950 ditugaskan untuk menyusun, "Rencana UUDS Negara Kesatuan Republik Indonesia", telah selesai tugasnya, dengan pihak DPRS serta Senat di Jakarta dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) di Yogyakarta telah membubuhkan tanda disetujui serta disahkannya "UUDS" itu, sebagai UUD pengganti konstitusi RIS. UUDS tersebut merupakan kelanjutan kongkrit pasal satu dari Undang-Undang No. 7 tahun 1950, pemerintah RIS, tentang perubahan konstitusi RIS ke UUDS 1950.¹⁴²

Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950 itu juga dihadapan sidang DPRS dan Senat di Jakarta, presiden Soekarno memproklamasikan berdirinya "Negara Kesatuan Republik Indonesia", sebagai ganti "Negara Republik Indonesia Serikat", yang telah dibubarkan. Presiden Soekarno mengucapkan teks proklamasi, yang berbunyi sebagai berikut :

"Berdasarkan atas Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan pada taraf perjuangan Bangsa Indonesia untuk kemerdekaannya pada saat ini, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari ini diproklamlirkan yang meliputi seluruh wilayah Indonesia".¹⁴³

¹⁴²K. Wantjik Saleh, SH, Kitab Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, Pn, PT Gramedia, Jakarta, 1978, hlm 136.

¹⁴³ Ide Anak agung Gde Agung, op. cit., hlm. 771.

Pidato presiden Soekarno itu mengesahkan secara de jure dan de facto bahwa NIT bubar dan telah integrasi ke wilayah RI secara otomatis, sebab pada tanggal 12 Mei 1950, NIT telah menyerahkan mandatnya kepada pemerintah pusat (RIS) secara de jure, guna membentuk "Negara Kesatuan" itu.

Dengan kenyataan di atas, maka PM. IR. J. Poetoehena beserta kabinetnya di Makasar, pada tanggal 16 Agustus 1950 meletakkan jabatannya, sehingga NIT pun dibubarkan.¹⁴⁴

B. Tercapainya Integrasi NIT ke RI

Pada saat ulang tahun kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1950), presiden Soekarno mengulangi lagi pernyataannya, bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia" telah terbentuk secara de facto dan de jure. Dalam pidatonya yang paling penting sekali, presiden Soekarno mengeluarkan pernyataan bahwa, tinggal Irian Barat saja yang belum masuk ke dalam, "Negara Republik Indonesia".¹⁴⁵

Pernyataan presiden Soekarno tersebut, bila di saji, jelas beliau tidak mengakui keberadaan RMS di Maluku. Nada pidato amat jelas bahwa Soekarno menganggap Maluku

¹⁴⁴Ibid., hlm. 772.

¹⁴⁵Ibid., hlm. 772.

sudah masuk RI dan ini berarti beliau menganggap bahwa RMS itu tidak ada. Masalah RMS tersebut akhirnya dapat diselesaikan oleh kaum militer di bawah kolonel Kawilarang pada tanggal 27 Oktober 1950 (dalam arti akhir oktober itu, Maluku secara de facto masuk RI). Kawi larang sebagai Indonesia Timur, menggantikan pejabat lama, Letnan Kolonel Mokoginta yang ditarik kembali ke Jakarta.¹³⁶

Di sela-sela ketegangan antara pasukan APRIS dan pasukan KNIL serta KL, muncul berita yang sangat menggembirakan dari pihak pemerintah Negara Indonesia Timur. Presiden (Sukowati) pada tanggal 21 April 1950 kepada pemerintah pusat NIT (RIS) di Jakarta mengeluarkan suatu pernyataan dari Negara Indonesia Timur, yang berisi bahwa pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT) bersedia dimasukkan ke dalam suatu "Negara Kesatuan", dengan syarat Negara Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta ikut dimasukkan ke dalam pembentukan "Negara Kesatuan" tersebut. Dalam hal ini berarti Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan diganti "Negara Kesatuan Indonesia". Dan beberapa minggu berikut seluruh daerah bagian Negara Indonesia, Timur menyatakan pernyataan yang sama dengan pemerintah NIT di Makasar, yaitu meleburkan diri menjadi daerah "Negara Kesatuan",

¹³⁶ Sejarah Militer KODAM V Siliwangi, *op. cit.*, hlm. 410-411.

yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jakarta. Hanya satu daerah NIT yang tidak mengeluarkan pernyataan serupa, yaitu Maluku Selatan, tidak memberi pernyataan apapun juga.¹⁴⁷

Peristiwa pernyataan semua daerah-daerah bagian NIT untuk masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia, merupakan suatu bukti kehendak kuat dari rakyat NIT dan beberapa pemimpinnya untuk membubarkan NIT. Pernyataan presiden Sukowati menjadi lonceng kehancuran cita-cita kaum federalis yang tetap berdaulat. Dan sebagai puncak kemenangan kaum unitaris secara menyeluruh.

Sementara perjuangan menumbangkan NIT gencar terjadi di seluruh wilayah NIT. Di ibukota NIT (Makasar) setelah pernyataan presiden Sukowati pada tanggal 21 April 1950, maka Dr. Soumakil dan anak buahnya yang merancang peristiwa "Andi Azis", pada tanggal 25 April 1950 melarikan diri ke Ambon (Maluku Selatan) lalu di sini denan pengaruh kekuatan KNIL yang ada, maka ia memproklamasikan berdirinya "Negara Republik Maluku Selatan", yang lepas dari pengaruh NIT dan RIS.¹⁴⁸

Pemerintah RIS sangat menyesalkan tindakan Dr. Soumokil CS, yang telah menjelekan nama pemerintah dan menghayut rakyat Maluku Selatan terutama kelompok KNIL

¹⁴⁷George Mc Kahin, *op. cit.*, hlm. 460.

¹⁴⁸ULF. Sundhaussen, *op. cit.*, hlm. 96.

yang memang banyak di sana guna melakukan tindakan menentang pemerintah pusat. Dengan penuh masalah ini dengan tindakan yang halus (tidak memaksakan pendapat) yaitu dengan mengirimkan delegasi-delegasi ke Maluku selatan untuk berunding dengan para pemimpinnya, terutama yang anggota RMS (Republik Maluku Selatan).

Sebelum peristiwa RMS terjadi, Dr. Soumokil telah dischors oleh pemerintah NIT pada tanggal 22 April 1950, sebab dicurigai melakukan tindakan subversi melawan pemerintah. Pihak Belanda membenarkan bahwa Soumokil telah pergi ke Maluku Selatan dengan menumpang suatu pesawat pembom Belanda B-25. Begitu jelas bahwa Belanda ada dibelakang dari lahirnya "Republik Maluku Selatan".¹⁴⁹

Biang keladi timbulnya RMS adalah Dr. Soumokil. Diantara tokoh di Maluku Selatan yang berhasil melarikan diri dari Ambon adalah B. Nazar dua hari setelah proklamasi RMS. Sesampai di Makasar memberi kesaksian kepada pemerintah pusat (RIS) bahwa ;

Proklamasi R.M.S., segala sesuatunya, berjalan dengan kekerasan. Untuk upacara proklamasi R.M.S. para anggota Dewan Maluku Selatan diangkut dengan paksa dan tempat upacara dikawal keras oleh militer. Kepada Daerah Maluku Selatan sendiri dalam upacara proklamasi itu dengan kesadaran menyatakan, bahwa ia sendiri tidak sanggup menjadi Kepala Negara dan juga diterangkannya bagaimana kesukaran-kesukarannya Maluku Selatan ini menjadi suatu negara. Tetapi ia segera mendapat tentangan dari yang hadir, yaitu

¹⁴⁹ Yusuf A. Luar, *RMS, op. cit.*, hlm. 22-23.



militer dan kaum Persatuan Timur Besar yang disertai dengan sorak-sorai: "Seret saja, siapa tidak mau, cengang saja".

Menerangkan pula bahwa segera sesudah dilakukan proklamasi itu penangkapan terhadap anggota-anggota Partai Indonesia Merdeka (P.I.M.) dilakukan secara kasar. Umpamanya Ketua P.I.M. W. Reawary sewaktu ditangkap, dipukuli sehingga mukanya bercacat-cacat. Juga golongan lain, terutama yang beragama Islam, tidak luput dari penangkapan-penangkapan itu. Juga para pemimpin-pemimpin pergerakan ditangkap dan disiksa, KNIL yang tidak turut aksi mereka, lucuti. Keadaan kota sunyi dan penduduk mengungsi.¹⁵⁰

RMS didirikan dengan paksaan bukan kehendak rakyat sendiri. RMS berdiri sebab Dr. Sumokil mempunyai kekuatan untuk memaksakan kehendak, yaitu dukungan Belanda dan kaum militer KNIL.

Pemerintah RIS mengirimkan berturut-turut misi perdamaian ke Ambon untuk menyelesaikan masalah RMS. Pada tanggal 27 April 1950, rombongan misi perdamaian berangkat ke Maluku yang semua anggota misi adalah putra-putri Maluku sendiri. Rombongan itu terdiri, ketua Dr. Leimena, Pellaupessy, Ir. Putuhena dan Dr. Rehatta. Misi ini pada tanggal 1 Mei 1950 ditolak mentah-mentah oleh RMS. Dalam keterangan, Dr. Leimena berkata :

"Kami sesalkan bahwa mereka tidak mau menerima dan berbicara dengan kami yang datang melulu untuk merundingkan hingga soal Maluku dapat diselesaikan dengan baik untuk kepentingan dan keselamatan seluruh nusa dan bangsa. Saja persoonlijk merasa ini sangat menyedihkan...."¹⁵¹

¹⁵⁰ Ibid, hlm. 27-28.

¹⁵¹ Ibid, hlm. 64-65.

Peristiwa RMS di Maluku Selatan, menggugah 9 organisasi orang Maluku yang ada di Jawa untuk melakukan "Konferensi Maluku". Konferensi itu mereka laksanakan pada tanggal 12 dan 13 Juni 1950 di Semarang. Dalam konferensi mereka mendukung diadakannya misi perdamaian, namun bila gagal, mereka mengizinkan pemerintah RIS melakukan tindakan apapun terhadap RMS, asal hanya orang-orang RMS saja yang ditindak sementara rakyat yang tidak tahu apa-apa hendaknya dilindungi atau tidak ikut ditindak.¹⁵²

Konferensi Maluku di Semarang telah memberikan wewenang penuh bagi RIS untuk menyelesaikan masalah RMS. Setelah misi perdamaian yang berturut-turut dikirim pemerintah RIS gagal. Akhirnya demi keselamatan rakyat, bangsa dan negara APRIS dikerahkan guna menumpas RMS. Diantara pasukan ada diambil dari orang Indonesia Timur sendiri, yaitu Batalyon 3 Mei pimpinan Mayor A.H. Mengko dan Kapten (Pengkina) pasukan APRIS ini dipimpin Kolonel A.E. Kawilarang yang orang Indonesia Timur sendiri (Sulawesi). Dengan demikian RMS ditumpas oleh orang Indonesia Timur Sendiri.¹⁵³

¹⁵²Ibid., hlm. 65-66.

¹⁵³Bambang Suwondo, Sulawesi Utara. op.cit., hlm. 212.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V PENUTUP

Negara Indonesia Timur (NIT) berdiri pada tanggal 24 Desember 1946 dengan Presidennya Tjokorde Gde Rake Soekawati yang menjabat sebagai Presiden NIT hingga tanggal 16 Agustus 1950. Pada tanggal 16 Agustus 1950, Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) yaitu Ir. Soekarno, memproklamasikan berdirinya "Negara Kesatuan Republik Indonesia". NIT yang pada tanggal 12 Mei 1950 menyerahkan mandatnya kepada RIS guna membentuk suatu "Negara Kesatuan" maka pada tanggal 16 Agustus 1950 itu, NIT ikut dibubarkan, sebab Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terbentuk dengan proklamasi 16 Agustus 1950.

Banyak sebab yang dapat dikemukakan, "Mengapa integrasi NIT ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai terjadi?". Jauh sebelum Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949 perjuangan beberapa organisasi, baik politik maupun militer di NIT sudah ada, yang bertujuan guna membubarkan NIT dan berintegrasi ke "Negara Republik Indonesia" (RI) yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada masa RIS berdiri di tahun 1949 dan RI sebagai salah satu negara bagian RIS, salah satu contohnya LRRI (Laskar Rakyat Republik Indonesia), KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia), GAPKI (Gabungan Perjuangan Kemerdekaan

Indonesia), BPPI (Badan Pimpinan Pemuda Indonesia) dan lain-lain.

Faktor lain yang menyebabkan NIT mengambil langkah integrasi ke NKRI adalah : tidak sanggupnya lagi pemerintah NIT menghadapi tuntutan-tuntutan golongan unitaris yang dibantu oleh massa rakyat yang berdemonstrasi menuntut pembubaran NIT dan berintegrasi ke NKRI, yang sebelumnya merupakan NIT dan berintegrasi ke NKRI, yang sebelumnya merupakan RI di Yogyakarta. Pemerintah NIT tidak sanggup lagi mengendalikan rakyat yang melakukan teror bersenjata dengan pasukan laskar rakyatnya, yaitu LKRI dan LFP (Laskar Front Pemuda), serta laskar rakyat lain yang tidak punya nama. Mereka itu sering menyerang markas-markas KNIL dan polisi NIT atau melakukan pembunuhan terhadap polisi NIT dan KNIL.

Alasan lain, di dalam parlemen partai-partai lebih banyak yang pro-unitaris serta banyak anggota parlemen menginginkan terjadinya integrasi ke RI Yogyakarta atau setelah bulan Mei 1949 banyak yang ingin agar NIT integrasi ke NKRI yang akan dibentuk. Suara-suara DPR-DPR di daerah seluruh wilayah NIT pada tanggal 9 hingga 10 Mei 1949 minta integrasi ke NKRI, kecuali daerah Maluku Selatan. Namun begitu integrasi NIT ke NKRI sah, sebab suara mayoritas DPR-DPR di seluruh wilayah NIT menghendaki integrasi ke NKRI dan hanya satu daerah saja yang tidak mengeluarkan pernyataan apa pun yaitu Maluku Selatan.

Keinginan NIT berintegrasi ke NKRI, tidak dapat lepas kaitannya dengan kondisi pemerintahan dan negara Indonesia yang di saat itu dalam masa penuh pergolakan antara golongan federal dan unitaris, khususnya di pulau Jawa dan Madura dalam berdemonstrasi meminta pembubaran negara-negara bagian agar integrasi ke RI Yogyakarta di awal tahun 1950 di NIT dengan dukungan rakyat mulai ikut berani melakukan demonstrasi dan menentang pemerintah NIT, yang mulai nampak di pertengahan bulan Februari 1950.

Tuntutan kaum unitaris di Jawa untuk membubarkan negara-negara bagian mendapat jalan terang atau wadah nyata untuk membubarkannya, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 11, di bulan Maret 1950, yang sebelum adanya Peraturan Pemerintah di bulan Februari 1950 juga membantu proses pembubaran negara-negara bagian. Keluarnya Peraturan Pemerintah RIS dan Undang-Undang Darurat tentang perubahan susunan ketatanegaraan di atas, membuat kaum unitaris baik di Jawa maupun di NIT menjadi semakin berani menuntut pembubaran semua negara bagian. Di NIT para unitaris menuntut integrasi NIT ke RI Yogyakarta dan akhirnya ke NKRI. Pemerintah RI di Yogyakarta dengan presidennya Mr. Assat di alam kabinetnya menyatakan bahwa, "kembali ke NKRI adalah tujuan pokok kabinet RI". Pernyataan kaum republikan seperti Moh. Yamin, Syahrir, Sultan Hamengku Buwono IX di dalam media massa, sedikitnya memberi dukungan moral

(semangat) bagi kaum unitaris di NIT, yang sudah lama ada sebelum RIS terbentuk atau sejak NIT berdiri 1946.

Selain pemerintah PM. Moh. Hatta (RIS) memberi kemudahan bagi kaum unitaris dengan mengeluarkan *Peraturan Pemerintah* dan *Undang-Undang Darurat* di tahun 1950. Presiden RIS (Ir. Soekarno), jauh hari sebelum RIS terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949, beliau sudah memberikan dukungan moril dan semangat bagi kaum unitaris guna tetap berusaha menjadikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan bukan Serikat. Hal tersebut dilakukan Presiden Soekarno nampak jelas bila kita membaca pidato ulang tahun kemerdekaan beliau pada tanggal 17 Agustus 1946 dan 17 Agustus 1949 yang jelas berisi anjuran beliau agar seluruh bangsa Indonesia berusaha menciptakan lagi negara kesatuan seperti yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Pidato Presiden Soekarno itu berkumandang pula di NIT dan didengarkan semua orang yang memiliki radio atau membaca surat kabar. Sehingga tidak keberatan bila kita mengatakan bahwa RI Yogyakarta, pemerintah RIS, dan Presiden Soekarno ikut memberikan sedikit sumbangan bagi integritas NIT dan NKRI.

Kemudian, "Bagaimana proses integritas NIT ke NKRI itu?". Berdasar sumber informasi sejarah yang diperoleh, perjuangan guna terjadinya integrasi NIT ke NKRI amatlah gigih dilakukan kaum unitaris NIT yang didukung rakyat yang memang lebih banyak mendukung kaum unitaris daripada terhadap kaum federal, hal ini nampak bila kita tinjau

kembali uraian pada bab sebelumnya khususnya tiga dan empat. Dari situ tidaklah berlebihan bila kita katakan proses integrasi NIT ke NKRI adalah murni dari kehendak rakyat NIT sendiri. Meskipun ada bantuan dari RIS dan RI, namun bantuan itu hanyalah bersifat dorongan moral dan pemberian jalan pemuda saja, seperti Undang-Undang Darurat, dalam arti tidak ada paksaan atau tekanan dari luar NIT.

Keberanian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di masing-masing daerah wilayah NIT, serta demonstrasi terus-menerus dari rakyat dan kaum unitaris serta munculnya organisasi baik politik atau militer yang memperjuangkan tercapainya integrasi, maka jelas membuktikan murninya proses dan integrasi itu dari kehendak rakyat NIT sendiri. Sehingga sebagai akhir kata, dapat dikatakan bahwa, "Integrasi NIT ke NKRI adalah kehendak rakyat NIT sendiri, tanpa campur tangan pihak dari luar NIT".

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

Adams, Cindy

1966 Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia
Jakarta, Pn. Gunung Agung.

Agung, Ide Anak Agung Gde

1985 Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik
Indonesia Serikat, Yogyakarta, UGM, Univ.
Press.

Budiardjo, Miriam

1982 Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Pn.
Gramedia.

Cribb, Bridson Robert

1990 Gejolak Revolusi Di Jakarta 1945- 1949,
Jakarta, Pn. Gramedia.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 12,
Jakarta, 1990.

Feith, Herbert

1962 The Decline Of Constitutional Democracy In
Indonesia, Ithaca, New York, Cornell
University.

Gani, Sulistyati Ismail

1984 Pengantar Ilmu Politik, Jakarta, Pn. Ghalia
Indonesia.

Harvey, Barbara Sillars

1989 Pemberontakan Kahar Muzakkar. Dari Tradisi Ke
DI/TII, Jakarta, Pn. PT. Pustaka Utama
Grafiti.

1984 PERMESTA Pemberontakan Setengah Hati,
Jakarta, Pn.-PT. Grafika Press.

Hatta, Mohammad

1979 Memoir, Jakarta, Tintamas.

Joeniarto

1990 Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia,
Jakarta, Pn. Bumi Aksara.

Kahin, George Mc.T

1970 Nationalism And Revolution In Indonesia,
Ithaca , London, Cornell University Press.

Kamaruddin

1992 Metodologi Penelitian Skripsi Dan Tesis,
Bandung, Pn. Angkasa.

Kartodirdjo, Sartono

1992 Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi
Sejarah, Jakarta, Pn. Gramedia.

Kementerian Penerangan RI

1953 Republik Indonesia Propinsi Sulawesi,
Jakarta.

1953 Republik Indonesia Propinsi Sunda Kecil,
Jakarta.

K.H. Ramadhan

1988 A.E. Kawilarang. Untuk Sang Merah Putih.
Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Kodam VI Siliwangi, Sejarah Militer

1968 Siliwangi Dari Masa Ke Masa. Jakarta, Pn.
Fakta Mahjuma.

Leirissa, Richard, Z

1975. Maluku dalam Perjuangan Nasional Indonesia.
Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Universitas
Indonesia Press, Jakarta.

Lubis, Syamsudin

1954 Sulawesi Selatan. Jakarta, Pn. Analisa.

Moedjanto, G

1980 Indonesia Abad Ke-20, Jilid II, Yogyakarta,
Pn. Kanisius.

Nasution, A.H

1966 Sejarah Perjuangan Nasional Di Bidang
Bersenjata. Jakarta, Pn. Buku Mega.

Noer, Deliar

1990 Mohammad Hatta Biografi Politik, Jakarta,
LP3ES.

Notosoetardjo

1956 Dokumen-Dokumen KMB Sebelum, Sesudah, dan
Perkembangannya, Jakarta, Pn. Endang.

Nugroho, Tjahyadi

1984 Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia,
Semarang, Pn. - Yayasan Telapak.

Pattikayhatu, John

1979 Sejarah Revolusi Kemerdekaan Di Daerah Maluku, Maluku, P & K.

Pemerintah RI

— Lembar Negara Republik Indonesia, Tahun 1950, No. 1 -85, Jakarta.

Pendit, S. Nyoman

1979 Bali Berjuang, Jakarta, Pn. Gunung Agung.

Puar, Yusuf.A

1956 Peristiwa Republik Maluku Selatan, Jakarta, Pn. Bulan Bintang.

Raliby, Osman

1953 Documenta Historica, Sejarah Dokumenter Dari Pertumbuhan Dan Perjuangan Negara Republik Indonesia, Jakarta, Pn. Bulan Bintang.

Rose, Mavis

1987 Indonesia Free, A Political Biography Of Mohammad Hatta, Ithaca, Cornell University.

Said, Mohammad

— Pedoman Untuk Melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat, II, Surabaya, Permeta. (Kumpulan Pidato Proklamasi Soekarno).

Salah, Wantjik. K

1978. Kitab Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, Jakarta, Pn. PT Gramedia. 1978

Smit, C

1986 Dekolonisasi Indonesia, Jakarta, Pustaka Azet.

Sudjana, Mana dan Ibrahim

1989 Penelitian Dan Penilaian Pendidikan,
Bandung, Pn. Sinar Baru.

Sundhaussen, ULF

1986 Politik Militer Indonesia 1945- 1947,
Jakarta, LP3ES.

Suryabrata, Sumadi

1991 Metodologi Penelitian, Jakarta, Pn.
Rajawali.

Suwondo, Bambang, H, dkk

1978 Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat,
Jakarta, P & K.

1982 Sejarah Kemerdekaan Sulawesi Tengah,
Jakarta, P & K.

1983 Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi
Utara, Jakarta, P & K.

Tantri, K" Tut

1965 Revolusi Di Nusa Damai, Jakarta, Pn. Gunung
Agung.

Tobing, K.M.L

1987 Perjuangan Politik Bangsa Indonesia KMB,
Jakarta, CV. Haji Masagung.

Yahya Muhaimin, Amin Rais, Sugiono, Ilin Halina,
Usmar Salam, Kamus Istilah Politik, Jakarta,
P & K, 1985.

B. Majalah.

Moedjanto, G

1992 "Tipe Penjajahan Belanda Di Indonesia",
SPPS, Seri XVIII, No. 2, April, Yogyakarta,
Univ. Sanata-Dharma Press.

Surat Kabar.

Harian Indonesia, 13 Januari 1950.

Harian Umum, 29 Maret 1950.

Harian Umum, 30 Maret 1950.

Menara, 22 Pebruari 1950.

menara, 17 Desember 1950.

Pikiran Rakyat, 3 Pebruari 1950.

Pikiran Rakyat, 19 Juni 1950.

Rakyat, 6 April 1950.

Rakyat, 11 April 1950.

Tanah Air, 1 Maret 1950.

Tanah Air, 17 Maret 1950.

Tanah Air, 18 Maret 1950.

Warta Indonesia, 20 Pebruari 1950.

LAMPIRAN



LAMPIRAN : I 155)

INDUK PERSETUDJUAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Delegasi-delegasi :

1. Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federaal Overleg).
3. Keradjaan Nederland,

menimbang bahwa mereka telah bersidang dalam Konperensi Medja Bundar supaya secepat mungkin dijapai perdamaian yang baik dan kekal dalam pertikaian Indonesia dengan jalan memperoleh persetujuan antara peserta-peserta tentang ijara bagaimana akan diserahkan kedaulatan yang sesungguhnya, sempurna dan tiada bersyarat kepada Republik Indonesia Serikat sesuai dengan asas-asas Renville ; menimbang bahwa mereka telah menjapai tujuan itu dalam kerdja-sama yang baik

menimbang bahwa Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia dalam peristiwa itu telah memberikan bantuan yang berharga

telah memutuskan sebagai berikut

I. Sekalian hasil Konperensi Medja Bundar termaktublah dalam rantjangan-rantjangan persetujuan dan surat-surat ; segala dokumen itu dilampirkan pada resolusi ini :

II. A. Rantjangan-rantjangan persetujuan sebagai berikut :

1. Rantjangan Piagam penjerahan kedaulatan ;
2. Rantjangan Statut-Um, termasuk pula lampiran dan persetujuan-persetudjuan khusus tentang pokok-pokok yang terpenting hal kerdja-sama dikemudian hari ;
3. Rantjangan persetujuan Perpindahan, termasuk persetujuan-persetudjuan khusus berisi peraturan pokok-pokok yang perlu diurus sebagai akibat penjerahan kedaulatan.

B. Tentang beberapa soal yang tersendiri, Delegasi-delegasi telah saling mempermaklumkan masing-masing pendirian dengan surat-menjurat.

III. Dokumen-dokumen yang disebut pada A dan B disusun dalam bahasa Indonesia dan Belanda

yang akan menentukan djikalau ada terdapat perbedaan arti antara naskah Indonesia dan naskah Belanda.

IV. Penerimaan resolusi ini oleh daerah-daerah yang berhimpun dalam Republik Indonesia Serikat dipihak yang satu dan oleh Keradjaan Nederland dipihak yang lain akan dipandang ratifikasi dokumen-dokumen yang dilampirkan pada resolusi ini. Ratifikasi oleh salah satu pihak tidak akan mempunyai kekuatan, djika salah satu dari pihak yang lain tidak meratifikasi resolusi ini.

V. Persetujuan-persetudjuan yang disebut pada II akan mulai berlaku pada saat penjerahan kedaulatan ; penjerahan itu akan dilaksanakan dengan segala upatjara pada sidang di Amsterdam, selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949.

VI. Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia atau suatu badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang lain akan mengawasi di Indonesia penepatan segala persetujuan tertjapai dalam Konperensi Medja Bundar.

Delegasi Pemerintah Republik
Indonesia,
MOHAMMAD HATTA,
Ketua

Delegasi Pertemuan untuk
Permusjawaratan Federal
(Bijeenkomst voor Federaal
Overleg)
HAMID,
Ketua.

Delegasi Keradjaan Nederland,
J. H. VAN MAARSEVEEN,
Ketua,

Ketua Konperensi Medja
Bundar,
W. DREES.
Sekertaris-Umum
Konperensi Medja Bundar,
M. J. PRINSEN.

Komisi Perserikatan Bangsa-
bangsa untuk Indonesia,
R. HERREMANS,
Ketua-minggu.

H. MERLE COCHRAN,
Anggota.

TH. K. CRITCHLEY,
Anggota.

J. A. ROMANOS,
Sekertaris I.

Tjataan. Naskah induk-persetudjuan berbahasa Belanda pertama-tama ditandatangani oleh Ketua Delegasi Keradjaan Nederland, naskah berbahasa Indonesia pertama-tama oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia dan naskah berbahasa Inggeris pertama-tama oleh Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

IAMPIRAN : II 156)

RANTJANGAN PIAGAM PENJERAHAN
KEDAULATAN

Pasal 1

1. Keradjaan Néderland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepuhinja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dengan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara jang merdeka dan berdaulat.
2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja ; rantjangan konstitusi itu telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Néderland.
3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949.

Pasal 2

Tentang keresidenan Irian (Nieuw-Guinea) telah tertjapai persetudjuan sebagai berikut :

- a. disebabkan hal persesuaian antara pendirian masing-masing pihak tentang Irian belum dapat ditjapai, sehingga soal itu masih mendjadi pokok pertikaian ;
- b. disebabkan keharusan Konperensi Medja Bundar diachiri dengan berhasil pada tanggal 2 Nopember 1949 ;
- c. mengingat faktor penting-penting jang harus diperhatikan pada pemetjahan masalah Irian itu ;
- d. mengingat singkatnja penjelidikan jang telah dapat diadakan dan diselesaikan perihal soal-soal jang bersangkutan dengan masalah Irian itu ;
- e. mengingat sukarnja tugas-kewadajiban jang akan dihadapi dengan segera oleh peserta Uni, dan
- f. mengingat kebulatan hati pihak-pihak jang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaya semua perselisihan jang mungkin ter-njata kelak atau timbul diselesaikan dengan djalan patut dan rukun, maka status quo keresidenan Irian (Nieuw-Guinea) tetap berlaku seraja ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penjerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan-kenegaraan Irian akan diselesaikan dengan djalan perundingan antara Republik Indónesia Serikat dan Keradjaan Néderland.

LAMPIRAN : III 157)

73

Nr 3, 1950

PIAGAM-PERSETUDJUAN

*Antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi
Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal
(Bijeenkomst Federaal Overleg) tentang rentjana*

KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Pada hari Sabtu tanggal dua-puluh sembilan bulan Oktober tahun seribu sembilan-ratus empat-puluh sembilan kami Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst Federaal Overleg) yang melangsungkan persidangan kami di Scheveningen.

Setelah mempertimbangkan dan menjetudjui pikiran-pikiran ketatanegaraan yang disusun oleh kedua Panitia Ketatanegaraan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheveningen dan 's-Gravenhage semendjak bulan Agustus sampai akhir bulan Oktober tahun 1949:

Dengan mendjung tinggi segala putusan kebulatan yang diambil dalam Konperensi Inter-Indonesia dalam sidang-sidang di kota Jogjakarta dan Djakarta dalam bulan Djuli dan Agustus 1949:

Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rentjana Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami

MENJATAKAN

bahwa kami menjetudjui naskah Undang-undang Dasar Peralihan bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan pada Piagam-Persetudjuan ini.

Kemudian dari pada itu maka untuk membuktikan itu kami kedua Delegasi dengan bersaksikan Tuhan Yang Maha-Esa terhadap sikap-sutji dan kesungguhan-keinginan Bangsa dan Tanah Air Indonesia Serikat membubuhkan tanda-tangan parap kami pada Piagam-Persetudjuan ini:

a. Untuk Republik Indonesia,

Pemimpin Delegasi Republik Indonesia.

DRS. MOH. HATTA.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1950, Nr 3

74

b. Untuk Daerah-daerah-Bagian yang bekerdja-sam dalam perhubungan B.F.O.

Utusan Kalimantan-Barat.

SULTAN HAMID II,
Ketua B.F.O.

Utusan Indonesia Timur.

IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG,
Wakil Ketua B.F.O. pertama.

Utusan Madura.

DR. SOEPARMO,
Wakil Ketua B.F.O. kedua.

Utusan Bandjar.

A. A. RIVAL.

Utusan Bangka.

SALEH ACHMAD.

Utusan Belitung.

K. A. MOH. JOESOFF.

Utusan Dajak Besar.

MOHRAN BIN HADJI MOH. ALL.

Utusan Djawa Tengah.

DR. R. SUDIPTO.

Utusan Djawa Timur.

R. TG. DJI-WITO.

Utusan Kalimantan Tenggara.

M. JAMANI.

75

Nr 3, 1950

Utusan Kalimantan Timur.

ADJI PANGERAN SOSRONEGORO.

Utusan Pasundan.

MR. R. TG. DJUMHANA WIRIAATMADJA.

Utusan Riau.

RADJA MOHAMMAD.

Utusan Sumatera Selatan.

ABDUL MALIK.

Utusan Sumatera Timur.

RADJA KALIAMSAH SINAGA.

LAMPIRAN : IV 158)



PIAGAM PENANDA TANGAN
KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA SERIKAT

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1950, Nr 3

4

Pada hari, Rebo, tanggal empat-belas Desember, tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan, kami, Wakil Pemerintah Republik Indonesia dan Wakil-wakil Pemerintah Daerah Bahagian dalam perhubungan Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal, berkumpul di Djakarta, Pegangsaan Timur, nomor lima puluh enam,

Menjatakan:

bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah masing-masing Daerah Bahagian tersebut, demikian pula Komite Nasional Indonesia Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari masing-masing Daerah Bahagian,

setelah mempelajari dan mempertimbangkan naskah Undang-undang Dasar Sementara berisi Konsitusi Republik Indonesia Serikat, yang disetujui oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Daerah-daerah Bahagian tersebut diatas di Scheveningen, pada hari Sabtu, tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober, tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan,

menyetujui naskah Undang-undang Dasar Sementara berisi Konsitusi Republik Indonesia Serikat,

Kemudian dari pada itu, maka berdasarkan kekuasaan yang diberikan pada kami oleh masing-masing Pemerintah kami, untuk membuktikan itu, kami membubuh tanda-tangan kami pada Piagam Penanda-tanganan ini,

Untuk:

Republik Indonesia,

MR. SOESANTO TIRTOPRODJO.

Kalimantan Barat,

SULTAN HAMID II.

Indonesia Timur,

IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG.

5

Nr 3, 1950

Madura,

PANGERAN ADIPATI ARIO TJAKRANINGRAT.

Bandjar,

MOHAMMAD HANAFIAH.

Bangka,

MOHAMMAD JUSUF RASIDI.

Belitung,

K. A. MOHAMMAD JUSUF.

Dajak Besar,

MUIIRAN BIN HADJI ALL.

Djawa Tengah,

DR. R. V. SUDJITO.

Djawa Timur,

RADEN SOEDARMO.

Kalimantan Tenggara,

M. JAMANI.

Kalimantan Timur,

A. P. SOSRONEGORO.

Pasundan,

MR. DJUMHANA WIRIAATMADJA.

Riau,

RADJA MOHAMMAD.

Sumatera Selatan,

ABDUL MALIK.

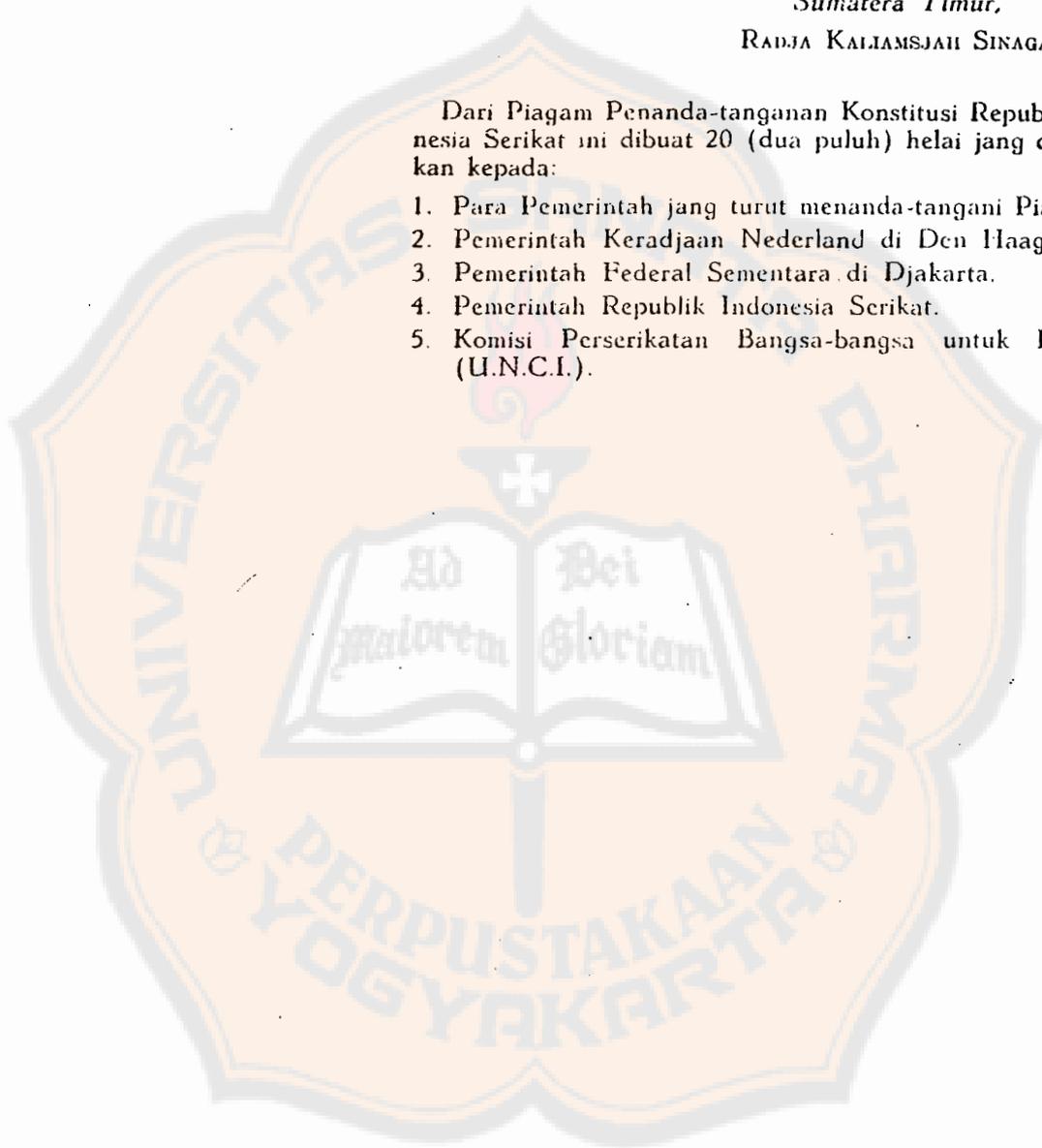
1950, Nr 3

6

Sumatera Timur,
RADJA KALIJAMSJAH SINAGA.

Dari Piagam Penanda-tanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini dibuat 20 (dua puluh) helai jang disampaikan kepada:

1. Para Pemerintah jang turut menanda-tangani Piagam ini.
2. Pemerintah Keradjaan Nederland di Den Haag.
3. Pemerintah Federal Sementara di Djakarta.
4. Pemerintah Republik Indonesia Serikat.
5. Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia (U.N.C.I.).



LAMPIRAN : v 159)

7

Nr 3, 1950



3. Murid-murid sekolah partikulir memenuhi sjarat-sjarat kebaikan-kebaikan menurut undang-undang bagi pengadjaran umum, haknja sama dengan hak murid-murid sekolah umum.

4. Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewadjaban beladjar jang umum.

Pasal 40.

Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memadjukan kebersihan umum dan kesehatan rakjat.

Pasal 41.

1. Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui.

2. Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada Undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis.

BAB II.

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN DAERAH-
DAERAH-BAGIAN.

BAGIAN I.

DAERAH-DAERAH-BAGIAN.

Babakan 1. Ketentuan umum.

Pasal 42.

Sambil menunggu penyelesaian susunan Republik Indonesia Serikat sebagai federasi antara negara-negara-bagian jang saling sama-martabat dan saling sama-hak, maka daerah-daerah-bagian jang tersebut dalam pasal 2 adalah saling sama-hak.

Pasal 43.

Dalam penyelesaian susunan federasi Republik Indonesia Serikat maka berlakulah asas-pedoman, bahwa kehendak Rakjatlah didaerah-daerah bersangkutan jang dinjatakan dengan merdeka menurut djalan demokrasi, memutuskan status jang kesudahannja akan diduduki oleh daerah-daerah tersebut dalam federasi.

Pasal 44.

Perubahan daerah sesuatu daerah-bagian, begitu pula masuk kedalam atau menggabungkan diri kepada suatu daerah-bagian jang telah ada, hanya boleh dilakukan oleh sesuatu daerah — sungguhpun sendiri bukan daerah-bagian — menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang federal, dengan mendjundjung asas seperti tersebut dalam pasal 43. dan sekadar hal itu mengenai masuk atau menggabungkan diri, dengan persetujuan daerah-bagian jang bersangkutan.

Pasal 45.

Tataan dan tjara mendjalankan pemerintahan daerah-daerah-bagian haruslah menurut tjara demokrasi, sesuai dengan asas-asas jang termaktub dalam Konstitusi ini.

Babakan 2. Negara-negara.

Pasal 46.

1. Negara-negara jang baru dibentuk membutuhkan pengakuan undang-undang federal.

2. Undang-undang federal tidak memberikan status negara kepada daerah-daerah jang dipandang tidak akan sanggup melaksanakan dan memenuhi hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewadjaban suatu negara.

Pasal 47.

Peraturan-peraturan ketatanegaraan negara-negara haruslah mendjamin hak atas kehidupan-rakjat sendiri kepada pelbagai persekutuan-rakjat didalam lingkungan daerah mereka itu dan harus pula mengadakan kemungkinan untuk mewujudkan hal itu setjara kenegaraan dengan aturan-aturan tentang penjusunan persekutuan itu setjara demokrasi dalam daerah-daerah otonomi.

Pasal 48.

1. Peraturan-peraturan ketatanegaraan negara-negara tidak akan memuat ketentuan jang seluruhnja atau sebagian berlawanan dengan Konstitusi ini.

2. Peraturan-peraturan ketatanegaraan tersebut atau perubahan-perubahan dalamnja baru mulai berlaku sesudah ditimbang oleh Pemerintah federal.

Untuk maksud itu maka peraturan-peraturan tersebut sesudah selesai dibuat, dengan selekas-lekasnja dikirimkan oleh Pemerintah negara kepada Pemerintah federal.

3. Sekiranya, menurut timbangan Pemerintah federal ada sesuatu jang berlawanan sebagai dimaksud dalam ayat 1, maka dalam dua bulan sesudah menerima surat-surat itu Pemerintah federal menjampaikan hal itu kepada Pemerintah negara dan mengundangnya supaya bertindak membuat perubahan.

4. Apabila Pemerintah negara tetap melalaikan menurut petunjuk-petunjuk jang dimaksud dalam ayat diatas seluruh atau sebagiannja, ataupun, apabila Pemerintah negara berpendapat bahwa petunjuk-petunjuk itu tak tepat diberikan, maka baik Pemerintah federal maupun Pemerintah negara boleh meminta keputusan tentang itu kepada Mahkamah Agung Indonesia dan keputusan ini bersifat mengikat.

5. Apabila Pemerintah federal memberitahukan kepada Pemerintah negara dalam waktu jang tersebut dalam ayat 3, bahwa peraturan ketatanegaraan atau perubahan dalamnja jang dipertimbangkan kepadanya mendapat persetujuannja, ataupun dalam waktu tersebut tidak memaklumkan timbangan apa-apa, maka peraturan ketatanegaraan itu dipandang telah mendapat pengakuan Pemerintah federal sebagai peraturan ketatanegaraan negara itu jang sah, ataupun perubahan tersebut dianggap telah diakuinja sebagai termasuk dalam peraturan ketatanegaraan Negara itu jang sah dan dalam hal demikian maka peraturan ketatanegaraan itu lalu didjaminja: ketentuan ini tidak mengurangi jang ditentukan dalam Bab IV. Bagian III.

Babakan 3. Satuan-satuan kenegaraan jang tak tegak sendiri jang bukan negara.

Pasal 49.

Kedudukan dalam federasi bagi satuan-satuan kenegaraan jang tegak sendiri dan jang bukan berstatus negara, diatur dengan undang-undang federal.

Babakan 4. Daerah-daerah jang bukan daerah-bagian dan distrik federal Djakarta.

Pasal 50.

1. Pemerintahan atas daerah-daerah jang diluar lingkungan daerah sesuatu daerah-bagian, dan atas distrik federal Djakarta dilakukan oleh alat-alat-perengkapan Republik Indonesia Serikat menurut aturan-aturan jang akan ditetapkan dengan undang-undang federal.

2. Daerah-daerah-bagian jang masuk bilangan untuk itu, boleh disertakan dalam pemerintahan itu dengan persetujuan pemerintahnja.

BAGIAN II.

PEMBAGIAN PENJELENGGARAAN-PEMERINTAHAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DENGAN DAERAH-DAERAH-BAGIAN.

Babakan 1. Pembagian penjelenggaraan-pemerintahan.

Pasal 51.

1. Penjelenggaraan-pemerintahan tentang pokok-pokok jang terdaftar dalam lampiran Konstitusi ni dibebankan semata-mata kepada Republik Indonesia Serikat.

2. Daftar lampiran penjelenggaraan-pemerintahan jang tersebut dalam ayat 1 diubah, baik atas permintaan daerah-daerah-bagian bersama-sama ataupun atas inisiatip Pemerintah federal sesudah mendapat persesuaian dengan daerah-daerah-bagian bersama-sama, menurut atjara jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

3. Perundang-undangan federal selandjutnja akan mengambil segala tindakan jang perlu untuk mengurus penjelenggaraan-pemerintahan jang dibebankan kepada federasi dengan semestinja.

4. Segala penjelenggaraan-pemerintahan jang tidak masuk dalam penetapan pada ayat-ayat diatas adalah kekuasaan daerah-daerah-bagian semata-mata.

Pasal 52.

1. Daerah-bagian berhak mendapat bagian jang sebesar-besarnja dalam melaksanakan penjelenggaraan-pemerintahan federal oleh perlengkapan daerah-bagian itu sendiri.

Untuk itu maka Republik Indonesia Serikat sedapat-dapatnja meminta bantuan daerah-daerah-bagian.

2. Apabila Republik Indonesia Serikat menuntut bantuan daerah-bagian untuk melaksanakan peraturan-peraturan federal, maka daerah-bagian wadajib memberikan bantuan itu.

3. Daerah-daerah-bagian melaksanakan pemerintahan ikut-serta jang ditetapkan dalam pasal ini sesuai dengan pendapat lebih tinggi alat-alat-perengkapan federal jang bersangkutan.

Pasal 53.

Dalam menjelenggarakan tugas-pemerintahannya daerah-daerah-bagian dapat bekerdja bersama menurut aturan-aturan umum jang ditetapkan undang-undang federal; aturan-aturan itu menentukan pula tjampur-tangan Republik Indonesia Serikat jang boleh djadi dilakukan dalam hal itu.

Pasal 54.

1. Penjelenggaraan seluruh atau sebagian tugas-pemerintahan suatu daerah-bagian oleh Republik Indonesia Serikat atau dengan kerdja-sama antara alat-alat-perengkapan Republik Indonesia Serikat dan alat-alat-perengkapan daerah-bagian jang bersangkutan, hanjalah dapat dilaksanakan atas permintaan daerah-bagian jang bersangkutan itu.

Bantuan Republik Indonesia Serikat itu sedapat mungkin terbatas pada tugas-pemerintahan jang melampaui tenaga daerah-bagian itu.

2. Untuk memulai dan menjelenggarakan tugas-pemerintahan sesuatu daerah-bagian dengan tiada permintaan jang bermaksud demikian, Republik Indonesia Serikat hanya berkuasa dalam hal-hal jang akan ditentukan oleh Pemerintah federal dengan persesuaian Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat, yakni apabila daerah-bagian itu sangat melalaikan tugasnja, dan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Babakan 2. Perhubungan keuangan.

Pasal 55.

Undang-undang federal menentukan pendapatan-pendapatan jang, sebagai pendapatan federasi sendiri, masuk per-

bendaharaan Republik Indonesia Serikat; sekalian pendapatan jang lain, sekadar menurut hukum tidak mendjadi bagian persekutuan-hukum bawahan, masuk semata-mata untuk kegunaan perbendaharaan daerah-bagian, sebagai pendapatan sendiri bagi daerah-daerah itu.

2. Pada pembagian pendapatan-pendapatan jang dimaksud ajat diatas diusahakan mentjapai perimbangan, sehingga baik Republik Indonesia Serikat maupun daerah-daerah-bagian berdaja membajar segala pembajaran jang bersangkutan dengan penjelenggaraan-pemerintahannya, dari pendapatan-pendapatan sendiri.

3. Dengan tidak mengurangi dasar seperti tersebut dalam ajat jang lalu maka pembagian pendapatan-pendapatan seboleh-bolehnja disesuaikan dengan pembagian penjelenggaraan-pemerintahan seperti ditentukan dalam babakan diatas.

4. Oleh undang-undang federal dapat ditentukan bahwa atas pajak-pajak daerah-daerah-bagian dipungut opcenten untuk keperluan federasi.

Pasal 56.

1. Menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang federal kekurangan uang pada dinas biasa dalam anggaran daerah-daerah-bagian ditutup dengan bantuan-biaya dari kas perbendaharaan Republik Indonesia Serikat.

2. Kekurangan uang pada dinas luar biasa boleh ditutup dengan bantuan-biaya jang sedemikian.

Pasal 57.

1. Pindjaman uang diluar negeri dilaksanakan hanja semata-mata oleh Republik Indonesia Serikat.

2. Atas permintaan daerah-bagian, Republik Indonesia Serikat boleh melaksanakan pindjaman uang diluar negeri untuk keperluan daerah-bagian itu.

3. Untuk melaksanakan pindjaman uang dalam negeri, daerah-daerah-bagian membutuhkan pensahan lebih dahulu dari Republik Indonesia Serikat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1950, Nr 3

26

Pasal 58.

1. Anggaran daerah-daerah-bagian yang kekurangannya ditutup dengan memberatkan kas-perbendaharaan federal atau dengan jalan pindjaman, membutuhkan pensahan Pemerintah federal.

2. Dalam hal-hal yang ditunjuk oleh undang-undang federal dan menurut aturan-aturan undang-undang itu, pensahan yang dimaksud dalam ayat tadi dapat disangkutkan kepada mengadakan perubahan-perubahan dalam anggaran yang bersangkutan itu menurut petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu oleh Pemerintah federal sepakat dengan Senat.

Pasal 59.

1. Anggaran daerah-daerah-bagian selain dari pada yang tersebut dalam pasal 58 tidaklah ditjampuri oleh Republik Indonesia Serikat.

2. Akan tetapi djikalau ternyata kekatjauan dalam kebijaksanaan-keuangan maka Pemerintah federal sepakat dengan Senat boleh menghendaki supaya daerah-bagian yang bersangkutan mengadakan perubahan tertentu dalam anggarannya.

3. Undang-undang federal menetapkan apa yang dimaksud dengan perkataan kekatjauan dalam kebijaksanaan-keuangan, dan membuat aturan-aturan untuk melaksanakan kekuasaan seperti tersebut dalam ayat diatas, serta mengatur akibatnja perhubungan dengan pertanggunghan yang mungkin terdjadi dalam melaksanakan bagian-bagian yang bersangkutan dalam anggaran itu.

Pasal 60.

1. Apa yang ditetapkan dalam pasal 56 sampai dengan pasal 59 tidak boleh dilaksanakan setjara apapun, sehingga oleh karena itu terdjadi peristiwa-perubahan dalam pembagian penjelenggaraan-pemerintahan dan dalam perhubungan keuangan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah-bagian seperti diterangkan dalam bagian ini.

27

Nr 3, 1950

2. Teristimewa tidaklah akan dihubungkan syarat-syarat yang menudju kearah itu kepada pemberian bantuan oleh Republik Indonesia Serikat kepada daerah-daerah-bagian, dan djuga tidak kepada pensahan pindjaman, uang atau kepada pensahan anggaran.

Pasal 61.

Undang-undang federal yang selandjutnja memuat aturan-aturan tentang perhubungan keuangan antara Republik Indonesia Serikat dengan daerah-daerah-bagian, dimana mungkin akan menentukan lagi djaminan-djaminan lain, sehingga Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah-bagian saling menjunjung tinggi sepenuh-penuhnya segala hak dan keusaannya.

Babakan 3. Hak-hak dan Kewadajiban-kewadajiban.

Pasal 62.

Segala milik harta-benda, piutang dan hak-hak lain yang diterima dari Indonesia pada pemulihan kedaulatan mendjadi hak-milik Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah-bagian, jaitu sekadar bergantung kepada penjelenggaraan-pemerintahan yang mendjadi beban Republik Indonesia Serikat ataupun beban daerah-daerah-bagian.

Pasal 63.

Segala kewadajiban yang diterima dari Indonesia pada pemulihan kedaulatan adalah kewadajiban Republik Indonesia Serikat.

BAGIAN III.

DAERAH-DAERAH SWAPRADJA.

Pasal 64.

Daerah-daerah Swapradja yang sudah ada, diakui.

Pasal 65.

Mengatur kedudukan daerah-daerah Swapradja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah-daerah-bagian yang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1950, Nr 3

28

dengan kontrak yang diadakan antara daerah-bagian dan daerah-daerah Swapradja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa Swapradja akan diperhatikan dan bahwa tiada suatu pun dari daerah-daerah Swapradja yang sudah ada, dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang federal yang menjatakan bahwa, kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengketjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah-bagian bersangkutan.

Pasal 66.

Sambil menunggu peraturan-peraturan sebagai dimaksud didalam pasal yang lalu dibuat, maka peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian, bahwa pendjabat-pendjabat Indonesia dahulu yang tersebut dalam njnja diganti dengan pendjabat-pendjabat yang demikian pada daerah-bagian bersangkutan.

Pasal 67.

Perselisihan-perselisihan antara daerah-daerah-bagian dan daerah-daerah Swapradja bersangkutan tentang peraturan-peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 65 dan tentang menjalankannja, diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia baik pada tingkat yang pertama dan yang tertinggi djuga, ataupun pada tingkat apèl.

29

Nr 3. 1950

BAB III.

PERLENGKAPAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Ketentuan Umum.

Alat-alat-perengkapan federal Republik Indonesia Serikat ialah:

- a. Presiden;
- b. Menteri-menteri;
- c. Senat;
- d. Dewan Perwakilan Rakjat;
- e. Mahkamah Agung Indonesia;
- f. Dewan Pengawas Keuangan.

BAGIAN I.

PEMERINTAH.

Pasal 68.

1. Presiden dan Menteri-menteri bersama-sama merupakan Pemerintah.
2. Dimana-mana dalam Konstitusi ini disebut Pemerintah, maka yang dimaksud ialah Presiden dengan seorang atau beberapa atau para menteri, yakni menurut tanggung-djawab khusus atau tanggung-djawab umum mereka itu.
3. Pemerintah berkedudukan diibu-kota Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain.

Pasal 69.

1. Presiden ialah Kepala Negara.
2. Beliau dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah-bagian yang tersebut dalam pasal 2.

Dalam memilih Presiden, orang-orang yang dikuasakan itu berusaha mentjapai kata-sepakat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1950. Nr 3

60

2. Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan yang diterangkan dalam ayat 1 kepada alat-alat perlengkapan lain yang berkuasa.

3. Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat diatur dengan undang-undang federal.

BAGIAN V.

PERHUBUNGAN LUAR-NEGERI.

Pasal 174.

Pemerintah memegang pengurusan perhubungan luar-negeri.

Pasal 175.

1. Presiden mengadakan dan mensahkan segala perdjandjian (traktat) dan persetujuan lain dengan negara-negara lain.

Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undang federal, perdjandjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan djika sudah disetujui dengan undang-undang.

2. Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian dan persetujuan lain, hanya dilakukan oleh Presiden dengan kuasa undang-undang federal.

Pasal 176.

Berdasarkan perdjandjian dan persetujuan yang tersebut dalam pasal 175, Pemerintah memasukkan Republik Indonesia Serikat kedalam organisasi-organisasi antarnegara.

Pasal 177.

Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan-perselisihan dengan negara-negara lain dengan djalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau pewasitan antarnegara:

Pasal 178.

Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia Serikat pada negara-negara lain dan menerima wakil negara-negara lain pada Republik Indonesia Serikat.

BAGIAN VI.

PERTAHANAN KEBANGSAAN DAN KEAMANAN UMUM.

Pasal 179.

Undang-undang federal menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewadajiban warga-negara yang sanggup membantu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Serikat dan membela daerahnja.

Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadajiban itu dan menentukan ketjualinja.

Pasal 180.

1. Tentera Republik Indonesia Serikat bertugas melindungi kepentingan-kepentingan Republik Indonesia Serikat.

Tentera itu dibentuk dari mereka yang sukarela masuk tentera dan mereka yang wadajib masuk tentera.

2. Undang-undang federal mengatur masuk tentera yang diwadjibkan.

Pasal 181.

1. Pemerintah memegang pengurusan pertahanan.

2. Undang-undang federal mengatur pembentukan, susunan dan tataan, tugas dan kekuasaan alat-perengkapan yang diberi kewadajiban menjelenggarakan kebidjaksanaan pertahanan pada umumnja, mengorganisasi dan membagi tugas tentera dan, dalam waktu perang, memimpin perang.

Pasal 182.

1. Presiden ialah Panglima Tertinggi tentera Republik Indonesia Serikat.

2. Pemerintah, djika perlu, menaruh tentera dibawah seorang panglima umum. Menteri Pertahanan dapat ditundjuk merangkap djabatannya itu.

3. Opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat dan diperhentikan oleh atau atas nama Presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

1950, Nr 3

72

- M. Pengawasan dilaut;
- N. Pemeliharaan pelabuhan-pelabuhan dan sungai-sungai, sekadar penting bagi pelajaran antarnegara;
- O. Urusan pos, telgram dan telpon, sekadar Republik Indonesia Serikat jang menjediakan kebutuhan-kebutuhannya;
- P. Pengaturan pertambangan;
- Q. Perundang-undangan umum tentang tenaga air dan listrik, dan djuaga pembangunan dan eksplotasi perusahaan-perusahaan tenaga air jang ditentukan oleh federasi;
- R. Hal tera.



LAMPIRAN: VI 160)

LEMBARAN - NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Nr 16, 1950. PERUBAHAN SUSUNAN KENEGARAAN. Undang-undang darurat Nr 11, Tahun 1950, tentang tata-tjara perubahan susunan kenegaraan dari wilayah Republik Indonesia Serikat. (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara Nr 8, Tahun 1950).

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Menimbang:

- a. bahwa perlu diadakan peraturan tentang perubahan sesuatu daerah-bagian, atau wilayah yang bukan daerah-bagian atau yang sendirinja tidak merupakan daerah-bagian dari Republik Indonesia Serikat;
- b. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak diberapa daerah peraturan itu harus segera ditetapkan.

Mengingat: pasal-pasal 43, 44, 123 lid 4 dan 139 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat.

Mendengar Senat.

Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undang darurat tentang tata-tjara perubahan susunan kenegaraan dari wilayah Republik Indonesia Serikat:

BAB I.

Ketentuan-ketentuan umum.

Pasal 1.

1. Mengenai perubahan susunan kenegaraan dari pada daerah Republik Indonesia Serikat, seperti termaksud dalam pasal 44 Konstitusi Sementara, dilakukan suatu tata-tjara

Pasal 7.

1. Bilamana menurut penetapan dalam pasal 6 telah diperoleh persetujuan sementara antara daerah-daerah bagian yang bersangkutan, maka dimintakanlah selanjutnya pernyataan-pernyataan yang tetap, jaitu:

dalam hal-hal tersebut dalam pasal 4 ayat 1 sub a dan dari daerah-daerah-bagian yang bersangkutan seluruhnya;

dalam hal-hal tersebut dalam pasal 4 ayat 1 sub b dari pada bagian yang bersangkutan dari daerah-bagian itu serta pula dari daerah-bagian yang lain.

2. Pada azasnja pernyataan-pernyataan tetap ini dilaksanakan oleh suatu pemungutan-suara rakjat (plebisit), tetapi tentang suatu daerah yang mempunyai dewan sendiri serta dapat dipandang sebagai perwakilan rakjat, pernyataan itu tujukup dilaksanakakan oleh bentukan baru dari badan perwakilan yang sengadja diadakan untuk maksud itu dan disusun menurut peraturan semula, satu dan lain menurut pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Tindakan dalam hal yang terakhir itu pada chususnja akan diambil, apabila hal itu mengenai satu negara dimana tugas-pemerintahan seluruhnja atau sebagian besar diselenggarakan oleh Republik Indonesia Serikat menurut ketentuan dalam pasal 54 ayat 1 Konstitusi Sementara.

3. Djika dalam hal ini ada sebab-sebab yang istimewa, Pemerintah Republik Indonesia Serikat terhadap daerah-daerah-bagian dapat menentukan, bahwa keputusan yang diambil selaku inisiatip, djuga mempunyai kekuatan sebagai suatu pernyataan yang tetap.

4. Pernyataan-pernyataan mengenai suatu inisiatip, yang hanya mengakibatkan perluasan bagi satu daerah-bagian, pun dapat pula dilaksanakan terhadap daerah-bagian itu oleh badan perwakilan rakjat yang duduk dengan suara dua-pertiga dari djumlah anggautanja.

Pasal 8.

1. Setelah oleh perwakilan rakjat dari satu daerah-bagian diambilnja inisiatip, maka perwakilan itu dapat memutuskan, bahwa mengenai soal itu seketika akan diadakan suatu pemungutan-suara rakjat (plebisit).

2. Djika sedemikian maka hasil pemungutan-suara ini dianggap sebagai pernyataan tetap seperti dimaksud dalam pasal 7.

3. Dalam hal ini tindakan seperti tersebut dalam pasal 6 ditunda sampai hasil dari pemungutan-suara sudah ditentukan.

Pasal 9.

1. Djika menurut ketentuan-ketentuan dari Bab ini tertjapai persesuaian diantara sekalian pihak yang bersangkutan, maka perubahan itu, ketjuahi dalam hal-hal yang dimaksud ayat 3 dan 4 dari pasal ini, ditetapkan dengan penetapan dari Pemerintah Republik Indonesia Serikat, menurut keinginan rakjat dari daerah-daerah yang bersangkutan.

2. Peraturan-peraturan yang diambil menurut peraturan undang-undang dan administrasi, yang perlu sebagai akibat dari perubahan yang diadakan sekadar terletak dalam batas-batas kekuasaan dari daerah-daerah-bagian, diserahkan kepada daerah-bagian (c.q. daerah-daerah-bagian) yang bersangkutan.

3. Djika hal itu mengenai pembentukan suatu negara, dan pembuat undang-undang Republik Indonesia Serikat, berseesuaian dengan pasal 46 dari Konstitusi, menjetudjui pembentukan itu, dapatlah undang-undang yang bersangkutan itu memuat sekalian perubahan dan peraturan-peraturan, sebagai yang dimaksud dalam ayat-ayat 1 dan 2.

4. Djika perubahan yang dimaksud dalam ayat 1 mengakibatkan penghapusan atau pengetjilan suatu daerah-swapradja, bertentangan dengan kemauan kepala swapradja yang bersangkutan, dan walaupun demikian perubahan itu diadakan djuga, karena dinjatakan oleh pembuat undang-undang dari Republik Indonesia Serikat, berseesuaian dengan pasal 65 dari Konstitusi bahwa penghapusan atau pengetjilan itu dikehendaki oleh kepentingan umum, maka dapatlah undang-undang yang bersangkutan itu memuat sekalian perubahan dan peraturan-peraturan, sebagai yang dimaksud dalam ayat-ayat 1 dan 2.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1950, Nr 16

6

BAB III.

Perubahan susunan kenegaraan dari wilayah Republik Indonesia Serikat atas inisiatip dari Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Pasal 10.

Pemerintah Republik Indonesia Serikat dapat mengambil inisiatip untuk merubah kedudukan dari:

- wilayah, jang tidak merupakan daerah-daerah-bagian dan tidak termasuk suatu daerah-bagian;
- wilayah, jang termasuk suatu daerah-bagian dan tidak dapat menjatakan pendapatnja oleh satu dewan perwakilan jang diadakan buat wilayah itu;
- wilayah, jang merupakan daerah-bagian atau jang sendiri-nja tidak merupakan daerah-bagian, jang mempunjai dewan perwakilan tetapi jang susunnja dianggap tidak representatief.

Pasal 11.

1. Inisiatip dari Pemerintah Republik Indonesia Serikat dimaktubkan dalam suatu usul jang dibubuhi keterangan, dalam mana djuga diterangkan soal-soal jang dipandangnja perlu untuk mengadakan suatu pemungutan-suara rakjat (plebisit).

2. Usul jang dimaksud itu dikirimkan kepada sedjumlah orang atau organisasi-organisasi, jang terpandang perlu untuk itu, karena kedudukannja dalam masjarakat diwilajah jang bersangkutan, dengan permintaan supaja mengumumkannja sebanjak-banjaknja, dan supaja mengemukakan perasaannja tentang itu, baik setjara sendiri-sendiri maupun setjara bersama dengan orang-orang lain.

3. Apabila wilayah jang bersangkutan termasuk suatu daerah-bagian, pengiriman-pengiriman edaran dari usul itu tidak dilakukan, sebelum Pemerintah dari daerah-bagian diberi kesempatan untuk menjatakan pendapatnja tentang itu.

4. Apabila disesuatu bagian dari wilayah jang bersangkutan terdapat suatu dewan, Pemerintah Republik Indonesia Serikat meminta nasehat kepada dewan itu, dan hal itu harus terdjadi bersama-sama dengan pengiriman edaran dari surat-surat itu.

7

Nr 16, 1950

5. Dalam hal tersebut pasal 10 sub c. Pemerintah Republik Indonesia Serikat, setelah Pemerintah Republik Indonesia Serikat berkejakinan bahwa sebagian besar penduduk wilayah jang bersangkutan menghendaki perubahan jang dinjatakan kepada Pemerintah untuk mengadakan perubahan kedudukan kenegaraan dari wilayah tersebut, dapat menjatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakjat dari wilayah tersebut susunnja jang sekarang tidak representatief, serta menjampaikan inisiatip tersebut kepada Pemerintah dari daerah-bagian jang bersangkutan sekadar inisiatip itu bermaksud penggabungan dengan suatu daerah-bagian jang sudah ada.

Pasal 12.

1. Setelah sampai tenggang jang ditetapkan untuk tiap-tiap masalah, tetapi jang sekali-kali tidak boleh kurang dari satu bulan sesudah surat-surat itu dapat dianggap sampai kepada alamat-alamatnja, maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat dapat menentukan, bahwa tentang usulnja akan dilakukan pemungutan-suara rakjat (plebisit) menurut peraturan-peraturan jang ditetapkannja.

2. Djika pada pemungutan-suara-usul itu diterima, maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat, apabila andjuran itu bermaksud memperluas suatu daerah-bagian, akan meminta persetujuan tentang usul itu kepada pembuat-undang-undang biasa daerah-bagian jang bersangkutan.

Pasal 13.

1. Djika menurut ketentuan-ketentuan dalam Bab ini terdapat persetujuan-penuh, maka perubahan itu ditetapkan sesuai dengan ketetapan dalam pasal 9 ayat 1, dalam mana diserahkan kepada kekuasaan perundang-undangan dari daerah-daerah-bagian jang bersangkutan, tentang apa jang biasanja termasuk dalam batas-abtas kekuasaan dari daerah-daerah-bagian itu.

2. Ketetapan dalam ayat 2, 3 dan 4 dari pasal 9 digunakan setjara jang bersesuaian.

BAB IV.

Perubahan susunan kenegaraan dari wilayah Republik Indonesia Serikat atas inisiatip dari wilayah yang bukan daerah-bagian atau yang sendrinja tidak merupakan daerah-bagian.

Pasal 14.

1. Dewan perwakilan dari suatu wilayah yang bukan daerah-bagian, dapat mengambil inisiatip untuk perubahan kedudukan kenegaraan dari wilayah itu.

2. Inisiatip yang dimaksudkan dalam ayat yang terdahulu dapat juga diambil dengan suatu petisi, dalam mana dengan seksama ditunjukkan luas dan batas-batas wilayah itu, dan dengan mana dinjatakan persesuaian, baik oleh suatu djumlah yang terbanjak dari kepala-kepala persekutuan-persekutuan berotonomi setempat-setempat yang terletak dalam wilayah yang bersangkutan, baik oleh sedjumlah orang-orang dewasa, yang sekurang-kurangnya berdjumlah 5% dari taksiran djumlah penduduk dari wilayah yang bersangkutan itu.

3. Inisiatip yang dimaksudkan dalam ayat-ayat 1 dan 2 hanya terbatas dalam hal penetapan wilayah sendiri.

Pasal 15.

Inisiatip yang diambil menurut pasal 14 dapat mengandung maksud:

- a. pembentukan dari suatu negara bagian tersendiri;
- b. pemasukan kepada suatu daerah-bagian (yang lain);
- c. mendapat kedudukan sebagai wilayah yang langsung dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Pasal 16.

1. Suatu inisiatip sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 15 sub a pada awalnya dapat ditolak oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat apabila mengenai suatu wilayah yang penduduknja kurang dari 1 (satu) djuta djiwa.

2. Suatu inisiatip sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 15 sub c dapat ditolak oleh Pemerintah Republik Indo-

nesia Serikat, djika ia berpendapat, bahwa apabila itu diturut akan bertentangan dengan kepentingan umum.

3. Tentang suatu inisiatip sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 15 sub b, Pemerintah Republik Indonesia Serikat meminta keputusan sementara dari perwakilan rakjat dari daerah-bagian yang lain itu.

Pasal 17.

Mengenai inisiatip seperti tersebut dalam pasal 15 Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan mengadakan pemungutan-suara rakjat (plebisit) dalam wilayah yang bersangkutan, dalam hal-hal seperti berikut:

- a. sub b djika inisiatip itu disetujui oleh perwakilan rakjat daerah-bagian lain itu;
- b. sub a atau sub c djika inisiatip itu tidak ditolak oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat;
- c. sub a djika inisiatip yang mula-mula ditolak, kemudian diulangi dengan petisi yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 10% dari djumlah penduduk.

Pasal 18.

Djika menurut ketentuan-ketentuan dalam Bab ini telah ternjata rakjat menghendaki perubahan yang dimaksudkan itu — dan sekiranya hal itu mengenai daerah-bagian lain, pengluasan dari daerah-bagian itu telah disetujui tetap menurut tjara sebagai dimaksudkan dalam pasal 7, — maka perubahan yang dikehendaki itu, dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 16 dari Undang-undang Dasar Sementara, ditetapkan dan diatur dengan undang-undang dari Republik Indonesia Serikat, dengan pengertian bahwa kepada kekuasaan perundang-undangan dari daerah-bagian yang bersangkutan diserahkan apa-apa yang biasanya termasuk dalam batas-batas kekuasaan dari daerah-bagian itu.

BAB V.

Ketentuan-ketentuan penutup.

Pasal 19.

1. Djika suatu wilayah, yang merupakan daerah-bagian atau tidak, mengambil inisiatip supaja wilayah itu langsung

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

11

Nr 16, 1950

dikuasai oleh Republik Indonesia Serikat, maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat dapat menerima inisiatip itu apabila dianggapnya memenuhi kepentingan umum.

2. Perubahan yang dimaksudkan dalam ayat 1 itu, ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat 1.

Pasal 20.

Dengan tidak mengurangi hak-hak rakyat dari wilayah-wilayah, yang tidak merupakan daerah-bagian dan tidak pula termasuk dalam sesuatu daerah-bagian atau rakyat dari daerah-daerah-bagian yang bersangkutan, untuk menyatakan keinginannya lebih lanjut menurut ketetapan-ketetapan dalam undang-undang ini, maka wilayah-wilayah yang dalam tahun-tahun belakangan ini oleh sebab perkembangan-perkembangan politik telah terpisah dari daerah-daerah, kedalam mana wilayah-wilayah itu sewajarnya termasuk, dan yang sedjak dahulu sudah juga termasuk lingkungan daerah-daerah itu, dapat dengan tidak menggunakan tata-tjara yang diatur dalam undang-undang ini, dengan penetapan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dimasukkan kedalam daerah-bagian, dimana wilayah-wilayah itu semula menjadi satu bagian.

Pasal 21.

Djika diperlukan untuk kepentingan pertahanan, maka bagian-bagian-ketjil dari wilayah yang termasuk atau tidak termasuk dalam suatu daerah-bagian, dengan undang-undang federal dapat ditempatkan seluruhnya atau sebagiannya langsung dibawah Pemerintah dari Republik Indonesia Serikat, dan untuk itu, djika dianggap perlu, ditjerakan dari daerah-bagian atau dari satuan-satuan kenegaraan yang lain.

Pasal 22.

1. Djika sebelum terbentuknya undang-undang ini oleh suatu dewan perwakilan sudah diambil pernyataan, yang berisi suatu inisiatip sebagai yang dimaksud dalam undang-undang ini, maka pernyataan itu dalam menjalankan undang-undang ini dapat dianggap sebagai inisiatip atau sebagai pernyataan tetap.

2. Untuk wilayah dimana tidak dibentuk suatu dewan, ketentuan pada ayat 1 dilakukan setjara qijas (analogie) tentang inisiatip-inisiatip sebagai yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 2.

Pasal 23.

Undang-undang darurat ini dapat dinamakan „Undang-undang tata-tjara perubahan susunan kenegaraan Republik Indonesia Serikat“.

Pasal 24.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan menempatkannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 8 Maret 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat.

SOEKARNO.

Perdana Menteri,
MOHAMMAD HATTA.

Menteri Dalam Negeri,
IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG.

Diumumkan,
pada tanggal 9 Maret 1950.

Menteri Kehakiman.

SOEPOMO.

LAMPIRAN : VII ¹⁶¹)

**UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

*(Undang-Undang 15 Ag. 1950 No. 7) Lembaran Negara 50-56.
(d.u. 15 Ag. 1950) (Penj. Tambahan Lembaran Negara 37)*

Presiden Republik Indonesia Serikat

M e n i m b a n g :

bahwa rakyat daerah-daerah bagian di seluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan Negara republik kesatuan;
bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat;

bahwa Negara yang berbentuk republik kesatuan ini sesungguhnya tidak lain dari pada Negara Indonesia yang kemerdekaannya oleh rakyat diproklamkan pada hari 17 Agustus 1945, yang semula berbentuk republik kesatuan dan kemudian menjadi republik federasi;

bahwa untuk melaksanakan kehendak rakyat akan bentuk republik kesatuan itu daerah-daerah bagian Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur telah mengusahakan Pemerintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnya untuk bermusyawarat dengan Pemerintah daerah bagian Negara Republik Indonesia;

bahwa kini telah tercapai kata sepakat antara kedua pihak dalam permusyawaratan itu, sehingga untuk memenuhi kehendak rakyat tibalah waktunya untuk mengubah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat yang telah tercapai itu menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara yang berbentuk republik kesatuan dengan nama Republik Indonesia;

M e n g i n g a t :

Pasal 190, Pasal 127 bab a dan Pasal 191 ayat 2 Konstitusi;

Mengingat pula:

Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Undang-Undang tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Pasal I. Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, sehingga naskahnya berbunyi sebagai berikut:

Mukadimah

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur.

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk republik kesatuan, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Mahaesa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna.

BAB I

Negara Republik Indonesia

Bagian I

Bentuk Negara dan kedaulatan

Pas. 1. (1) Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara-hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.

(2) Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian II

Daerah Negara

2. Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia.

Bagian III

Lambang dan bahasa Negara

3. (1) Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih.

(2) Lagu kebangsaan ialah lagu "Indonesia Raya".

(3) Meterai dan lambang Negara ditetapkan oleh Pemerintah.

4. Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah bahasa Indonesia.

Bagian IV

Warga negaraan dan penduduk Negara

5. (1) Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur oleh undang-undang.

(2) Pewarganegaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa undang-undang.

Undang-undang mengatur akibat-akibat pewarganegaraan terhadap istri orang yang telah diwarganegarakan dan anak-anaknya yang belum dewasa.

6. Penduduk Negara ialah mereka yang diam di Indonesia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

LAMPIRAN: VIII ¹⁶²⁾

11 DESEMBER HARI BERSEDIJARAN.

TANGGAL 11 Desember diperingati setiap tahun mulai tahun 1947. Sedjak terdjadinja aksi pembersihan Westerling maka berbagai tindakan diambil oleh badan² tertentu untuk membuat hari tsb. mendjadi hari berkabung nasional dan lain². Safu diantaranya dibuktikan oleh mosi berikut, disiarkan oleh Badan Penghubung Peladjar Indonesia (BAPPI), lengkapnja kita salinkan sbb..

Badan Penghubung Peladjar Indonesia (BAPPI)
Djalan Rendah 99, Makassar.

M O S I

Rapat Perwakilan Badan Penghubung Peladjar Indonesia pada tanggal 5 Desember 1949, jang meliputi organisasi² Pemuda Peladjar di Makassar :

Mengetahui : Bahwa hari 11 Desember adalah „hari berkabung“ bagi Rakjat Indonesia, terutama bagi Rakjat Indonesia jang berada di Sulawesi, sebab pada hari itu (11 Desember 1946) dimulai „aksi pembersihan“ oleh tentera Belanda di Sulawesi Selatan, jang telah memakan 40.000 djiwa.

Mengetahui pula : Bahwa hari itu tiap² tahun diperingati di Ibu Kota Republik Indonesia, Jogjakarta, dan telah diakui sebagai „Hari Nasional“.

Mengetahui selandjutnja : Bahwa sampai sekarang belum pernah diumumkan hasil² penjelidikan pembersihan tersebut, baik oleh Pemerintah N.I.T., maupun oleh Pemerintah Keradjaan Belanda.

Menimbang : a. Bahwa hari 11 Desember penting sekali artinja bagi Rakjat dan Pemerintah N.I.T., karena disaat mengganasnja pembersihan

¹⁶² Syamsudin Lubis, op. cit, hlm 103- 105

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

di Sulawesi Selatan, dalam Konperensi Denpasar pada tgl. 24-12-1946, lahir suatu Negara, jaitu Negara Indonesia Timur.

- b. Bahwa Pemerintah N.I.T. sewajibnja menjatakan pendiriannya jang tegas.

Memutuskan : MENUNTUT KEPADA PEMERINTAH AGAR HARI 11 DESEMBER DIAKUI DAN DIRESMIKAN SEBAGAI HARI NASIONAL DAN — BERKABUNG BAGI SELURUH RAKJAT INDONESIA.

Makassar, 8 Desember 1949

Badan Penghubung Peladjar Indonesia

Ketua : WEDASTERA. *Panitera I :* M. RIZA.

Mosi ini disampaikan kepada :

1. Pemerintah Negara Indonesia Timur
2. Presiden N.I.T.
3. Badan Perwakilan Sementara N.I.T.
4. Senaat Indonesia Timur
5. Hadat Tinggi
6. Dewan Sulawesi Selatan
7. Kuasa Wakil Tinggi Mahkota di Makassar
8. Pers dan Radio

Secretariaat Pusat Pandu Rakjat Indonesia, bagian Timur Indonesia, dengan suratnja no. Pusat/42/L. D. tertanggal 26 Nopember 1949 kepada 1. Menteri PP dan K Republik Indonesia, 2. Pengurus Besar Umum dan Markas Besar Umum Pandu Rakjat Indonesia, 3. Panitia Peringatan 3 tahun Hari Pengorbanan 40.000 Pembela Kemerdekan Bangsa di Sulawesi, di Djokjakarta, mengirimkan pengumuman mereka, bahwa tgl. 11 Desember didjadikan sebagai *hari berkabung* dan mengandjurkan kepada segenap anggautanja supaja pada tanggal tsb. sehari-harian memakai pakaian kepanduan dan membersihkan makam² pahlawan jang ada ditempat masing².



DATU SUPPA LOLO

Ia diseret dengan mobil dalam penjembehan 40.000. Setelah tidak bernjawa lagi, ditembak pula dadanja.

808

era Selatan: Abdul Malik
R. Hanan
Abdul Fatah
Zainudin Darmo
era Timur: Dr. T. Mansur
G. van Gelder
Tengku Arifin.

awas-pengawas dari:
Tengah: M.T. Sihombing
The Sien Tjo
R. Slamet Tirtosubroto
a Timur: T.Tg.P. Achmad Kusumonegoro
Mr. R.P. Notohatyanto
Mr. Tjoa Sie Hwie
Mr. The Boen Hwan
ang: Jacob Jahja.

LAMPIRAN IV

SUSUNAN BADAN PERWAKILAN SEMENTARA DAN
FRAKSI-FRAKSI DALAM BADAN PERWAKILAN
SEMENTARA NEGARA INDONESIA TIMUR
24 Desember 1946 — 20 Desember 1949

- I. 24 Desember 1946 — 29 April 1947
Ketua : Mr. Tadjoeeddin Noor
Sekretaris : Mr. Van Gelder
- II. 2 Juni 1947 — 20 Desember 1949
Ketua : Mohammad Kaharoeddin, Sultan Sumbawa
Sekretaris : Dr. H. Stolk.

Fraksi-fraksi Dalam Sidang Pertama Tahun 1947:

1. Fraksi Progresif, terdiri dari 32 anggota
2. Fraksi Pembangunan, terdiri dari 37 anggota

Fraksi-fraksi Dalam Sidang Kedua Tahun 1947:

1. Fraksi Progresif, terdiri dari 34 anggota
2. Fraksi Nasional, terdiri dari 17 anggota
3. Fraksi Koalisi Demokrat, terdiri dari 20 anggota
4. Fraksi. I.E.V., terdiri dari 3 anggota

Fraksi-fraksi Dalam Sidang Pertama Tahun 1948:

1. Fraksi Progresif, terdiri dari 35 anggota
2. Fraksi Nasional, terdiri dari 22 anggota
3. Fraksi Demokrat, terdiri dari 5 anggota
4. Fraksi "Liar" (yang tidak termasuk golongan fraksi), terdiri dari 12 anggota
5. Fraksi I.E.V., terdiri dari 3 anggota

Fraksi-fraksi Dalam Sidang Kedua Tahun 1948:

susunannya sama seperti di dalam sidang pertama

Fraksi-fraksi Dalam Sidang Pertama Tahun 1949:

1. Fraksi Progresif, terdiri dari 34 anggota
2. Fraksi Nasional, terdiri dari 22 anggota
3. Fraksi Demokrat, terdiri dari 5 anggota
4. Fraksi "Liar" terdiri dari 13 anggota
5. Fraksi I.E.V., terdiri dari 3 anggota

Fraksi-fraksi Dalam Sidang Kedua Tahun 1949:

susunannya sama seperti di dalam sidang pertama.

LAMPIRAN V.

**SUSUNAN BADAN PERWAKILAN RAKYAT
NEGARA INDONESIA TIMUR DAN FRAKSI-FRAKSI
21 Februari 1950 — 16 Agustus 1950**

Ketua : Hoesain Poeang Limboro,
Sekretaris : Dr. H. Stolk

Fraksi-fraksi Dalam Sidang Pertama Tahun 1950:

1. Fraksi Kesatuan Nasional, 20 anggota
2. Fraksi Nasional Progresif, 25 anggota
3. Fraksi Kerakyatan, 10 anggota
4. Fraksi Indonesia, 8 anggota
5. Fraksi Sosialis, 3 anggota.

LAMPIRAN VI

SUSUNAN PEMERINTAH
NEGARA INDONESIA TIMUR

PRESIDEN: Tjokorde Gde Rake Soekawati, 24 Desember 1946 —
15 Agustus 1950.

KABINET YANG BERKUASA:

I. Kabinet Nadjamoedin Daeng Malewa Pertama — 13 Januari—
2 Juni 1947

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Perdana Menteri merangkap
Menteri Perekonomian | : Nadjamoedin Daeng Malewa |
| 2. Menteri Urusan Dalam Negeri | : Ide Anak Agung Gde Agung |
| 3. Menteri Keuangan | : M. Hamelink |
| 4. Menteri Kehakiman | : Mr. Tjia Kok Tjiang |
| 5. Menteri Kesehatan | : Dr. S.J. Warrouw |
| 6. Menteri Pendidikan | : E. Katoppo |
| 7. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perhubungan | : E.D. Dengah |
| 8. Menteri Sosial | : J. Tahja |
| 9. Menteri Penerangan | : G.R. Pantouw |

II. Kabinet Nadjamoedin Daeng Malewa Kedua — 2 Juni—
11 Oktober 1947

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Perdana Menteri merangkap
Menteri Perekonomian | : Nadjamoedin Daeng Malewa |
| 2. Menteri Urusan Dalam Negeri
merangkap Wakil Perdana Men-
teri | : Ide Anak Agung Gde Agung |
| 3. Menteri Keuangan merangkap
Wakil Menteri Perekonomian | : M. Hamelink |

- | | |
|--|-----------------------------|
| 4. Menteri Muda Keuangan | : R.E.J. Matekohy |
| 5. Menteri Kehakiman | : Mr. Dr. Ch. R.S. Soumokil |
| 6. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perhubungan | : Ir. A.M. Semawi |
| 7. Menteri Pendidikan | : E. Katoppo |
| 8. Menteri Kesehatan | : Dr. S.J. Warrouw |
| 9. Menteri Sosial | : G.R. Pantouw |
| 10. Menteri Penerangan | : J. Tahja |
| 11. Menteri Negara ditugaskan untuk
mengurus masalah Keislaman | : Achmad Sjehan Bahmid |
| 12. Menteri Negara ditugaskan untuk
mengurus soal Kewarganegara-
an | : R. Claproth |
| 13. Menteri Negara ditugaskan untuk
menyelidiki Peradilan di Indone-
sia Timur | : Mr. Tjia Kok Tjiang |

III. Kabinet S.J. Warrouw — 11 Oktober—15 Desember 1947

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Perdana Menteri merangkap
Menteri Kesehatan | : Dr. S.J. Warrouw |
| 2. Menteri Urusan Dalam Negeri
merangkap Wakil Perdana Men-
teri | : Ide Anak Agung Gde Agung |
| 3. Menteri Keuangan | : M. Hamelink |
| 4. Menteri Muda Keuangan | : R.E.J. Matekohy |
| 5. Menteri Perekonomian | : J. Tahja |
| 6. Menteri Muda Perekonomian | : Hoesain Poeang Limboro |
| 7. Menteri Kehakiman | : Mr. Dr. Ch.R.S. Soumokil |
| 8. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perhubungan | : Ir. A.M. Semawi |
| 9. Menteri Pendidikan | : E. Katoppo |
| 10. Menteri Sosial | : Abdoellah Daeng Mappedji |
| 11. Menteri Muda Sosial | : Drs. Tan Tek Heng |
| 12. Menteri Penerangan | : Sonda Daeng Mattajang |
| 13. Menteri Muda Penerangan | : R. Claproth |

IV. Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung Pertama — 15 Desember 1947—12 Januari 1949

1. Perdana Menteri merangkap Menteri Urusan Dalam Negeri : Ide Anak Agung Gde Agung
2. Menteri Kehakiman : Mr. Dr. Ch.R.S. Soumokil
3. Menteri Perekonomian : Hoesain Poeang Limboro
4. Menteri Keuangan : M. Hamelink
5. Menteri Kesehatan : Dr. S.J. Warrouw
6. Menteri Pendidikan : E. Katoppo
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan : Ir. D.P. Diapari
8. Menteri Sosial : Mr. S.S. Palenkahoe
9. Menteri Penerangan : Boerhanoeddin
10. Menteri Muda Urusan Dalam Negeri : Mr. S. Binol
11. Menteri Muda Kehakiman : R. Claproth
12. Menteri Muda Perekonomian : Drs. Tan Tek Heng
13. Menteri Muda Keuangan : R.E.J. Matekohy
14. Menteri Muda Pendidikan : J.E. Tatengkeng
15. Menteri Muda Sosial : Moh. Sjafei
16. Menteri Muda Penerangan : I.H. Doko

V. Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung Kedua — 12 Januari—27 Desember 1949

1. Perdana Menteri merangkap Menteri Urusan Dalam Negeri : Ide Anak Agung Gde Agung
2. Menteri Kehakiman : Mr. Dr. Ch.R.S. Soumokil
3. Menteri Keuangan : M. Hamelink
4. Menteri Perekonomian ad interim : Drs. Tan Tek Heng
5. Menteri Pendidikan : J.E. Tatengkeng
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan : Ir. D.P. Diapari
7. Menteri Kesehatan : Dr. J.W. Grootings
8. Menteri Sosial : Mr. S. Binol
9. Menteri Penerangan : I.H. Doko
10. Menteri Perekonomian : Abdoel Radjab Daeng Massikki

Catatan: Setelah Abdoel Radjab Daeng Massikki diangkat menjadi Menteri Perekonomian, Drs. Tan Tek Heng diangkat menjadi Menteri Negara diperbantukan kepada Kementerian Keuangan dan ditugaskan untuk urusan anggaran belanja negara.

VI. Kabinet J.E. Tatengkeng — 27 Desember 1949—14 Maret 1950

1. Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan : J.E. Tatengkeng
2. Menteri Urusan Dalam Negeri : Iskandar Djabir Moh. Sjah, Sultan Ternate
3. Menteri Keuangan : Drs. Tan Tek Heng
4. Menteri Perekonomian : Abdoel Radjab Daeng Massikki
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan : Ir. D.P. Diapari
6. Menteri Sosial : Mr. S. Binol
7. Menteri Kehakiman : Mr. Dr. Ch.R.S. Soumokil
8. Menteri Kesehatan ad interim : Mr. S. Binol
9. Menteri Penerangan : I.H. Doko

VII. Kabinet D.P. Diapari — 14 Maret—10 Mei 1950

1. Perdana Menteri merangkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan : Ir. D.P. Diapari
2. Menteri Urusan Dalam Negeri : Abdoel Radjab Daeng Massikki
3. Menteri Kehakiman : R. Claproth
4. Menteri Keuangan : Drs. Tan Tek Heng
5. Menteri Perekonomian : Achmad Ponsen Daeng Posanre
6. Menteri Pendidikan : I.H. Doko
7. Menteri Kesehatan dan Sosial : Dr. D. Tahitoe
8. Menteri Penerangan : Dr. W.J. Ratoelangi

VIII. Kabinet J. Poetoehena — 10 Mei—16 Agustus 1950

1. Perdana Menteri merangkap Menteri Perekonomian dan Perhubungan : Ir. J. Poetoehena

- 2. Menteri Urusan Dalam Negeri : Lanto Daeng Pasewang
- 3. Menteri Kehakiman : Mr. I. Goesti Ketoet Poedje
- 4. Menteri Pendidikan dan Kesehatan : Ir. Ingkiriwang
- 5. Menteri Keuangan : Abdoel Razak
- 6. Menteri Sosial : Andi Boerhanoeddin
- 7. Menteri Penerangan : H. Rondonoewoe

LAMPIRAN VII

**DAFTAR KUMPULAN PARTAI POLITIK
DI INDONESIA TIMUR PADA SAAT
NEGARA INDONESIA TIMUR DIBUBARKAN***

1. Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
Ketua : A. Mononoetoe W.Ketua : J.E. Tatengkeng
Penulis Umum: H. Rondonoewoe
Bendahara: Andi Boerhanoeddin
Pbt-pbt. : Ny. Towolioe, E.U. Poepella, A. Madjid.
2. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
Ketua : H. Rondonoewoe W.Ketua : M. Zajat
Penulis I : Maladjong Daeng Liwang
Bdh. I : S. Effendy Bdh. II : Ny. M. Towolioe
Penerangan: Ny. Salawati Daoed
Pendidikan: M. Legoh
Ekonomi : O. Mahamit Bag.Wnt : Andi Ninong
3. Partai Warganegara Indonesia (PARWANI).; Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
Ketua : M.Th. Bachmid W.Ketua : A.K. Alamoedi
Penulis : A.R. Alhabsije Bendh. : A.I. Bamagassim
Pbt.-pbt. : M.I. Attamimi, S. Alamoedi, A.H. Alasiri

* Diambil dari berkas arsip Perwakilan Arsip Nasional Ujungpandang.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

818

4. Partai Indonesia Raya (PARINDRA); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
Pimpinan: Hadjarati
5. Kebaktian Rakyat Indonesia Maluku (KRIM); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
Pimpinan: Wattimena.
6. Banteng Indonesia Sulawesi (BIS); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
Perancang: Daved Sidja (Handelaar).
7. Partai Katholik Rakyat Indonesia (PKRI); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
Ketua: Mr. H.J.A.H.E. Payens
W.Ketua: Mr. Teng Tjin Leng.
Penulis/Bdh.: Drs. N.A. Nyman
Pbt.-pbt.: Mr. Tjin Kok Tjiang, Q.J.H. Mudde, P.A.M. Beyaert, J.H.W. Ehlhart.
8. Partai Demokrasi Assosiatif Federal Indonesia (PARDAFI); Haluan: Politik dan Ekonomi; Kedudukan: Makasar.
Ketua: A.J. Wakary. Pnl/Pbt.: Thio Heng Sioe.
Pbt-pbt. Intje Moh. I.Abd. Maula, C.J.B. Mantau, J. Paat, Liem Tjing Goan, B. Roep, Abdl. Daeng Mapudji, N.V. Lith.
9. Persatuan Timor Besar (PTB); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
Ketua: P.L. Christoffel W.Ketua: Th.D. Lengkong
Penulis: J. Hitipeun. Penulis I: J.K. Kamangi
Penulis II: D. Noya Bdh.I: J.E. Pastera
Bdh. II: I. Mulle. Bdh. III: K. Kamarimbing.
Pbt-pbt.: N. Pattiradjawane, J. Latuharhary, H. Kapok, L.J. Ballo.
10. Vaderlandse Club (VC); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
Pimpinan: Status Mulle, Ir. Lels, C.B.H. Loeff.
11. Indo Europeeschen Verbond (IEV); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
Ketua: O.J.E. Fransz. Penulis: J.A. Nicolaas
Pbt-pbt.: H. Bruggeman, J.Th. Droop, Th.J. Hogendorp, Goedhart.

819

12. Persatuan Maluku Utara; Haluan: Politik. Kedudukan: Makasar.
Ketua: P.H.G. Soentpiet W.Ketua: A.J. Aboebakar
Penulis I: H.M. Radja Loa Penulis II: M. Hanafi
Bendhr.: E.D. Tan Pbt-pbt.: J.C. Rompis,
Pelindung: Sri Sultan Tidore, R.A. Baay,
A. Mononoetoe Que Ek Liong,
Nona M. Poetinela
Penasehat: W. Kandin
13. Partai Tionghwa Peranakan (PERTIP); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
Ketua: Drs. Ie Kheng Heng W.Ketua: Liem Tjeng Goan,
Pnsh.: Thio Heng Sioe Liem Tjeng Leng
Politik: Mr. Tjia Kok Tjiang Pnyld.: Nio Tjoen Liong
Ekonomi: Lie Tjong-Boe Sos.Keb.: Nona Soh Lian Tjie
14. Ikatan Wartawan Indonesia Timur (IWIT); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
Ketua: J. Mawengkeng Penulis: A. Sjafoedin
Bendh.: Monohoea Pbt.: A. Sasabone
15. Gerakan Kebangsaan Indonesia Minahasa (GERKIM); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
Ketua: M.L. Saraoen W.Ketua: Kemontooy
Penulis: M. Warrouw Bendh.: Tendean
Pbt-pbt.: Mr. Palengkahoe, Mewengkang, Mamesa
16. De Nederlandsche Vereniging voor Oost-Indonesië; Haluan: Politik dan Sosial; Kedudukan: Makasar.
Ketua: P.H. Kremer W.Ketua: Prof. J.J. Haurath
Penulis: D.M. van Zwieten Pbt.: C. van Burken
Bendh.: Drs.E. van Tongeren
17. Balai Perguruan Sawerigading; Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar
Direktur: Noeroedin Sjahadat
Guru²: Abd. Sawawy Jahja, Hamzah Daeng Mangemba
18. Badan Penyelenggara Tana Toraja; Haluan: Politik.
19. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
Ketua: Aboebakar W.Ketua: Sjamsoeddin, Samad
Penulis I: Abd. Rasjid Penulis II: Moehidin Adam
Bendh.: Manjanderi Daeng Matoetoe
Pbt-pbt.: A. Waris, I.M. Saleh, A. Hakim.

20. Masyumi; Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
 Ketua : M. Niode W.Ketua : A. Haroen
 Penulis I : U.H. Boeloati Penulis II : I. Mohamad
 Bendh. : K. Laja
 Pbt-pbt. : A. Joenoes, J. Polapa, M.S. Ointoe, S. Moesa.
21. Persatuan Islam; Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
 Ketua : Hadji Manjoor W.Ketua : Hadji Mochlis
 Penulis : Moch. Amin Daeng Bendh. : Abdoelkadir
 Toeloe
 Pbt-pbt. : H.D. Zakaria, H. Abdoerasi, Batjo Sebes, Loethan
 Moch. Isa, Moch. Akib, Hadji Moch. Tahwa Daeng
 Magang
22. Persatuan Guru Indonesia Sulawesi Selatan; Haluan: Politik dan Sosial; Kedudukan: Makasar.
 Ketua : D. Sioemoerang W.Ketua : HaEba Daeng Si-
 toedjoe
 Penulis I : Laside Pbt-pbt. : Djalaloeddin, Nakka,
 Penulis II/ Sampara
 Bendh. : Mansjoer
23. Perserikatan Sekerja Indonesia; Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
 Ketua : Pijo W.Ketua : Manapiang
 Penulis I : Abdoel Aziz Daeng Penulis II : Abd. Kadir
 Sitoedjoe Bendh. : Soekarno
 Pbt-pbt. : Sitoemorang, A.L. Tobing, Sjamsoeddin Daeng Managawing, Sitti Moemoerah
24. Buruh Tionghwa; Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
 Ketua : Ban Sie Tjhoen W.Ketua : Po Ai Eng
 Pbt. : Kho Tiong Lien Pbt. : Go Loe Seng
25. Kedaulatan Rakyat Bagian Wanita (PKR Bagian Wanita); Kedudukan: Makasar.
 Ketua : Ny. Salawati Daoed W.Ketua : Ny. W. Maladjong
 Penulis : Ny. Habibi Bendh. : Ny. R. Pantouw
 Pbt-pbt. : Ny. Sikado, Ny. Selamat, E. Sigar, Ny. Z. Wahab, Ny. A. Warrouw
26. Badan Pemimpin Pemuda Indonesia (BPPI); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar (Perkumpulan Pemuda Makasar).
 Ketua : Soejatim M. W.Ketua : A. Waris
 Penulis I : Madilaoe A.D.T. Penulis II : Nn. Rachmatijah
 Pbt-pbt. : B. Sjamsoedin, Daeng Ngerang, Makkatem, A. Sjamfroedin, A. Moeis Taha.
27. Fikiran Pemuda (FP); Haluan: Politik/Kul; Kedudukan: Makasar.
28. Angkatan Pemuda Indonesia (API); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
 Ketua : Ch. Sjahadat W.Ketua : Soeaib
 Penulis : Ibr. Masbi Bendh. : M. Sjoerkati
 Pbt-pbt. : A. Rachman Tahir, M. Arif.
29. Panitia Tahanan Politik; Haluan: Politik dan Sosial; Kedudukan: Makasar.
 Ketua : Dr. R.C.L. Sendoek W.Ketua : Mr. Tjia Kok Tjiang
 Penulis I : Soejatim M. Penulis II : D. Hamzah
 Bendh. : Ny. S. Saelan Bendh. II : Ny. A. Kindangan
 Pbt-pbt. : A.N. Hadjarati, E.D. Hidajat, Aroepella, A. Boerhan-oeddin.
30. Twaalfde Provinsi Minahasa (TWAPRO); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
 Ketua : D.A. Kairoepan Penulis : Ch.M. Poenggawa,
 Soerentoe,
 Mamarimbang.
31. Persatuan Patriot Indonesia; Haluan: Politik.
 Ketua : A. Sanoesi
32. Panitia Pembentukan Partai Sosialis Indonesia; Haluan: Politik.
 Ketua : Abd. Rachiem W.Ketua : S. Mamesah
 Penulis : A.W. Rachiem Bendh. : Irtin Achmad
 Pbt-pbt. : Sahiboe, Selamat, Wagiman, Sakari, Sahoed.
33. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI); Haluan: Politik dan Agama.
 Pnsh. : Achmad Makara- Ketua : Moeh. Noer
 oesoe W.Ketua : Abbas Daeng Mala-
 Penulis I : A.D. Hamid Shaid wa
 Penulis II : A. Sjamsoeddin Bendh. : A. Watief, Masrie
 Pbt-pbt. : Achmad D.P., Mahiroe, A. Hadji Daeng Nangka.

Pengurus Bagian Penerangan:

Ketua : M.S. Faroek

Pnsh. : Laode Hamiroe, M. Arsjad, Pama, Rafioedin.

34. Biro Pejuang Pengikut Republik Indonesia; Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.

Joesoef Baoeti Makkaraeng Daeng Djaroeng
Moh. Riri Amin
Daed

35. Partai Indo Nasional (PIN); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.

Ketua : J.F.G. Steyn

36. Panitia Pembentuk Front Pemuda Indonesia (PPFPI); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.

Ketua : Soenardi (PRMAI) W.Ketua : J. Baoety (BPRI)

Penulis : Soeleman (IPIM) Penulis II : Riza (IPPI)

Bendh. :

Pbt-pbt. : Tadjoeddin, Soleman, Soedastra, Ngantoeng.

37. Partai Nasional Indonesia (PNI); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.

Ketua : Intje Saleh Daeng Tompoh.

DAERAH PARE-PARE

1. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII); Haluan: Politik dan Agama; Kedudukan: Pare-pare.

Ketua : Moh.Amin W.Ketua : Daeng Nompo

Penulis : Mochtar Moenir La Bendh. : Andi Takka
Ode

2. Perserikatan Tionghwa Peranakan (PERTIP); Haluan: Politik; Kedudukan: Pare-pare (kantor pusat Makasar, Endestraat No. 11a).

Ketua : Nio Tjoen Siong W.Ketua : Tjoa Hong Seng

Penulis : Go Tjien Hok Bendh. : Kho Tjeng Hoei

Pbt-pbt. : Tjia Liong Sang, Thoeng Koei Sioe, Hong Ong Tjoang

3. Badji Minasa; Haluan: Politik; Kedudukan: Parepare.

Ketua : Kasim, Amboe Nontji Penulis : Hadji Tibe, Sose

Voorl. : La Djala Bendh. : Abdoellatief

Cont. : Saido, Ponang
Ojango

DAERAH LUWU - PALOPO

1. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII); Haluan: Politik/Agama;

Kedudukan: Palopo

Ketua :

2. Partai Christen Indonesia (PARKI); Haluan: Sosial/Politik; Kedudukan: Tana-Toraja.

Ketua :

3. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR); Haluan: Politik; Kedudukan: Palopo.

4. Angkatan Pemuda Indonesia (API); Haluan: Politik; Kedudukan: Palopo.

5. Gabungan Partai-partai Politik dan Sosial Tana Toraja; Haluan: Politik; Kedudukan: Makale.

1. Biro Pejuang Pengikut Republik Cabang Tanah Toraja.

2. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR).

3. Partai Keristen Indonesia (PARKINDO).

4. Partai Serikat Islam Indonesia (PSSI).

5. Muhammadiyah

6. Aisiyah.

7. Persatuan Guru Indonesia (PGI).

8. Persatuan Pelajar Indonesia (PPI).

9. Pecinta Tanah Air.

10. Bunga Lalan Rantepao.

11. Seloara Tikala.

12. Limeta Tikala (Rantepao).

13. Koperasi Rakyat Indonesia Toraja (KRIT).

DAERAH BONTHAIN

1. Muhammadiyah; Haluan: Politik/Agama; Kedudukan: Tiro.

Ketua : M. Ali Daeng Mangale.

W.Ketua/ Penulis: Abd. Rahman, Dg. Magasing.

Penulis II: Djamarang

Bendh. : M. Joesoef

Pbt-pbt. : Mading, Bara, Sjamsoeddin, Kamaroeddin.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

824

2. Muhammadiyah; Haluan: Politik/Agama; Kedudukan: Bulukumba.
Ketua : Abdoelkader Pale- Penulis : Saloko PaEra
loengi Bendh. : Semail
Pbt-pbt. : Lompong, Sakka, A. Hafid, Sariboe, A. Kasi.
3. Muhammadiyah; Haluan: Politik/Agama; Kedudukan: Ponregantarang.
Ketua : Moh. Hasan Penulis : Hamade
Bendh. : Achmad Pbt. : Abos Asang.
4. Muhammadiyah; Haluan: Politik; Kedudukan: Kassi-Kajeng.
Ketua : M. Sidik Soeding Penulis : Abd. Wahab
Daeng Masenge Bendh. : A.M. Daeng Manodjengang.
Pbt-pbt. : Manro Daeng Magase, Manna Lantara Goeleng.
5. Muhammadiyah; Haluan: Politik/Agama; Kedudukan: Bulukumba.
Ketua : Dolo Daeng Bella Miskin Daeng Mamase
Penulis : Abd. Moein Teha, Abd. Rahman
Bendh. : Aboe Bakarreng
Pbt-pbt. : Manro Daeng Magaoe, Manna, Lantara, Goeleng, A.M. Rahim.

DAERAH MANDAR-MAJENE

1. Partai Serikat Islam Indonesia (PSSI); Haluan: Politik/Agama; Kedudukan: Majene.
2. Badan Permupakatan Nasional (BAPNA); Haluan: Politik; Kedudukan: Majene.
3. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR); Haluan: Politik; Kedudukan: Majene.

DAERAH LAIWUI DAN BUTON

1. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII); Haluan: Politik/Agama; Kedudukan: Raha.

MINAHASA

1. Twaalfde Provinsie (Singa Minahasa) (TWAPRO); Haluan: Politik; Kedudukan: Minahasa.
Ketua : J. Maweikere..

825

2. Komite Ketatanegaraan Minahasa (KKM); Haluan: Politik; Kedudukan: Minahasa.
Ketua : Dr. V.L. Ratoem- W.Ketua : E.D. Dengah
boeijiang Penulis : M.P. Mongola,
Bendh. : J.F.W. Kneefel Ch.P.J. Soemeiseij
Pbt-pbt. : K. Mangendap, J. Maweikere, P.A.P. Pitoi, A.A. Rompies.
3. Persatuan Timor Besar (PTB); Haluan: Politik; Kedudukan:
Ketua :
4. Pendirian Masyarakat Katholik (PAMAKAT); Haluan: Politik/Agama; Kedudukan: —
Ketua : A.A. Rompies, G. Dimpidoes
Penulis : Oiet Paat, F.J. Kambey
Pbt-pbt. : J.J. Palar, B. Polii, A. Tene, J. Wantah, L. Ngala.
5. Partai Demokratis Indonesia (PARDI); Haluan: Politik; Kedudukan: -
B.J. Lopian, Ch. Soemessey, F. Intana, A.S. Pangkey,
J.P. Mengola, O.N. Pakaja.
6. Front Demokrat Federal (FDF); Haluan: Politik; Kedudukan: Tondano.
Ketua : H.W. Rondonoewoe Penulis : E. Matoelandi,
Ch.Ch. Manaroisong F.A. Rambitan
Pbt. : O. Kandouw
7. Panitia Pengesah Keamanan Umum (PAPKU); Haluan: Politik;
8. Gerakan Indonesia Merdeka (GIM); Haluan: Politik; Kedudukan: -
Ketua : M. Sondakh, Penulis : A.B.H. Wawo-
D.A. Koemenit Roentoe
Bendh. : J.J.H. Pandelaki
Pbt-pbt. : R.C.L. Lasoet, A.C. Manoppo, Dr.W.J. Ratoelangi,
F.J. Geroengan.
9. Barisan Nasional Indonesia (BNI); Haluan: Politik; Kedudukan: -
Ketua : G.E. Daoehan, Penulis/
M.B. Toemtel Bendh. : A. Madjid
Pbt. : Ny. Soemampouw-Lapian, F. Mohede, E.H.B. Moget.
10. Persatuan Serikat Islam Indonesia (PSII); Haluan: Politik/Agama; Kedudukan: Bolaang, Mongondow, Gorontalo, Manado, Pare-pare, Makasar, Bacaan.

- Ketua : M.D. Kartawinata. Achmad Hippy, Jakin I. Parimata.
W.Ketua : D.P. Ma'moer Loebis Bahaoeddin, Moh. Amin,
Aboebakar atau Madeong.
11. Gabungan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI); Haluan: Politik; Kedudukan: -.
 12. Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS); Haluan: Politik;
Ketua : Karel Soepit Penulis : Bort Soepit
Pbt. : Feddy Dengah, Poeloekang, L. Anes
 13. Hoofden Bond; Haluan: Politik; Kedudukan: -.
Ketua : E.W. Lalamentik, Penulis : J.P. Mangela
P.J.A. Kawilarang Pnl./Bdh: Palangkahoe
Pbt. : Roeata, Mantiri, Tambahjong
 14. Persatuan Hukum Tua dan Pegawai Daerah Minahasa (PHPDM);
Haluan: Politik; Kedudukan: -.
R. Paat, H.F. Rorimpandey, Sampouw, Makatipoe, A. Rotikan, L. Rambli.
 15. Pemuda Indonesia Sulawesi Utara (PISO); Haluan: Politik;
Ketua : J. Karamoy, Arzad, Abdoek-Hari, S.J. Sondakh,
F.H.L.W. Mondong, B. Wowor, S. Kano, Ch.D. Pontoh.
 16. Persatuan Indonesia Muda (PIM); Haluan: Politik; Kedudukan: -.
Ketua : E.D. Johannes Penulis : R. Poeloekadang
 17. Indo Europees Verbond (IEV); Haluan: Politik; Kedudukan: Manado
Ketua : Ir. Belfrey Pnl./Bdh: J.E.W. Kneefel
 18. Panitia Pencegah Perpecahan (PPP); Haluan: Politik; Kedudukan: Manado.
 19. Singa Minahasa (TWAPRO); Haluan: Politik; Kedudukan: Tonelet.
Ketua : Frans Josep
 20. Barisan Nasional Indonesia (BNI); Haluan: Politik; Kesatuan Indonesia; Kedudukan: Tonelet.
Ketua : F.R. Eman Penulis : J. Walintoekan
Bendh. : R. Wowor
 21. Gerakan Republik Indonesia Timur (GRIT); Haluan: Politik; Kedudukan: Tomohon.

1. Pemakat	5. KKM
2. Hoofdenbond	6. Pakasaan-pakasaan
3. Bond Hukum Tua	7. Permi
4. Twapro	8. GIM

DAERAH POSO

1. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII); Haluan: Politik/Agama; Kedudukan: Poso; Ketua: K. Poawon.
2. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII); Haluan: Politik/Agama; Kedudukan: Belantak (Banggai).
3. Barisan Nasional Indonesia (BNI); Haluan: Politik; Kedudukan: Kolonedale.
4. Barisan Nasional Indonesia (BNI); Haluan: Politik; Kedudukan: Poso.
5. Barisan Nasional Indonesia (BNI); Haluan: Politik; Kedudukan: Benten (op Malain de Togaan groep).
6. PARDAFI; Haluan: Politik; Kedudukan: -; Ketua: Intje Mohammad Dachlan.

DAERAH BOLAANG MONGONDOW

1. Gerakan Indonesia Merdeka (GIM); Haluan: Politik; Kedudukan: -.
Ketua : A.G. Manoppo, J. Pontoh.
Penulis : R. Mokoginta Bendh. : J. Pontoh
Pbt. : L. Mokobombang, K. Imban, Z. Imban, A.M. Lazaboe-da.
2. Barisan Nasional Indonesia (BNI); Haluan: Politik.
Ketua : L.D. Mokodongan Penulis : S. Mokotoloy
Pbt. : Abd. Mamonto, Andoep Simala
3. Gabungan Partai-partai Rakyat Indonesia Bol. Mongondow (GAPRI-BOM); Haluan: Politik.
Pimpinan: A.C. Manoppo, M.D. Kartawinata, J. Ponto, K. Imban.
4. PERPIBOM; Haluan: Politik.
Ketua : J.K. Damopoli.
5. Kerukunan Wanita Bolaang Mongondow (KARWANI); Haluan: Politik/Sosial/Kultural.
Pld. : Boki vd Radja Ketua : Ny. Mokodompit.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

828

DAERAH SANGIR DAN TALAUD

1. Perserikatan Rakyat Sangir-Talaud (PARESAT); Haluan: Politik.
Ketua : J.E. Tatengkeng Penulis : J. Pontoh
Pbt. : W. Aer, P. Oesoeh
2. Gerakan Rakyat Indonesia Sangir-Talaud (GERIST); Haluan Politik.
3. Barisan Nasional Indonesia (BNI); Haluan: Politik.
Pimpinan: L. Kansil, B. Daoehan.
4. Serikat Nasional Indonesia (SENI); Haluan: Politik.
Ketua : A. Kantor Pnl. : D. Mangeghong
Pbt. : P. Bawole, Th. Taidi, J. Maloransa
5. Dewan Islam; Haluan: Agama.
Ketua : Mohammad Djoedi, Hasan Bachmid.
6. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII); Haluan: Politik.
7. Perserikatan Guru-guru Sangi-Talaud (PGST); Haluan: Politik.
Ketua : J.E. Tatengkeng, Penulis : P. Asoeh
L. Damar Bendh. : Z. Mananzang
Pbt. : H. Manikome, Z. Tatoehas, D. Kaboeroean.
8. Perserikatan Kaum Buruh (PKB); Haluan: Politik/Sosial.
9. Serikat Kaum Buruh Sangi-Talaud (SKBST); Haluan: Politik.
Ketua : W. Aer, L. Doema- Penulis : F. Mokodompis
lang
Pbt. : A. Amder, Oeli, B. Manoempil.
10. Partai Serikat Islam Indonesia Sangihe (PSII Sangihe); Haluan: Politik/Agama.
Ketua : A. Tompok, N. La- Penulis : I. Paparang
hade

DAERAH GORONTALO

1. Gerakan Kebangsaan Indonesia (GERKINDO); Haluan: Politik.
Ketua : A. Oeno, A. Saboe Penulis : I. Datau, Dj. Arbie
Bendh. : M.S. Ointoe, Moh. Ali.
Pbt. : A. Amoe, A.J. Oesman, K. Kaloekoe, A. Anis, A. Mardjid.

829

2. Badan Penyelenggara Suara Rakyat (BAPSURA); Haluan: Politik.
Ketua : N. Monoarfa
3. Gerakan Penyadar (PENYADAR); Haluan: Politik.
Ketua : K. Kaloekoe Penulis : Z. Jantoe
Ekon. : R. Toeli Berita : H.B. Lanoer
Wang. : A. Nggoeia Pnsht. : Abd. Walangadi
Propag. : A. Joenoes
4. Barisan Nasional Indonesia (BNI); Haluan: Politik.
5. Gabungan Pergerakan-pergerakan Rakyat Indonesia (GAPRI); Haluan: Politik.
Ketua : — Penulis : Moh. Ali,
Bdh. : A.R. Oeintoe Oe A. Boealati
Partai yang bergabung: 1. PSII, 2. Penyadar, 3. PII, 4. Persis,
5. GPI, 6. Muhammadiyah, 7. PNS, 8. PAI, 9. Gerkindo,
10. Parkindo, 11. BPII, 12. Rukun Tani, 13. PPI.
6. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII); Haluan: Politik/Agama.
Ketua : A. Hippy, Penulis : J. Monoarfa,
Oe. Hadjoe S. Masoe
Bdh. : S. Niode Pbt. : I. Jantie, I. Dajoh,
B. Baeta,
J. Dangie, B. Laya.
7. Majelis Syurau Muslimin Indonesia (MASYUMI); Haluan: Politik/Agama.
Ketua : — Penulis : Dj. Arbie, M. Imran
Bdh. : A. Hippy
8. Kuo Min Tang; Haluan: Politik.
Ketua : Tjoe Tek Ngo Penulis/
Pbt. : Liem Lang Teng, Bdh. : Lie It Ping
Sie Boen Seng, Tjang Woen, Lie Djit Hoa.
9. Gerakan Pemuda Indonesia (Afd. Wanita) (GERPINDO Afd. Wanita); Haluan Politik.
Ketua : Wartabone, Fien Bija.
10. Gerakan Pemuda Indonesia (GERPINDO); Haluan: Politik.
Ketua : M. Niode, A.Z. Hipi Penulis : G. Bokings
Pbt. : M.S. Ointoe, Anwar Djafera, S. Hasan, Achmad Masa,
Kadir Lamoeseo.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

830

11. Gerakan Kebangsaan Indonesia Wanita (GERKIWAN); Haluan: Politik.
Ketua : Ny. I. Oenoe-Monoarfa, Ny. M. Abas-Dambea.
12. Perserikatan Wanita Rakyat Indonesia (PERWARI); Haluan: Politik.
Ketua : Ny. Kaoenang Penulis : Ny. A.J. Oesman
Pbt. : Moh. Ali, A.R. Tangahoe
13. Persatuan Rakyat Indonesia; Haluan: Politik.
Ketua : J.P. Karamoy
14. Gabungan Seluruh Partai Politik Rakyat (GASPRINDO); Haluan: Politik; Kedudukan: Leok.
PSII, GERKINDO, GERKIWAN, WAPSIE, BNI, PKR, PGI, SERPI.
15. Front Pemuda Indonesia; Haluan: Politik; Kedudukan: Gorontalo.
1. Gerpindo, 2. Pemuda Muhammadiyah, 3. PMI, 4. Pemuda Parnami, 5. PPII, 6. NS, 7. SMM, 8. AMI, 9. Barpindo, 10. SMI, 11. SMPN, 12. Panca Sila, 13. Bapris, 14. IWI, 15. STI, 16. IPPI.
16. Badan Pendidik Rakyat Indonesia (BAPRIS); Haluan: Politik/Sosial; Kedudukan: Gorontalo.
Ketua : Moeis Rahim Penulis : E. Hardjono
Bdh. : Thomas Niode.

PROPINSI MALUKU (DAERAH MALUKU SELATAN)

1. Gabungan Sembilan Serangkai (GSS); Haluan: Politik; Kedudukan: Ambon.
Ketua : J.M. Litaay, Penulis/
M. Sialama Bdh. : Th. Piris
Pbt. : J. Ferdinandus, S. Samoesamoe, E. Gensel.
2. Pembantu Serikat (Sekutu) Hindia Belanda (PS(S)HB); Haluan: Politik; Kedudukan: Ambon.
Ketua : W.E. Parinoessa, Penulis : M.S. Paays,
D.M. Koe-Hoewaël M. Marlete
Bdh. : Nn. M. Corpoetty Pbt. : J.C. Tomasouw,
P. Soepoesepa

831

3. Indo Europees Verbond (IEV); Haluan: Politik; Kedudukan: Ambon.
Ketua : Ir. Klenche, Penulis : Van Alice
Ehrencron Bdh. : Camoenië
4. Persatuan Timor Besar (PTB); Haluan: Politik; Kedudukan: Ambon.
Ketua : D. Titaley, Wenas Penulis : Wattimena, Nicolaas
Bdh. : Roemengan, Pbt. : Tamahoe,
Pikalawa Samoesamoe
5. Partai Indonesia Merdeka (PIM); Haluan: Politik; Kedudukan: Ambon.
Ketua : E.U. Poepella Penulis : O. Pattimaipaoe
Bdh. : I. Hamid bin Hamid Said Bachmid
Pbt. : Bitek Gelar Soetan Tjaniago, Moh. Abihasin, Hardin Latoepono.
6. Kebaktian Rakyat Indonesia Maluku (KRIM); Haluan: Politik; Kedudukan: Makasar.
Ketua : Wattimena Penulis : Ramatoeang
7. Pemuda Republik Maluku Ambon (PRIMA); Haluan: Politik; Kedudukan: Ambon.
Ketua : Abdoelkadir Toeakiat
Penulis : Moh. Hoesein Toeakiat
Bdh. : Moh. Tahir Salampessy.
8. Partai Maluku Raya; Haluan: Politik; Kedudukan: Ambon.
Ketua : D.Z. Pesoewarissa Penulis : A. Nanlohy

TOEAL HFD. BST. TE WONRELI

9. Perhimpunan Politik Serikat Selatan Daya (SSD); Haluan: Politik/Sosial.
Ketua : S.J. Philipus Penulis : J. Bakker
Bdh. : M.S. Johannis Pbt. : S. Mozes,
S.H. Salmon.



DAFTAR PARTAI-PARTAI DI DAERAH PROPINSI MALUKU

DAERAH MALUKU UTARA

1. Persatuan Indonesia (PI); Haluan: Politik; Kedudukan: Ternate.
Ketua
Kehorm. : A.M. Ali Kama
Ketua : Dr. Ch. Boesoirie, Achmad Anafi
Penulis : A. Mononoetoe, M.S. Djahir, Noerdin Iskandar Alam,
Hamdi Fabjao
Bdh. : Sagak Alhandar
Pbt. : Zainal R. Oemar.
2. Persatuan Indonesia (PI); Haluan: Politik; Kedudukan: Soela.
Ketua : I.S. Sangadji, Bdh. : H.J. Kane,
N. Iskandar Alam J. Majan.
3. Persatuan Indonesia (PI); Haluan: Politik.
Ketua : S. Poesoeng, Penulis : S. Kamaroellah,
R.M. Sadaralam M. Abdoelwati
Bdh. : S. Bodja, H. Arif
Pbt. : A. Saha, I. Ratoeela, M. Tambolona.
4. Indo Europees Verbond (IEV); Haluan: Politik.
Ketua : H.W. Moemoes Penulis/
Bdh. : C. Meis
Pbt. : F.H. Knefsel
5. Persatuan Sejarah Maluku Utara (PSMU); Haluan: Politik.
Ketua : Pr. Hasan, Penulis : Joseph Roeli
Dano Safie Sjah
Bdh. : Safie Oerip Pbt. : Pr. Kader, Pr. Ishak,
Dano Djoebain,
Hi Taher Hamra
6. Persatuan Sejarah Maluku Utara (PSMU); Haluan: Politik.
Ketua : Abd. Boeamonabot, Ach. Nama
Penulis : Idris Oemasoengi, Abd. Doeilla, H. Darakel,
lbr. Oemar.

7. Persatuan Buruh Tani Indonesia (PEBTI); Haluan: Politik.
Ketua : Raden Tji, Penulis : Oesman Wakidm,
Mog. Soeleman Joenoes Oesman
Pbt. : Moh. Ismail, Raden Oemar
8. Persatuan Indonesia (PI); Haluan: Politik; Kedudukan: Tobelo.
Ketua : Raden Selamat Wakil kt. : Dibang Tapi-Tapi
Penulis : Jacob Bangsa Penulis II : Thomas Mangani
Bdh. : Hijas Soeradji
Pbt. : Talib Tapi-Tapi, Hasan bin Robo, Dorara bin Daga,
Saleh Ratoe Bagoes, Marcus Tarangi, Bahari bin Djae.

PROPINSI SUNDA KECIL

DAERAH BALI

1. Partai Demokrat Indonesia (PADI); Haluan: Politik.
Ketua : Tjokorde Anem Penulis : Tjokorde Gde Rai,
Poetera, I Goesti I Goesti Ngoerah
Njoman Kompiang Ananda
Bdh. : I Kade RAOE, I Njoman Djelada
2. Ikatan Persatuan Wanita Indonesia (IPWI(Bali)); Haluan: Politik.
Ketua : Ny. Ida Bagoes Penulis : Nn. Dajoe Raka
Oka, Ny. Ida Ba- Padmi, Ny. Dajoe
goes Oka Geboren Made Roni
Ni Kt. Djero
Bdh. : Nn. Loeh Poetoe Pbt. : Ny. Gede Tjeger,
Soenderi, Ny. Dewa Ny. Poetoe Sasih,
Gede Djajanegara Nn. Wajan Koeatja
1. Perwano, 2. Rupi, 3. Pita, 4. Perwata, 5. IPI, 6. IWI, 7. PIP,
8. Pertiwi, 9. Tapi, 10. Persiwa.
3. Gerakan Nasional Indonesia (GNI); Haluan: Politik; Kedudukan:
Denpasar.
Ketua : Ida Bagoes Poetera Wakil kt. : Made Mendera,
Manoeaba I Goesti Poetoe Mer-
tha
Penulis I : Gede Poetera, Penulis II : I Dewa Gede, Djaja-
Kamaijana negara.
Bdh. : Ketoet Kaot
Pbt. : I Goesti Kompiang Soedjana, Njoman Oka, Made
Raona

4. Indo Europees Verbond (IEV); Haluan: Politik; Kedudukan: Denpasar.
Ketua : J.W.A. Ramakers Wakil kt. : P.A. Schwab
van Praag
5. Panitia Penolong Pembangunan Republik Indonesia (PPPRI);
Haluan: Politik/Sosial; Kedudukan: Denpasar.
Ketua kehormatan: Radja Badung
Ketua : Made Mendera Wakil kt. : I Goesti Ngoerah
Kanta
Penulis I : I Goesti Made Penulis II : Goesti Kompiang
Moedera Soedjana
Bdh. : Ida Bagoes Pidada
Anggota : I Goesti Poetoe Mertha, Ketoet Mendera.
6. Gerakan Pemuda Indonesia (GERPINDO); Haluan: Politik;
Kedudukan: Denpasar.
Ketua : Anak Agoeng Bagus Wakil kt. : I Made Narsin
Setedja
Penulis I : I Gde Poeger Penulis II : Ida Bagus Mandira
Bdh. : Soemantera
Pbt. : I Goesti Ketoet Reti, Ida Bagoes Kompiang, I Goesti
Ajoe Nenderi, I Ketoet Djedog.

DAERAH LOMBOK

1. Partai Guru Indonesia (Serikat Guru Indonesia) (PARGINDO);
Haluan: Politik; Kedudukan: Lombok.
Ketua : Saoed, Nengah Penulis : Made Raka, Sanoesi
Tegeg
Pbt. : Mochasan, Hamdan, Wajan Soedana, Saleh.
2. Badan Pembontak; Haluan: Politik.
Ketua : Amaq Melan Redot
3. Partai Indonesia Raya; Haluan: Politik; Kedudukan: Mataram.
Ketua : Selamat Wakil kt. : I Nengah Inton
Penulis I : Soenadha Penulis II : Goesti Bagoes
Bdh. : Abdoerrachman Soedharsana
Pbt. : Laloe Wiraja, R. Makarim.

DAERAH TIMOR

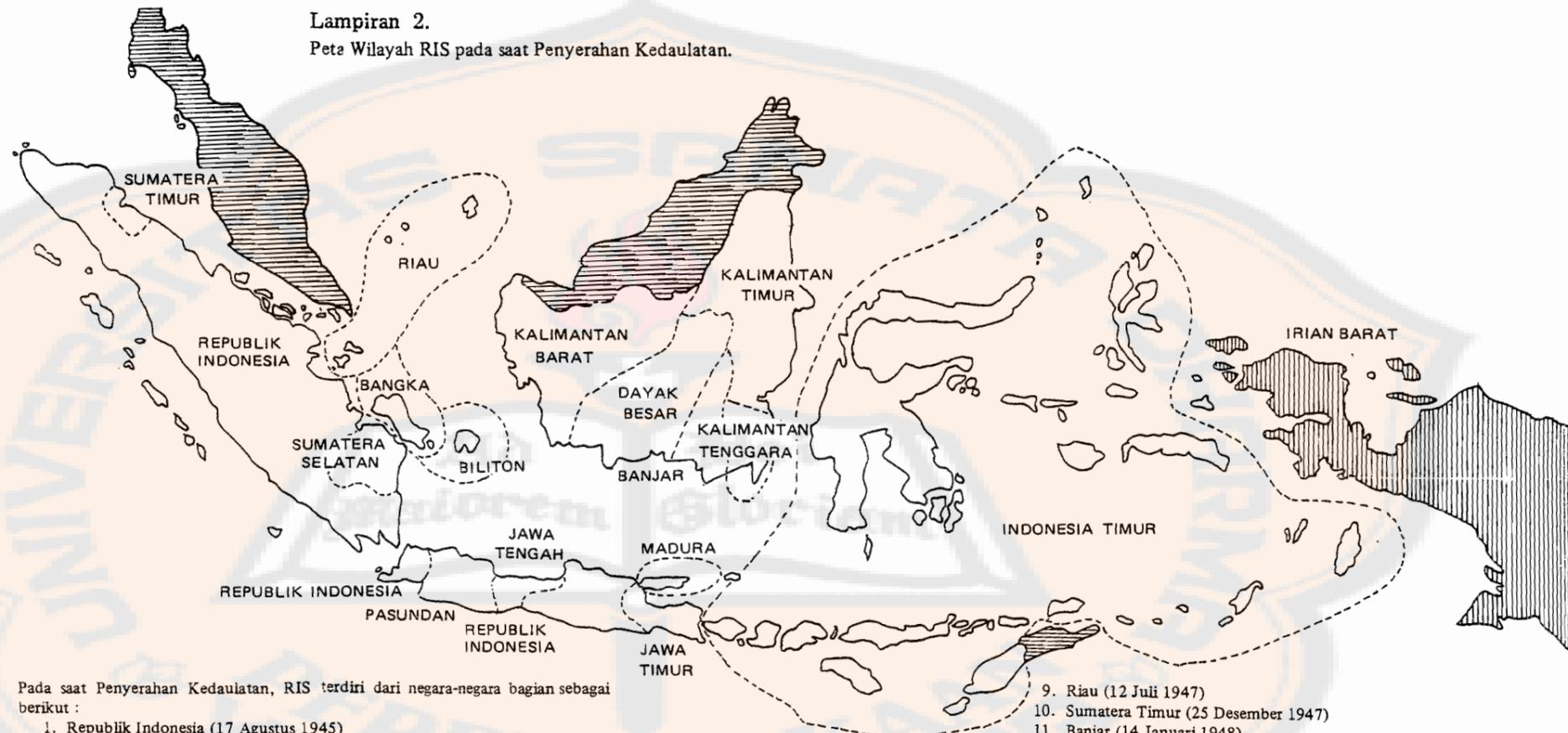
1. Persatuan Islam Timor (PERSIT); Haluan: Politik/Agama;
Kedudukan: Kupang
Ketua : A.S. Atoesita, Penulis : Selim, Djo Kenning,
A.M. Saliyas Samioen
Bdh. : Achmad Hoesein, Djawas
2. Democratisch Bond dari Indonesia (DBI); Haluan: Politik;
Kedudukan: Kupang.
Ketua : N. Loimalitna, Penulis : J. Pallar,
A.A. Caffin Th.C. Lerrich
Bdh. : J.P. Toehoepoering, Pbt. : W.D. Frans,
K. Oliver A.M. Sapija, Tjoen
Song-Liong
3. Indisch Katholieke Volks Partij (IKVP); Haluan: Politik; Kedudukan:
Kupang.
Ketua : Ch. Toelings, Parera- Penulis : A.D.M. Parera
Fernandez Bdh. : T.F. Jonas
Pbt. : K. Radjalewa, J. Radjalewa.
4. Perserikatan Selatan Daya (PSD); Haluan: Politik; Kedudukan:
Kupang.
Ketua : W.D. Frans Penulis : N. Lohimalitna,
Bdh. : L. Salamaoe F. Johannes
Pbt. : W.A. Leha, W. Joostensz, O. Makitan, Oeniwali.
5. Persatuan Timor Besar (PTB); Haluan: Politik; Kedudukan: -
Ketua : Mandoeapessy Penulis : Angonois
Pbt. : Laisina, J. Mowan, P. Boengaradji.
6. Perkumpulan Kamum Maluku (PKM); Haluan: Politik; Kedudukan:
Kupang.
Ketua : M.A. Sapija Penulis/
Pbt. : E.B. Lapoelalan, Bdh. : A. Toisoeta
L. Salamoe, W.D. Fransz.
7. Persatuan Demokratis Indonesia (PDI); Haluan: Politik; Kedudukan:
Timor/kepulauanannya.
Kep. : Bestuur Ketua : Chr.F. Vdaoemanse,
Pnl. : D. Bessy B. Sahetappy.
Pbt. : A. Sitta, M. Monne, Amaija.

8. Partai Katholik Rakyat Indonesia (PKRI); Haluan: Politik; Kedudukan: Timor/kepulauanya.
Ketua : G. Manek, Penulis : G.A. da Costa
A.D.M. Parera Bdh. : J.W. Tan
9. Indo Europees Verbond (IEV); Haluan: Politik; Kedudukan: Timor/kepulauanya.
Ketua : Ranaoeret, Penulis/
Pbt. : J.V. Linke Bdh. : F.W.J. Overbeek
10. Democratisch Bond van Indonesië (DBI); Haluan: Politik; Kedudukan: Kefamenanoe.
Ketua : J. Yh. Mamoh, Penulis : I. Salmoen
Bdh. : G.A. Kano Pbt. : J. Frans
11. Kuo Min Tang (KMT); Haluan: Politik/Sosial; Kedudukan: SoE.
Ketua : Sia I Wat, Penulis : Lie Soe King
Bdh. : Go Tek Beng, Pbt. : Poa Djie Soen, Sia Kin Moe.
12. Kuo Min Tang (KMT); Haluan: Politik/Sosial; Kedudukan: Nikiniki.
Ketua : Tan Tjien Siong, Penulis : Tan A Hing
Bdh. : Tan Boen Hwat
Pbt. : Soen Ek Tjioe, Leo Khek Ko, Ang Sie Pin, Lein Djing : Fong.
13. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII); Haluan: Politik/Agama; Kedudukan: Kalabahi.
Ketua : S. Abdoallah, Dewan Hadji Dasing
Ketua : Tahir Mou, Penulis : Abdoerrahim Kama-
Arad-Amat hi, Dasing Sangadji.
Bdh. : Ama Galekko
Pbt. : Djou Maratoe, Djili NaE, Ali Tanakeng.
14. Partai Moeslimin Timor (PARMOETI); Haluan: Politik/Agama; Kedudukan: Barmoesa, Alor.
Ketua : Akbar Nawi, Penulis : M. Baso, N. Mande
S. Tolang Bdh. : Hodongero
15. Persatuan Islam Timor (PERSIT); Haluan: Politik; Kedudukan: Barmoesa, Alor.
16. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII); Haluan: Politik; Kedudukan: Kikilai.
17. Partai Muslimin Timor (PARMUTI); Haluan: Politik; Kedudukan: Barmoesa, Alor.
Ketua : A.R. Nawa, Penulis : M.R. Baso,
Sj. Tolang S. La Arah
Bdh. : G. Garo.
18. Partai Protestant Pantor (PARPROP); Haluan: Politik; Kedudukan: Pantor Kalondana.
Ketua : P.M. Liling, Penulis : M. Ena,
D.B. Legoer Ch. Wabang
Bdh. : Ch. Wabang, Pbt. : M. Kabbi,
Pensht. : S. Sandy Karel Moeta.
19. Taman Pembacaan; Haluan: Politik; Kedudukan: Pulau Sawu.
Pemimpin: R. Rohimone.
20. Persatuan Islam Timur (PERSIT); Haluan: Politik/Agama; Kedudukan: Roti.
Ketua : Djawas Laonso, Wakil kt. : Moehammad Ismail
Bdh. : Awat Djawas, Penulis I : Hoesin Sidin
Penulis II : S. Moechmad
Pbt. : A. Sjaaban, Achmad Salim, A. Nadilao, A. Ismail, M. Arif, Abd. Lantja.
21. Pemuda Masehi Injil Kota Kupang (PMIKN); Haluan: Politik; Kedudukan: Kupang.
Ketua : D. Bessy, Wakil kt. : F.M. Adam
Penulis I : N.L. Djari, Penulis II : M. Lekitonoe
Bdh. : S. Manoehoetoe
Pbt. : J.M.P. Daelima, J.A. Roemate, Nn. Mone H.H. Kaho, D. Pattiwaellapia.

22. Angkatan Pemuda Indonesia (API); Haluan: Politik; Kedudukan: Kupang.
 Ketua : Izak Tiboelodji Wakil kt. : Moh. Tajib
 Penulis : Abd. Latief, Bd. : D. Bessy
 G.M. Hailitiek
 Pbt. : M. Riki, A. Djawas, Nn. A. Poeradja, Nn. J.M. Amalo.
23. Pelita Timor Asli (PTA); Haluan: Politik/Sosial; Kedudukan: SoE.
 Ketua : P. Bapis Penulis I : S.L. Sefan
 Penulis II : E. Leo. Bd. : Nn. E. Ambiran
 Wakil kt. : J. Benoe
 Pbt. : A. Bere, Z. Nakamnanoe, B. Selan.
24. Kuo Min Tang (KMT); Haluan: Politik/Sosial; Kedudukan: Nikiniki.
 Ketua : Tan Tjin Seong Penulis : Tan A Hing
 Bd. : Tan Ban Hwat
 Pbt. : Soen Ek Tjioe, Leo Kek Ko, Ang Sie Pin, Lie Djing Tong.
25. Partai Katholik Indonesia Timur (PARKIT); Haluan: Politik/Agama; Kedudukan: Kupang.
 Ketua : P.A.S. Parera Wakil kt. : Bontanone
 Penulis I : Cl. da Comes Penulis II : Mandjikoe
 Bd. : P. Bobe Kewa
 Pbt. : Franciscus Sikoe, D. Lamoeri, Frans Fernandus.
26. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII); Haluan: Politik/Agama; Kedudukan: Dulolong (Timor).
 Ketua : Oemar Para Wakil kt. : Kapitan Awa
 Penulis I : Lansoe NaE Penulis II : Parendji Sang
 Bd. : Bapa Toekang Pbt. : Halo Baloe, Kota Dasing.
27. Partai Demokrasi Associatif (PARDAFI); Haluan: Politik; Kedudukan: Kupang, Afdeling SoE.
 Ketua : N. Loimalitna Penulis I : I. Th. C. Larrick
 Penulis II : C. Maanari Bd. : K. Olivier
 Pbt. : W.D. Frans, S.M. Sapija, Tjoeng Soen Liong, Oemar Baktir.

28. Persatuan Indonesia Raya (PIR); Haluan: Politik/Sosial/Kebudayaan; Kedudukan: Kupang.
 Ketua : J.E.A. Kairoepan Wakil kt. : A.B. Talib
 Penulis I : A. Johannis Penulis II : R. Soeprabto
 Bd. : S.A.M. Giri
 Pbt. : Ny. M. Soeprabto, Ny. L. Sion Risi J. Sine.
29. Partai Katolik Indonesia (PERKIT); Haluan: Politik; Kedudukan: Kupang.
 Ketua : P.A.S. Parera Wakil kt. : J.P. Ben Tanoni
 Penulis I : Chl. da Comes Penulis II : J.D. Mandjikoe
 Bd. : P. Bebekewa
 Pbt. : Frans Fernandez, Pnsht. : P.J. Kersten
 Fransiscus Siska.
30. Perkumpulan Selatan Daya (PSD); Haluan: Politik/Sosial; Kedudukan: Kupang.
 Ketua : W.D. Frans Wakil kt. : W.A. Leha
 Penulis I : F.J. Johannis Penulis II : L. Ch. Joesoef
 Bd. : C. Persiana
 Pbt. : P. Manaha, C. Losinalitna, K. Olivir, R. Francis, C. Christiaan.
31. Indo Europees Verbond (IEV); Haluan: Politik/Sosial; Kedudukan: Kupang.
 Ketua : P.T. Rancoeret Penulis/Bdh. : F.W.J. Overbeek
 Pbt. : Jork.
32. Partai Demokrasi Assosiatif Federal Indonesia (PARDAFI); Haluan: Politik; Kedudukan: Kupang.
 Ketua : N. Loimalitna Penulis : Th. C. Lerek,
 Bd. : K. Olivir F.W. Johannis
 Pbt. : W.D. Frans, Oemar Baktir, Tjoen Soen-Leong.

Lampiran 2.
Peta Wilayah RIS pada saat Penyerahan Kedaulatan.

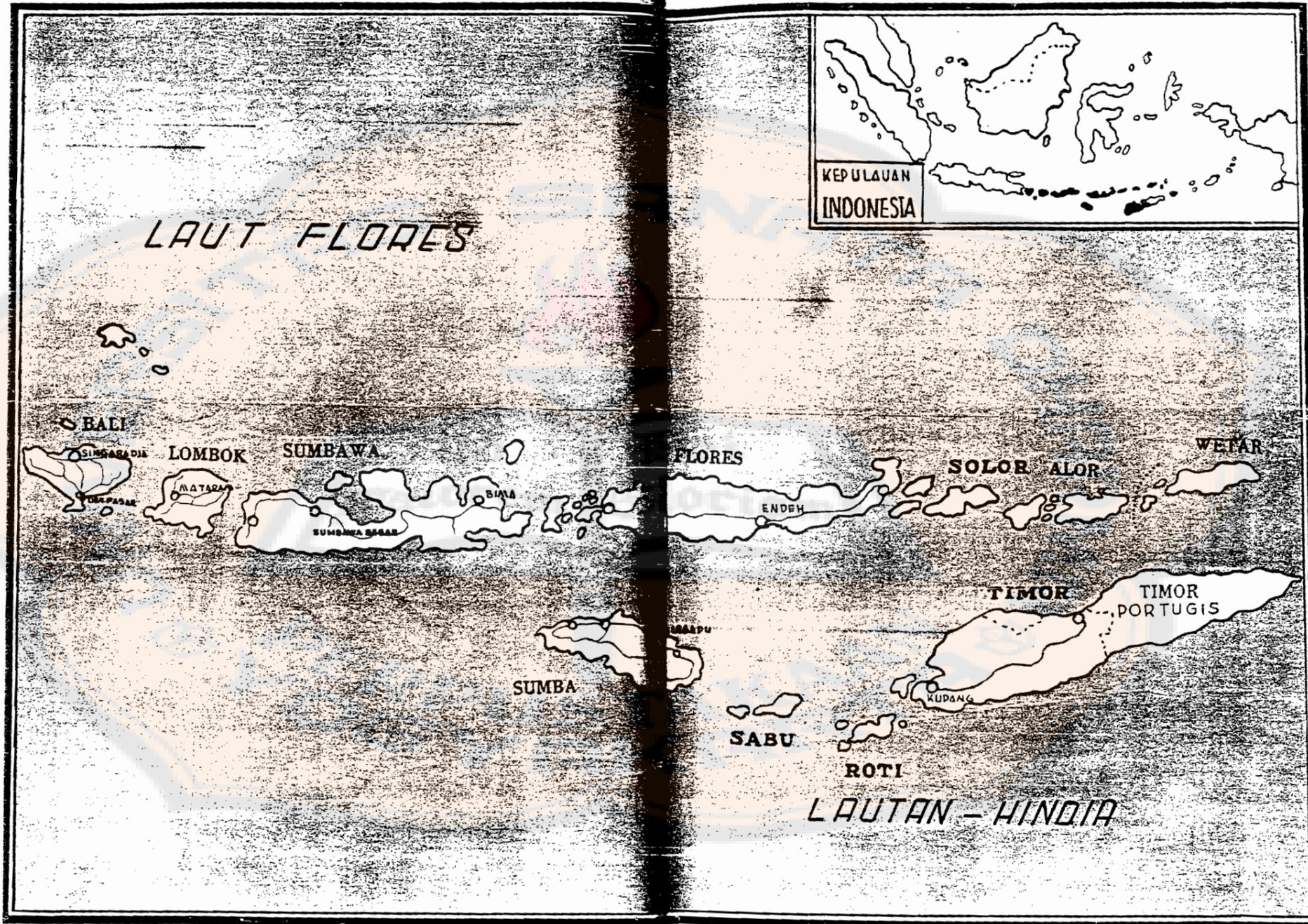


Pada saat Penyerahan Kedaulatan, RIS terdiri dari negara-negara bagian sebagai berikut :

1. Republik Indonesia (17 Agustus 1945)
2. Dayak Besar (7 Desember 1946)
3. Indonesia Timur (24 Desember 1946)
4. Kalimantan Tenggara (8 Januari 1947)
5. Kalimantan Timur (12 April 1947)
6. Kalimantan Barat (12 Mei 1947)
7. Bangka (12 Juli 1947)
8. Biliton (12 Juli 1947)

9. Riau (12 Juli 1947)
10. Sumatera Timur (25 Desember 1947)
11. Banjar (14 Januari 1948)
12. Madura (20 Februari 1948)
13. Pasundan (24 April 1948)
14. Sumatera Selatan (30 Agustus 1948)
15. Jawa Timur (26 Nopember 1948)
16. Jawa Tengah 23 Pebruari 1949)

Di samping itu terdapat pula wilayah/distrik federal Jakarta yang didirikan pada 11 Agustus 1948.

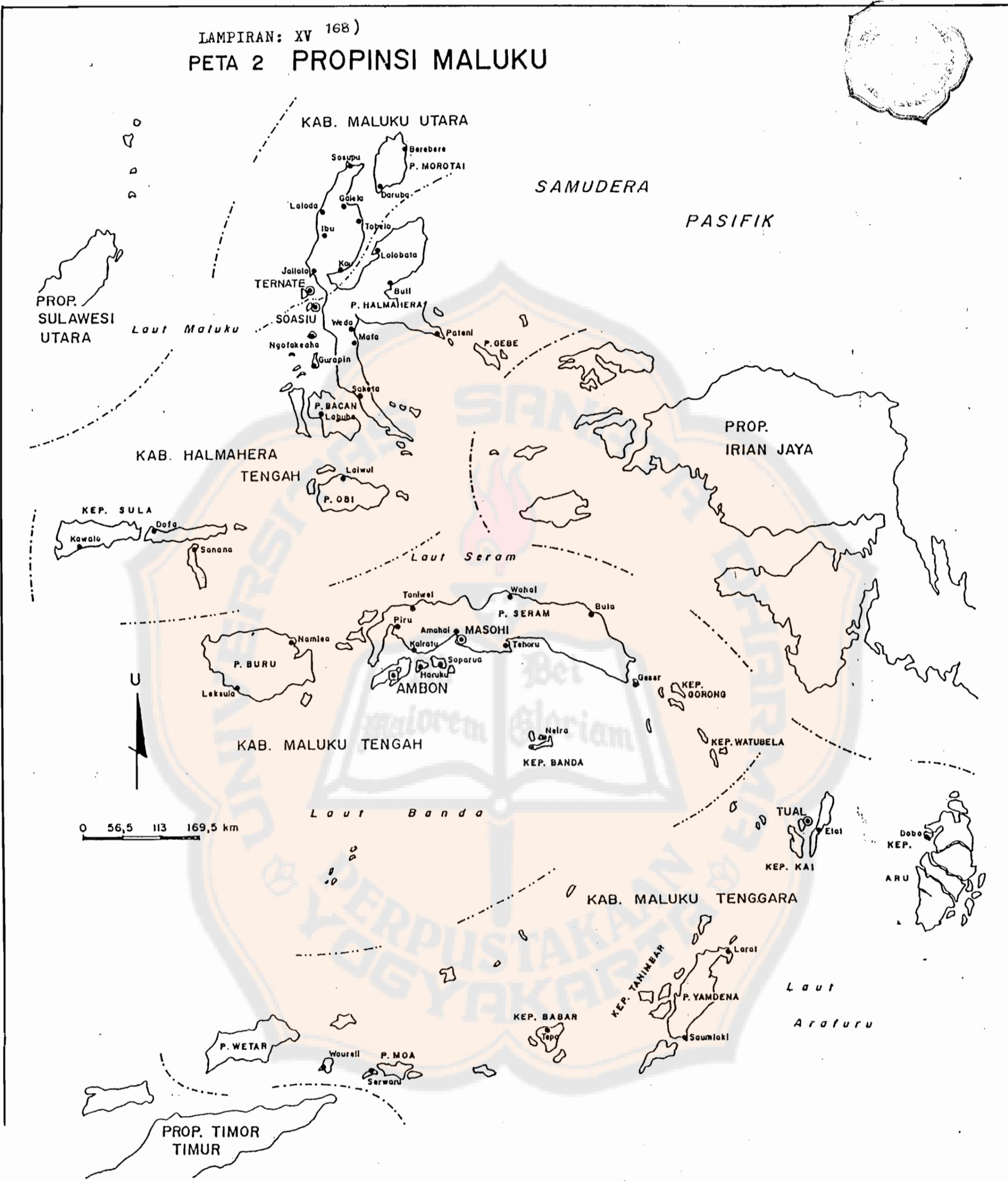


PROPINSI Sunda Ketjil



¹⁶⁵ Kementerian Penerangan RI, Sulawesi, op. cit., hlm i

LAMPIRAN: XV 168)
PETA 2 PROPINSI MALUKU



Keterangan

- Batas Propinsi
- Batas Kabupaten
- ⊙ Ibu Kota Propinsi / Kota Madya
- ⊙ Ibu Kota Kabupaten
- Kota Kecamatan
- Tempat Lain